RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERIODE 2025-2029

KATA PENGANTAR

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dalam pengertian ini, setiap orang atau komunitas ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pada Pasal 36, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Untuk menjalankan amanat ini, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025 melakukan penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yang mana penyusunannya memperhatikan muatan yang terkandung dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2029 serta perkembangan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar 5 tahun terakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 3, menunjukan tahap penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dokumen ini dirumuskan untuk menjangkau upaya yang lebih luas dari tahap penanggulangan bencana yang sudah berjalan selama ini. Dokumen ini disusun melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang diharapkan mampu untuk dioperasionalkan dalam kegiatan teknis. Proses implementasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah disusun diharapkan dapat selaras dan tertuang ke dalam Rencana Strategis (Renstra) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman serta bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyusunan Dokumen RPJMD dan dapat membantu implementasi upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, terarah dan terintegrasi sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penanggulangan bencana.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan para pemangku kepentingan terkait yang telah berperan aktif dan berkontribusi positif dalam penyusunan dokumen ini.

Benteng, 24 Juli 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19700726 199101 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 berada pada angka 133.58 dengan kategori risiko Sedang. Nilai indeks risiko bencana disebabkan oleh potensi ancaman bencana yang cukup tinggi diantaranya bencana Hidrometeorologi seperti Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai, Kekeringan, Banjir, Tanah longsor, serta bencana geologis seperti Gempa Bumi dan Tsunami. Ancaman bencana hidrometeorologi dan geologis yang tinggi disebabkan oleh letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada dekat dengan zona subduksi dan patahan aktif dan wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan serta memiliki topografi perbukitan.

Melihat nilai indeks risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada pada kategori sedang yang sewaktu-waktu bisa menjadi tinggi, maka diperlukan perencanaan penanggulangan bencana. Upaya menurunkan indeks risiko bencana dilakukan melalui serangkaian kegiatan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Perencanaan penanggulangan bencana (RPB) juga menjadi dokumen yang disusun untuk menunjang perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2025-2029.

Bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam RPB dianalisis menggunakan hasil kajian risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar dan sejarah kecenderungan kejadian bencana. Adapun bencana yang akan ditangani, yaitu Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai, Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, dan Tsunami. Penyusunan RPB didasari pada isu strategis yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Isu strategis dikaji berdasarkan masalah-masalah pokok yang bersumber dari kajian risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar, prioritas aksi Indeks Ketahanan daerah (IKD) Kabupaten Kepulauan Selayar dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan skoring dihasilkan 3 (tiga) Isu strategis penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu: (1) menurunnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang mempengaruhi optimalisasi penanggulangan bencana, (2) perubahan iklim (*climate change*) meningkatkan kerentanan masyarakat di daerah rawan bencana, dan (3) penyelenggaraan penanggulangan bencana yang belum optimal.

Berdasarkan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional dan penyelarasan perencanaan penanggulangan bencana tingkat nasional dan

daerah maka Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan 3 tujuan penanggulangan bencana yaitu: (1) Mewujudkan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan, (2) Mewujudkan ketahanan (*resiliensi*) masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, dan (3) Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusi dan kolaboratif.

Tujuan penanggulangan bencana menghasilkan beberapa sasaran penanggulangan bencana yaitu: (1) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, (2) Meningkatkan luasan tutupan lahan hijau (vegetasi) alami di kawasan rawan bencana, (3) Meningkatkan pengelolaan kawasan hijau dan daerah tangkapan air secara berkelanjutan, (4) Meningkatkan ketahanan energi bersih, air dan kemandirian pangan, (5) Meningkatkan integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam dokumen perencanaan daerah, (6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal dan infrastruktur dalam menghadapi dampak perubahan iklim, (7) Meningkatkan upaya penanganan tematik kawasan rawan bencana, (8) Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah, (9) Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah, dan (10) Meningkatkan upaya pemulihan pasca bencana daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka dirancang program penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan selama 5 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu: Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; Program Pengelolaan Persampahan; Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Program Pembinaan Perpustakaan; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Permukiman di Daerah Rawan Bencana; Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Penanganan Kerawanan Pangan; Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Program Perekonomian dan Pembangunan; Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; Program Penanggulangan Bencana; Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB); Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana (KRB); Program Peningkatan Sistem Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; Program Peningkatan Kualitas Keluarga; Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB); Program Perlindungan Cagar Budaya dari Risiko Bencana; Program Penanganan Bencana; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Peningkatan Perizinan Bangunan (PBG); Program Pembangunan Infrastruktur Perumahan Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB); Program Tata Kelola Kawasan Permukiman Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB); Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Permukiman di Daerah Rawan Bencana; Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran; Program Rumah Sakit Aman Bencana; Program Pengendalian Penduduk; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ); Program Pengelolaan Arsip; dan Program Pencatatan Sipil.

Program penanggulangan bencana selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). RAD-PRB akan dilaksanakan secara kolaboratif multi pihak sehingga terlihat capaian penanggulangan bencana yang terukur dan dapat dioperasionalkan oleh masing-masing stakeholder. RAD-PRB dipadukan dengan perencanaan lain, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) per

iode 2025-2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029. Pendanaan pelaksanaan RAD-PRB melalui APBD Kabupaten Kepulauan Selayar dan sumber pendanaan lain, baik dari pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha.

Pengendalian dan evaluasi penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mengacu pada kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPB. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan pada awal periode untuk melihat pemaduan para-pihak, pencapaian hasil dan keluaran rencana aksi , pada paruh waktu untuk Pmelihat pencapaian sasaran dan pada akhir

periode pelaksanaan RPB untuk melihat pencapaian sasaran, tujuan dan faktor penyebab tidak tercapainya tujuan.

DAFTAR ISTILAH

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
2. Bahaya (hazard) atau ancaman adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian materil, dan kerusakan lingkungan.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Data dan Informasi Bencana Indonesia selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar. terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya Risiko bencana.
5. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB)
6. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
7. Kapasitas (*capacity*) adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
8. Kerentanan (*vulnerability*) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan

menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyebab.

9. Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Mitigasi (mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Mitigasi fisik (*structure mitigation*) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
13. Mitigasi non-fisik (*non-structure mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
14. Pemulihan (*recovery*) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
15. Penanggulangan bencana (disaster management) adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
16. Pencegahan (prevention) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
17. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

18. Pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
19. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
20. Peringatan dini (*early warning*) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
21. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
22. Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
23. Rehabilitasi (rehabilitation) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Rekonstruksi (reconstruction) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
25. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RPB 2025-2030 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

26. Rencana Kontinjensi adalah Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
27. Risiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
29. Sistem penanganan darurat bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
30. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
31. Tanggap darurat (emergency response) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bapperida	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPP	Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinkes	Dinas Kesehatan
Dinsos	Dinas Sosial
Disdagkop UKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Disdik	Dinas Pendidikan
Dishub	Dinas Perhubungan
Diskominfo SP	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
Disparbud	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Disperkim	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
DP3AP2KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
DPKP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPUTR	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
FPRB	Forum Pengurangan Risiko Bencana
Kesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KRB	Kajian Risiko Bencana
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
Perda	Peraturan Daerah
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMI	Palang Merah Indonesia
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
RAD PRB	Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana
RAN PRB	Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana

RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
Renas PB	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
Renstra OPD	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPKB	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Satpol PP Damkar	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
Tapem	Tata Pemerintahan
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UU	Undang-undang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
DAFTAR ISTILAH viii
DAFTAR SINGKATAN xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xviii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Kerangka Pikir 2
D. Kedudukan Dokumen 4
E. Landasan Hukum 7
F. Ruang Lingkup 8
BAB II. KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH 10
A. Karakteristik Kebencanaan Daerah 10
B. Risiko Bencana Daerah 23
C. Prioritas Bencana Yang ditangani 35
D. Masalah Pokok 37
E. Rumusan Isu Strategis 44
BAB III. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 47
A. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional 47
B. Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan 53
C. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar 54
D. Kerangka Kerja Pra bencana 57
E. Kerangka Kerja Saat Bencana 78
F. Kerangka Kerja Pasca bencana 79
G. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 79

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 87
A. Tujuan dan Sasaran 87
B. Strategi dan arah Kebijakan 90
C. Program Penanggulangan Bencana 93
BAB V. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA 101
BAB VI. PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 136
A. Pemaduan Para Pihak 136
B. Pemaduan Perencanaan Lainnya 138
C. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi 160
BAB VII. PENUTUP 168
DAFTAR PUSTAKA 169
LAMPIRAN 170
A. Gambaran Lokasi Aksi PRB terhadap Prioritas Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar 171
B. Matriks Lengkap Rencana aksi PB 179

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas wilayah dan jumlah pulau per-kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar 11
Tabel 2. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Selayar 17
Tabel 3. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2024 18
Tabel 4. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks risiko bencana (IRB) kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 22
Tabel 5. Potensi Bahaya di Kabupaten Kepulauan Selayar 23
Tabel 6. Potensi penduduk terpapar bahaya di Kabupaten Kepulauan Selayar 24
Tabel 7. Potensi kerugian dan kerusakan lingkungan akibat bahaya di Kabupaten Kep. Selayar 25
Tabel 8. Kerentanan berbagai jenis bahaya di Kabupaten Kepulauan Selayar 25
Tabel 9. Tingkat Risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar 26
Tabel 10. Matriks analisis prioritas risiko bencana yang ditangani di Kabupaten Kepulauan Selayar 36
Tabel 11. Bencana prioritas yang akan ditangani dalam penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar 36
Tabel 12. Identifikasi masalah keterpaparan kajian risiko bencana 37
Tabel 13. Identifikasi masalah Indeks Ketahanan Daerah 39
Tabel 14. Kesenjangan RPJMD terhadap Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar 42
Tabel 15. Hasil identifikasi masalah pokok Kebencanaan Kabupaten Kepulauan Selayar 43
Tabel 16. Tabel pembobotan isu strategis penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS) 45
Tabel 17. Mandat BPBD dalam Urusan Penanggulangan Bencana 59
Tabel 18. Mandat BPBD/OPD dalam Urusan Penanggulangan Bencana..... 61
Tabel 19. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana 88
Tabel 20. Proyeksi Capaian IKD dan IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 90
Tabel 21. Strategi dan arah kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar 90
Tabel 22. Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar 94
Tabel 23. Rencana Aksi daerah Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2025-2029 102
Tabel 24. Tugas para pihak dalam penanggulangan bencana di kabupaten Kepulauan Selayar 136
Tabel 25. Pemaduan RPB 2025-2029 Ke Perencanaan Lainnya 139
Tabel 26. Kerangka Pemantauan Pelaksanaan RPB 2025-2029 161

Tabel 27. Kerangka Kerja Pengendalian Pelaksanaan RPB 2025-2029 162
Tabel 28. Format Pemantauan Tahunan Pelaksanaan RPB 2025-2029..... 163
Tabel 29. Kerangka Kerja Evaluasi Pelaksanaan RPB 2025-2029 166
Tabel 30. Format Penyajian Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPB 2025-2029 ... 167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penyusunan RPB Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS) 4
Gambar 2. Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana 6
Gambar 3. Kerangka Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS) 6
Gambar 4. Peta administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar 11
Gambar 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024 13
Gambar 6. Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2024 (Sumber: Hasil Pengolahan Data, Tahun 2025) 19
Gambar 7. Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2024 20
Gambar 8. Grafik tingkat bahaya di Kabupaten Kepulauan Selayar 24
Gambar 9. Peta risiko banjir Kabupaten Kepulauan Selayar 28
Gambar 10. Peta risiko Cuaca ekstrim Kabupaten Kepulauan Selayar 29
Gambar 11. Peta risiko tanah longsor Kabupaten Kepulauan Selayar 30
Gambar 12. Peta risiko Gelombang ekstrim & abrasi pantai Kabupaten Kepulauan Selayar 31
Gambar 13. Peta risiko Kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kepulauan Selayar 32
Gambar 14. Peta risiko Gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar 33
Gambar 15. Peta risiko Tsunami Kabupaten Kepulauan Selayar 34

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 berada pada angka 133.58 dengan kategori risiko Sedang. Nilai indeks risiko bencana disebabkan oleh potensi ancaman bencana yang cukup tinggi diantaranya bencana hidrometeorologi seperti Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Kekeringan, Banjir, Tanah longsor, serta bencana geologis seperti Gempa Bumi dan Tsunami. Ancaman bencana hidrometeorologi dan geologis yang tinggi disebabkan oleh letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada dekat dengan zona subduksi dan patahan aktif, termasuk wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan serta memiliki topografi perbukitan. Selain itu, faktor kerentanan yang tinggi serta kapasitas daerah yang masih rendah menjadi faktor yang menentukan tingginya indeks risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar. Kerentanan masyarakat dipengaruhi oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar menggantungkan hidup pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sehingga sangat terdampak apabila terjadi bencana.

Melihat tingginya indeks risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar maka diperlukan perencanaan penanggulangan bencana (selanjutnya disebut RPB) untuk menurunkan indeks risiko bencana melalui serangkaian kegiatan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Perencanaan penanggulangan bencana (RPB) menjadi dokumen yang disusun untuk menunjang perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar menempatkan isu penanggulangan bencana sebagai salah satu isu pembangunan dalam periode 5 tahun mendatang. Penyusunan RPB di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah langkah strategis dan wajib untuk melindungi masyarakat, memperkuat ketahanan daerah, dan mendukung pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang aman dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana Pasal 6 agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana agar menghasilkan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pengurangan risiko.

Dokumen RPB merupakan dokumen daerah yang disusun melalui pendekatan *top down-bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) penthahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan perguruan tinggi) di Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS) agar penyusunan dokumen ini diharapkan dapat implementatif. Stakeholder dilibatkan dalam semua tahapan penyusunan dokumen berupa lokakarya awal, diskusi publik pengumpulan data, paparan draft RPB, asistensi hingga finalisasi dokumen RPB Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Tujuan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2025-2029 disusun dengan tujuan:

1. Membuat perencanaan yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan indeks risiko bencana (IRB) dan meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) di Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS);
2. Mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana antar pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS) agar lebih efektif dan terkoordinasi;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis organisasi perangkat daerah (RENSTRA OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

C. Kerangka Pikir

Proses penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kepulauan Selayar diawali dengan telaah kajian risiko bencana, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan jenis serta tingkat risiko bencana prioritas yang harus segera ditangani oleh daerah. Proses selanjutnya adalah identifikasi akar masalah yang mencakup analisis keterpaparan terhadap sumber bahaya (KRB), kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, dan keterkaitan dengan permasalahan pokok dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Hasil kajian ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi akar masalah serta membentuk isu-isu strategis yang akan menjadi pondasi dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana.

Setelah isu strategis teridentifikasi, proses dilanjutkan dengan perumusan arah kebijakan penanggulangan bencana, yang mencakup tujuan, sasaran, dan program yang merujuk pada dokumen perencanaan nasional seperti RIPB (Rencana Induk Penanggulangan Bencana), RENAS PB (Rencana Nasional Penanggulangan Bencana), dan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) daerah. Langkah berikutnya adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), yang meliputi rencana program dan kegiatan PRB dalam bentuk matriks serta peta spasial. Matriks program/kegiatan menyajikan informasi mengenai aktivitas yang direncanakan, indikator, pelaksana, waktu, dan pendanaan. Sementara itu, data spasial digunakan untuk menggambarkan lokasi-lokasi prioritas dalam intervensi PRB.

Rencana Aksi Daerah PRB juga memperhatikan standar pelayanan minimum (SPM) dalam bidang kebencanaan dan dilakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Selain itu, dilakukan analisis dan penyesuaian terhadap kodefikasi penganggaran agar kegiatan PRB dapat dimasukkan dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan aksi pengurangan risiko bencana akan ditindaklanjuti melalui tahapan pemaduan, pengendalian, dan evaluasi. Kerangka pikir penyusunan dokumen RPB Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan pada gambar sebagai berikut:

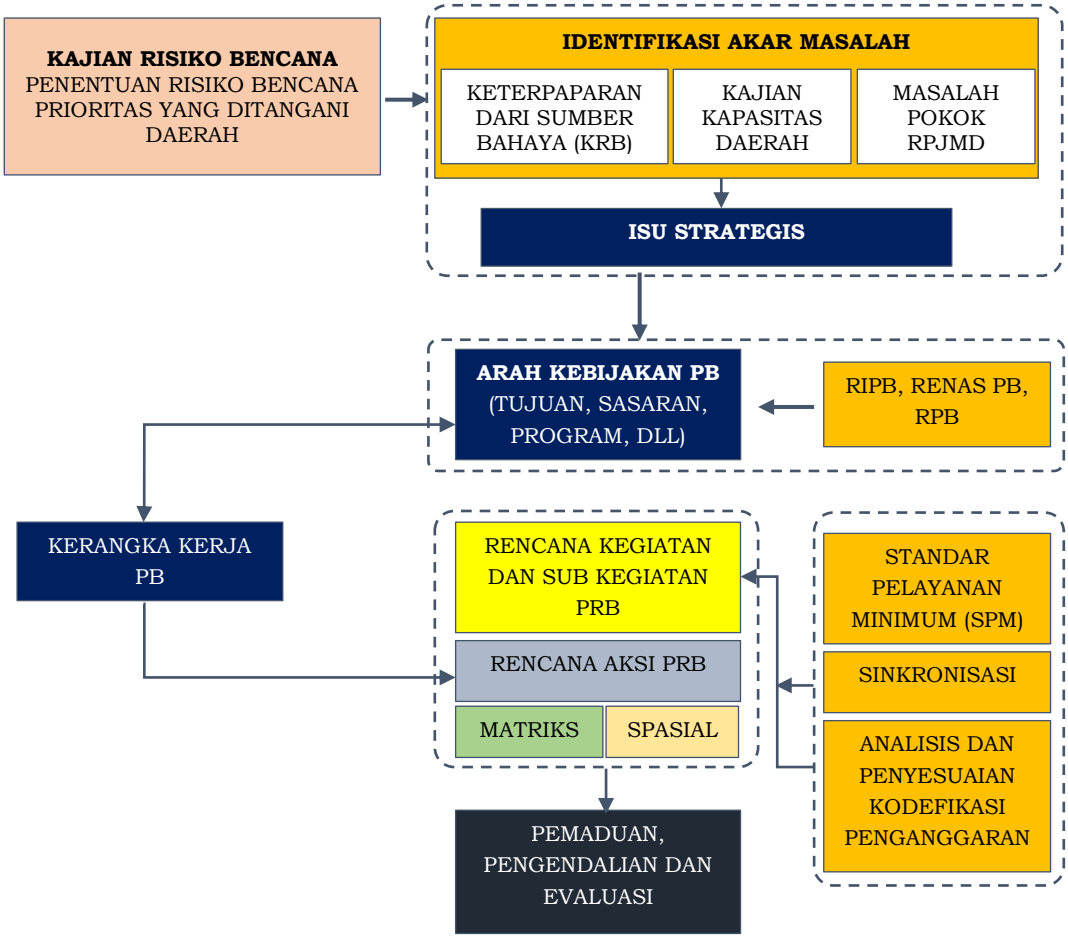

Gambar 1. Kerangka Pikir Penyusunan RPB Kabupaten Kepulauan Selayar

D. Kedudukan Dokumen

Kedudukan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program dan kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPB disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan penyusunan, dokumen ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB Kabupaten Kepulauan Selayar sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan

untuk mendukung RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Dokumen RPB ini akan diproses menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Penanggulangan Bencana. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, ada pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

Rencana penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa perencanaan Provinsi maupun kabupaten, yang terintegrasi dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
7. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga, OPD Provinsi/Kabupaten;
8. Rencana Aksi PRB, baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD PRB Kabupaten);
9. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
10. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja OPD Kabupaten (Renja OPD);

Rencana-rencana tersebut memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan gambar 2.

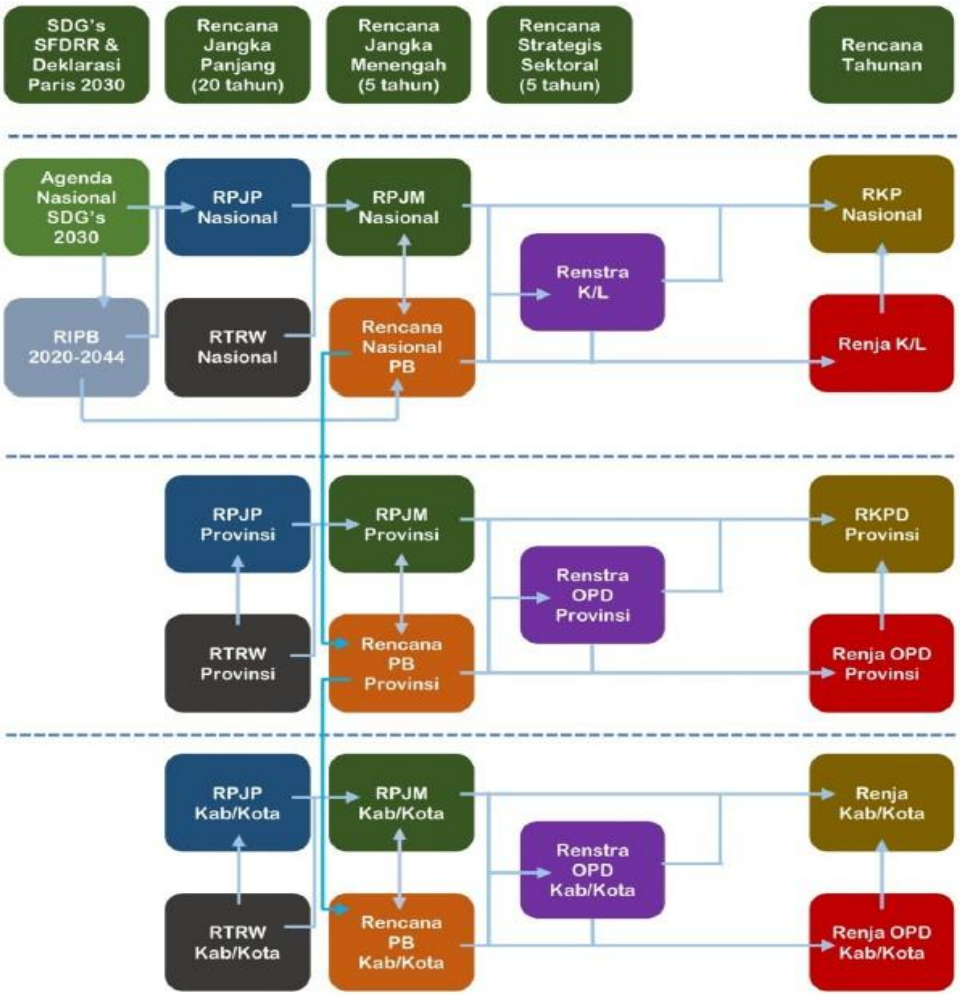

Gambar 2. Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana

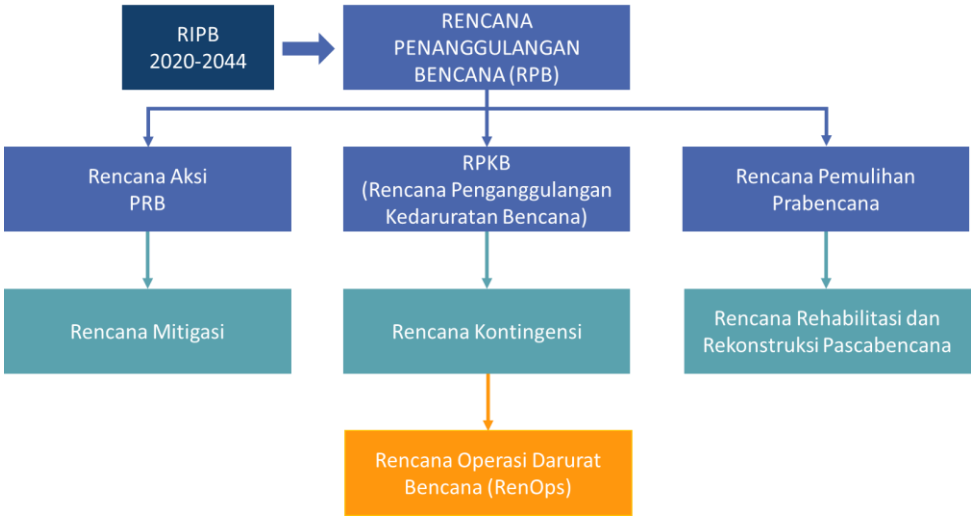

Gambar 3. Kerangka Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar

E. Landasan Hukum

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2020-2045
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Panduan Monitoring dan Evaluasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Tahun 2025-2029;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3046 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

F. Ruang Lingkup

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kepulauan Selayar memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan hasil dari dokumen kajian risiko bencana kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2029 serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar. RPB dijabarkan dalam isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun ke depan. RPB Kabupaten Kepulauan Selayar ditujukan pada pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Lingkup risiko bencana prioritas yang ditangani adalah bencana dengan tingkat risiko sedang dan tinggi dengan kecenderungan kejadian tetap dan meningkat. Bencana prioritas di Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Tsunami, sementara bencana non prioritas adalah Tanah Longsor dan Gempa Bumi.

Lingkup jenis kegiatan rencana aksi mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang disesuaikan dengan kewenangan kabupaten.

Lingkup pelaksana Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) adalah seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, media dan lembaga non-pemerintah lainnya yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi.

BAB II. KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

A. Karakteristik Kebencanaan Daerah

Karakteristik bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar dideskripsikan berdasarkan pada aspek-aspek yang membangun risiko atau terkait dengan potensi risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah administratif, demografis, geografis, ekosistem dan topografis, hidrologis, geologis, ekonomi, maupun keterjadian bencana. Lebih detail terkait aspek yang membangun risiko di Kabupaten Kepulauan Selayar dipaparkan sebagai berikut:

1. Aspek Administratif

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) Kecamatan, 81 desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan ibukota Pariangan, Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebunging, Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota Batangmata. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Selat Bira);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur

Luas wilayah dan jumlah pulau per-kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 1. Gambaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar secara administratif, dapat dilihat pada Gambar 4.

Tabel 1. Luas wilayah dan jumlah pulau per-kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Pulau	Luas Total (Km^2)
1.	Pasimarannu	Desa Bonerate	15	195,33
2.	Pasilambena	Desa kalatoa	16	114,88
3.	Pasimasunggu	Desa Kembang Ragi	21	131,80
4.	Takabonerate	Desa Batang	29	49,30
5.	Pasimasunggu Timur	Desa Bontobulaeng	5	67,14
6.	Bontosikuyu	Desa Harapan	29	248,22
7.	Bontoharu	Kel. Bontobangun	8	128,12
8.	Benteng	Kel. Benteng	-	24,63
9.	Bontomanai	Desa Polebungin	-	136,42
10.	Bontomate'ne	Kel. Batangmata	6	193,05
11.	Buki	Desa Buki	-	68,14
	Kepulauan Selayar	**Kec. Benteng**	**130**	**1.357,03**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

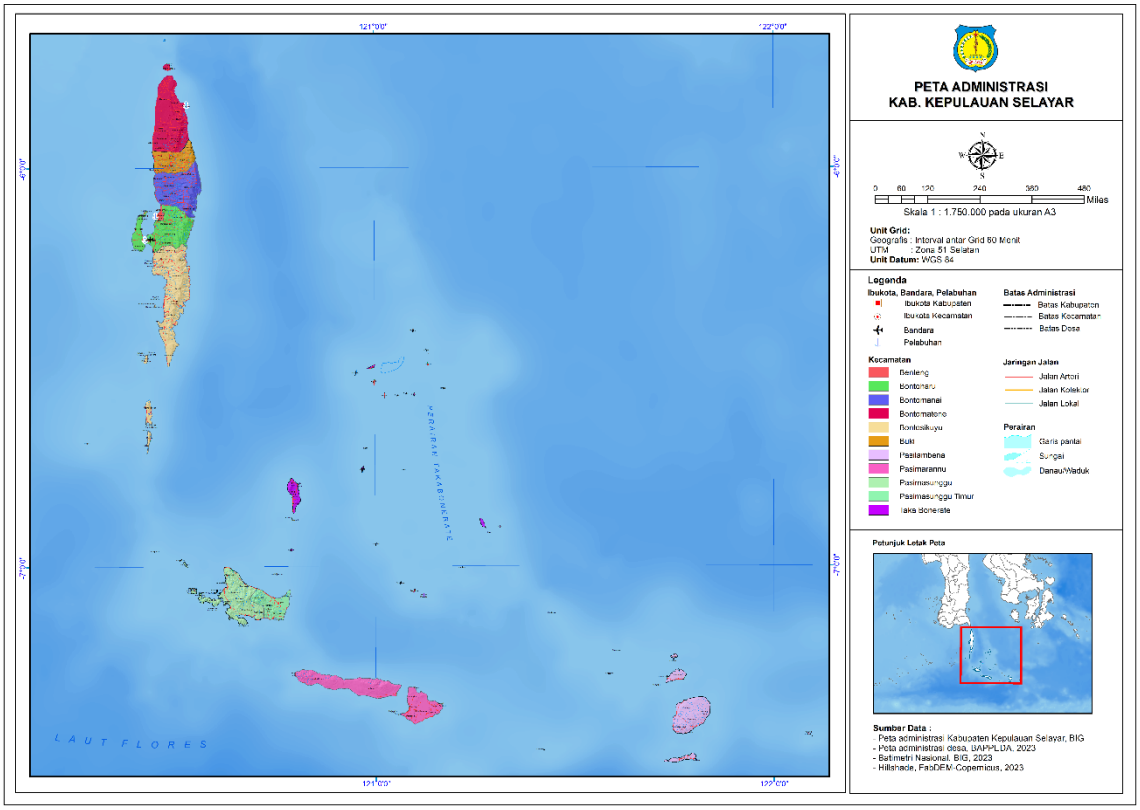

Gambar 4. Peta administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber: KRB, 2023

2. Aspek Geografis

Secara Geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada bagian selatan Pulau Sulawesi dan merupakan kabupaten yang terdiri dari gugusan kepulauan. Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5°40' - 7°35' LS dan 120°15' - 122°30' BT dengan luas wilayah sebesar 10.503,69 km^2, terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km^2, dan luas wilayah laut 9.146,66 km^2, dengan panjang garis pantai 670 km. Wilayah laut yang mengelilingi daratan menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sangat bergantung pada kondisi iklim, baik untuk transportasi laut maupun ketahanan pangan. Situasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kabupaten Kepulauan Selayar rentan terhadap bencana yang dipengaruhi oleh iklim seperti gelombang ekstrim dan abrasi pantai serta cuaca ekstrim.

3. Aspek Demografis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 berjumlah 143.096 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Benteng yaitu sebanyak 24.378 jiwa. Sementara Kecamatan Buki merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terendah selama 5 (lima) tahun terakhir dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 6.925 jiwa. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar selama beberapa tahun terakhir bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif rendah dan fluktuatif. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 adalah 137.071 jiwa, kemudian pada tahun 2021 tumbuh menjadi 137.974 jiwa, data tahun 2022 menjadi 139.145 jiwa dan data tahun 2023 menjadi 142.100 jiwa, atau tumbuh rata-rata sebesar 1,11 % per-tahun. Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 5.

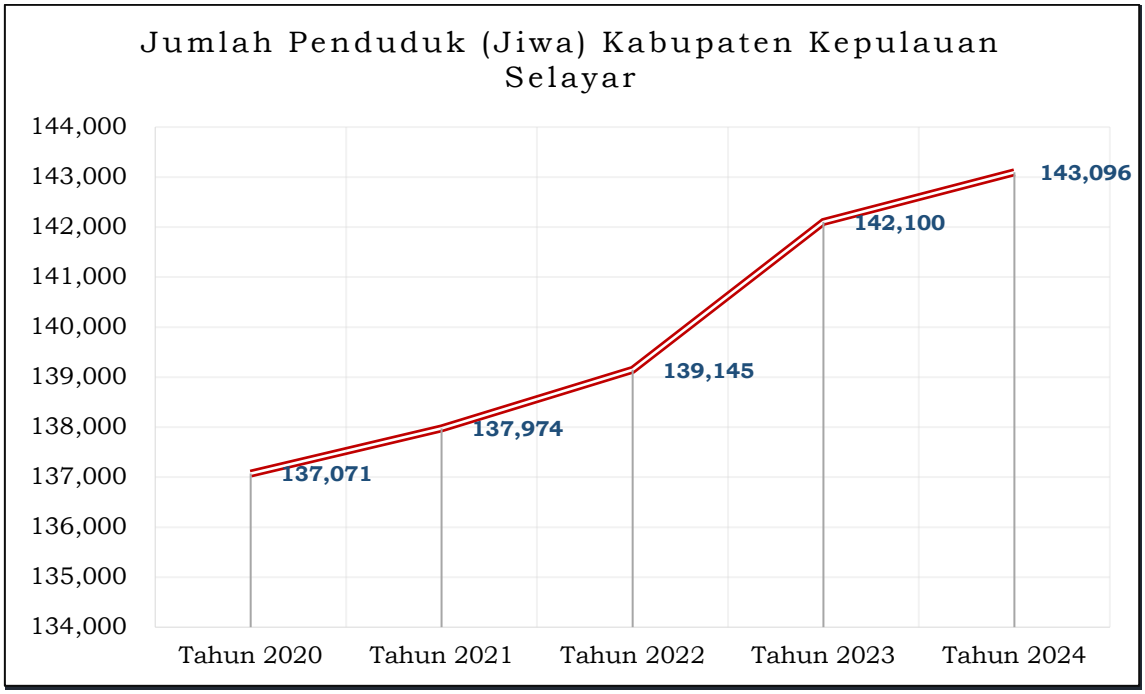

Gambar 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Sumber: RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa pada Kecamatan Benteng tingkat pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan. Persebaran jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak merata mengakibatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 105 jiwa/km^2. Melihat indikasi terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Benteng tersebut menunjukkan telah terjadi urbanisasi untuk bertempat tinggal di Kecamatan Benteng. Sebagaimana diketahui bahwa Kecamatan Benteng merupakan pusat kota dengan segala pusat aktivitas di dalamnya termasuk pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa yang mampu menarik perpindahan penduduk. Selain itu, pertambahan penduduk juga terjadi di Kecamatan Bontosikuyu. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi perlu ditekan sehingga menjadi stabil sedangkan wilayah yang masih mampu menampung meningkatnya pertumbuhan penduduk perlu dikembangkan, salah satunya dengan penyediaan sarana prasarana. Peningkatan jumlah penduduk juga dapat dikaitkan dengan peningkatan jumlah populasi rentan yang bermukim pada kawasan rawan bencana. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, akan memiliki jumlah korban yang lebih besar apabila terdampak bencana.

4. Aspek Topografis

Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Selayar sangat bervariasi, sebagian tanah datar dan ada yang agak miring. Fisiografi Kepulauan Selayar berdasarkan kondisi batuan dan kontrol struktur geologi terdiri dari tiga satuan morfologi, yaitu: satuan morfologi daratan alluvial pantai, satuan morfologi perbukitan bergelombang, dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal. Satuan morfologi daratan alluvial pantai menempati daratan sempit di pantai barat. Kepulauan Selayar terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan satuan morfologi perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal secara dominan menempati bagian barat dengan ketinggian 356-657 meter di atas permukaan laut. Bentang alam yang tinggi di sini diantaranya puncak Gunung Bontoharu (435 m), Gunung Bontokali (353 m), serta Gunung Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, lava, konglomerat, tufa dengan batuan dengan selingan batuan sedimen laut.

Persentase kelas kelerengan Kepulauan Selayar umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15%), dan semakin ke Selatan kelerengan tersebut semakin besar. Kecamatan Bontosikuyu mempunyai kelas sangat terjal (>40%) mencapai 43,97% terhadap luas wilayah kecamatan, sedangkan di Kecamatan Bontoharu lereng sangat terjal mencapai 33,12%, akan tetapi di Kecamatan Bontomatene dimana lereng sangat terjal hanya mencapai 4,21% dari luas wilayah kecamatan. Kelas kelerengan wilayah sangat erat berkaitan dengan potensi bencana tanah longsor, cuaca ekstrim dan bencana banjir. Wilayah dengan kemiringan lereng >45 derajat akan memiliki potensi longsor. Begitupun wilayah dengan tingkat kelerengan yang cenderung datar akan memiliki potensi bencana banjir dan cuaca ekstrim yang di juga dipengaruhi juga oleh faktor lainnya seperti daerah aliran sungai dan keterbukaan lahan.

5. Aspek Hidrologis

Kondisi hidrologis Kepulauan Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Kepulauan Selayar, yang pada umumnya debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai dan sistem sungainya. Akibat sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan (straight) rendah, serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kepulauan Selayar, sehingga besaran debit air sungai-sungai di Kepulauan Selayar sulit diukur. Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka pada wilayah bagian tengah

(yang merupakan sebaran endapan formasi Walanae) merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat tertekan (aresian aquifes) dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari 1-3 liter/detik). Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan alluvial dan endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembah-lembah yang ditempati oleh endapan batuan formasi Camba. Tingkat kedalaman air tanah sangat bervariasi tergantung pada keadaan alam dan jenis lapisan batuan. Pada endapan alluvial dan endapan pantai, tingkat kedalaman muka air tanahnya berkisar antara 5-6 meter, dan sangat dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas ini dapat dijumpai pada daerah yang ditutupi oleh endapan batu gamping Selayar dari formasi Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang akibat pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air yang ada sangat terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah termanfaatkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Indikasi keberadaan mata air tersebut terdapat di beberapa wilayah antara lain: Batangmata Sapo, Lembang-Lembang, Bonto dan sebelah timur Tile-tile, dengan besaran debit air relatif kecil sampai sedang (1-4 liter/detik).

Sistem aliran hidrogeologi di Kepulauan Selayar menunjukkan adanya pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan perairan laut. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk sungai-sungai bawah tanah. Hal ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya, Tamasongia dengan debit air yang bervariasi. Keterbatasan sumber air akibat cakupan luas DAS (Daerah Aliran Sungai) yang relatif sempit, struktur batuan permukaan dan *catchment area* sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali potensi air. Daerah aliran sungai (DAS) seringkali menjadi salah satu wilayah yang memicu terjadinya bencana banjir. Daerah aliran sungai yang tidak terawat dan cenderung rusak akan memicu peningkatan bencana banjir.

6. Aspek Geologis

Secara umum kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau kecil yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar. Geologi Pulau Selayar masih berhubungan dengan geologi Sulawesi Selatan bagian Selatan. Sedang geologi pulau-pulau kecil di kabupaten ini, yang terletak di Laut Flores, kemungkinan berhubungan dengan geologi Pulau Buton.

Batuan tertua yang menyusun Pulau Selayar adalah batuan gunung api Formasi Camba yang berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir. Bagian bawah dari Formasi Camba tersusun oleh breksi, lava, konglomerat dan tufa.

Di atasnya dijumpai batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan gunung api. Batuan-batuan Formasi Camba dijumpai di bagian tengah pulau dengan arah penyebaran utara-selatan. Diatas Formasi Camba dijumpai Formasi Walanae yang menjemari dengan batu gamping Selayar. Formasi Walanae terdiri dari batu pasir yang berselingan dengan batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan batu gamping. Formasi ini berumur dari Miosen Tengah hingga Pliosen.

Pada umumnya pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar disusun oleh terumbu karang. Beberapa pulau menunjukkan kondisi geologi yang sangat berbeda dengan daratan Pulau Selayar. Beberapa pulau disusun oleh batuan beku yang berasal dari kerak kontinen seperti halnya Pulau Buton. Pulau-pulau ini adalah Pulau Jampea yang disusun oleh batuan beku granit dan Pulau Kayuadi bagian utara disusun oleh batuan beku yang bersifat menengah. Keberadaan pulau-pulau ini sampai sekarang masih menjadi obyek penelitian yang menarik bagi pakar geologi. Batuan-batuan yang menyusun Pulau Selayar pada umumnya terlihat lemah sampai sedang dengan kemiringan batuan ke arah barat dan jurus perlapisannya relatif utara-selatan.

7. Aspek Ekonomi

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 mengalami perlambatan, antara lain: Sektor Pertambangan dan Penggalian dari 7,66 persen pada tahun 2022 menjadi 3,53 persen pada tahun 2023, begitupun dengan sektor Industri Pengolahan yang mengalami perlambatan dari 7,23 persen di tahun 2022 menjadi 3,78 persen pada tahun 2023. Namun perlambatan yang paling signifikan terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan yang melambat menjadi 4,84 persen dari 11,67 persen pada tahun 2022 serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum melambat dari 13,53 persen pada tahun 2022 menjadi 5,11 di tahun 2023. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto laju pertumbuhannya melambat dari 4,66 persen pada tahun 2022 menjadi 3,43 persen pada tahun 2023, sedangkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga hanya tumbuh sebesar 0,01 poin dari 5,09 persen pada tahun 2022 menjadi 5,10 persen pada tahun 2023.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 4.047,38 Miliar Rupiah, nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 4.182,33 Miliar Rupiah. Nilai PDRB (ADHK) tahun 2024 menurut lapangan usaha yang terbesar adalah pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 1.665,77 Miliar Rupiah, kemudian diikuti oleh

sektor Konstruksi sebesar 760,50 Miliar Rupiah dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 406,50 Miliar Rupiah. Tingginya nilai PDRB sektor-sektor tersebut disebabkan antara lain karena mata pencaharian masyarakat Selayar didominasi oleh pertanian dan perikanan, banyaknya kegiatan konstruksi, tingginya tingkat konsumsi dan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Selayar

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	Nilai PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan	1.501,47	1.550,58	1.591,13	1.643,05	1.665,77
B	Pertambangan dan Penggalian	29,55	31,60	34,02	35,22	35,20
C	Industri Pengolahan	118,44	124,49	133,48	138,53	146,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,48	5,71	5,76	6,21	6,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,51	5,51	5,74	5,75	5,79
F	Konstruksi	661,28	688,54	719,95	744,81	760,50
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	322,96	340,01	366,73	384,71	406,50
H	Transportasi dan Pergudangan	77,05	84,74	94,63	99,21	101,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	9,24	10,49	11,03	11,71
J	Informasi dan Komunikasi	139,50	141,47	143,78	153,05	160,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	44,68	44,97	45,17	46,46	47,59
L	Real Estat	64,47	65,27	65,74	68,95	71,53
M,N	Jasa Perusahaan	0,57	0,57	0,58	0,60	0,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	306,42	319,14	312,04	318,64	344,33
P	Jasa Pendidikan	233,89	244,96	257,68	268,07	282,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,21	87,76	95,22	100,31	109,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	19,84	20,99	21,64	22,77	25,44
Produk Domestik Regional Bruto		3.620,20	3.765,56	3.903,80	4.047,38	4.182,33

Sumber: RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebesar 7.986,24 Miliar Rupiah, nilai tersebut meningkat menjadi sebesar 8.340,51 Miliar Rupiah pada tahun 2024. Sepanjang lima tahun terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2024 sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebesar 3.595,17 Miliar Rupiah atau 43,10 persen, selanjutnya adalah sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 21,36 persen (1.781,79 Miliar Rupiah) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 692,55 Miliar Rupiah (8,30 persen). Sementara sektor Jasa Perusahaan sebagai penyumbang PDRB terkecil yaitu sebesar 1,33 Miliar Rupiah (0,02 persen)

8. Aspek Sejarah Kejadian Bencana

Sejarah kejadian bencana dapat dijadikan acuan untuk memahami risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan risiko bencana tersebut. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dan data dari Pusdalops BPBD Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2024

No	Bencana	Total Kejadian	Dampak Bencana (Korban jiwa & kerusakan infrastruktur)						
			Meninggal	Menderita	Mengungsi	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasum	Jembatan
1	Banjir	16	2	4470	109	292	2	2	15
2	Cuaca Ekstrim	417	0	187	39	1058	2	1	0
3	Tanah longsor	7	0	0	5	1	0	0	0
4	Gelombang Ekstrim & Abrasi	17	0	18	0	44	0	0	0
5	Kekeringan	1	0	806	0	0	0	0	0
6	Gempa Bumi	5	0	0	0	0	0	0	0
7	Karhutla	6	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**468**	**2**	**5481**	**153**	**1395**	**4**	**3**	**15**

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB 2025 & BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengalami 468 kejadian bencana dalam kurun 2015-2024. Masing–masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan infrastruktur. Bencana Cuaca Ekstrim merupakan bencana dengan tingkat kejadian paling tinggi dan menimbulkan adanya korban jiwa dan kerusakan pada pemukiman penduduk. Selain Bencana Cuaca Ekstrim, bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, juga terjadi dan menimbulkan dampak korban jiwa dan kerugian materil.

Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana. Secara keseluruhan dari bencana tersebut, Cuaca Ekstrim adalah bencana yang dominan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain, itu Gelombang Ekstrim dan Abrasi memiliki intensitas kejadian yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh wilayah Kepulauan Selayar secara terbuka berhadapan dengan perairan luas Selat Flores. Persentase jumlah kejadian masing-masing bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik berikut:

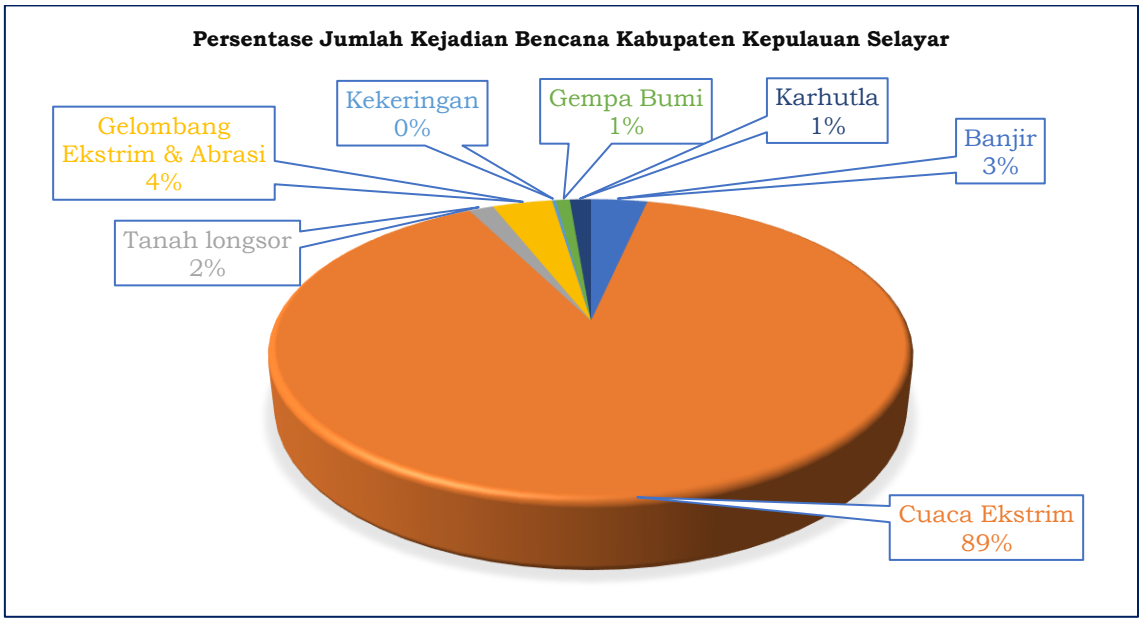

Gambar 6. Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2024 *(Sumber: analisis data, 2025)*

Kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan peningkatan bencana Hidrometeorologi. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 7 (tujuh) jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu tahun 2015 –

2024. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.

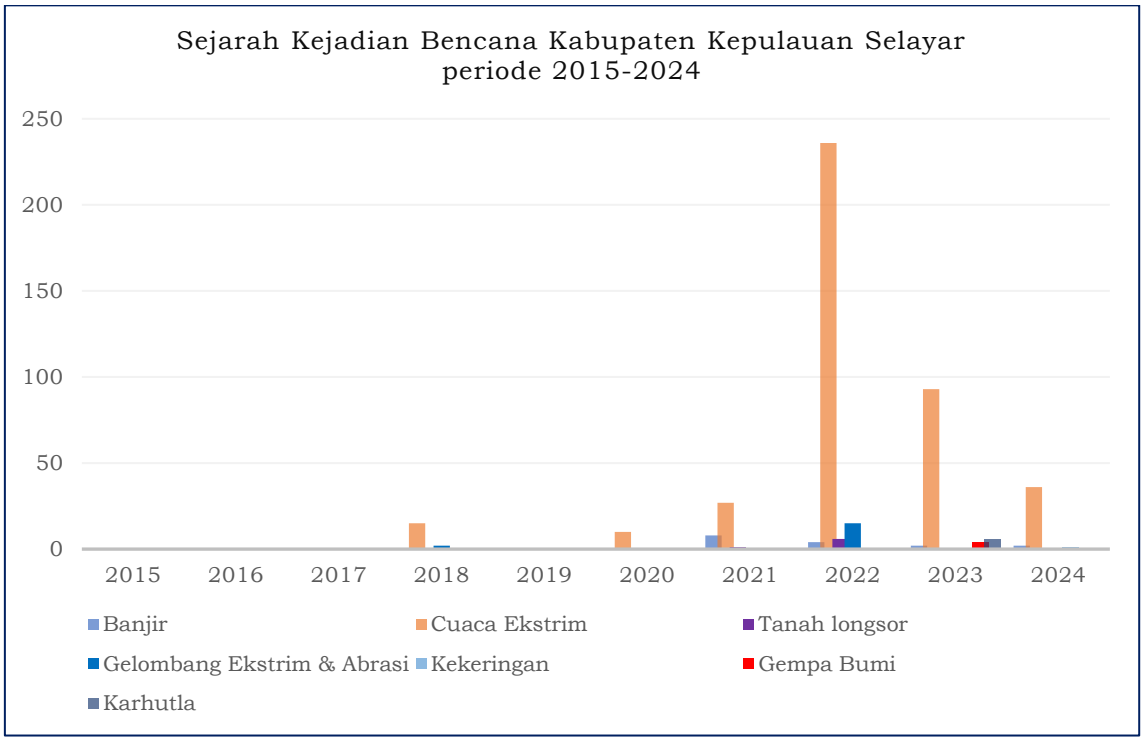

Gambar 7. Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2024

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Selain bencana Hidrometeorologi, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki riwayat kejadian bencana geologi yaitu gempa bumi yang terjadi pada tahun 2021 dan mengguncang wilayah Pasilambena dengan skala MMI II-III. Gempa Bumi ini terjadi setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo M 7,4 yang terjadi di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dimana, wilayah kepulauan Pasilambena merupakan daerah paling selatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berdekatan dengan titik pusat gempa M 7,4.

Wilayah kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi bencana Geologi. Hal ini disebabkan oleh wilayah bagian timur perairan kepulauan selayar terdapat sesar selayar timur (*selayar east*) dan sesar selayar barat (*selayar west*) dengan Panjang 152 dan 167 Km (BMKG). Skenario kejadian gempa bumi yang disusun oleh BMKG menunjukkan potensi guncangan mencapai skala Max 7,2 dan skala VI-VII MMI. Tingkat kerusakan akibat dari dampak kejadian gempa bumi adalah kerusakan sedang pada wilayah Kabupaten kepulauan Selayar.

Gambaran jalur sesar selayar east dan sesar selayar west disajikan pada gambar sebagai berikut.

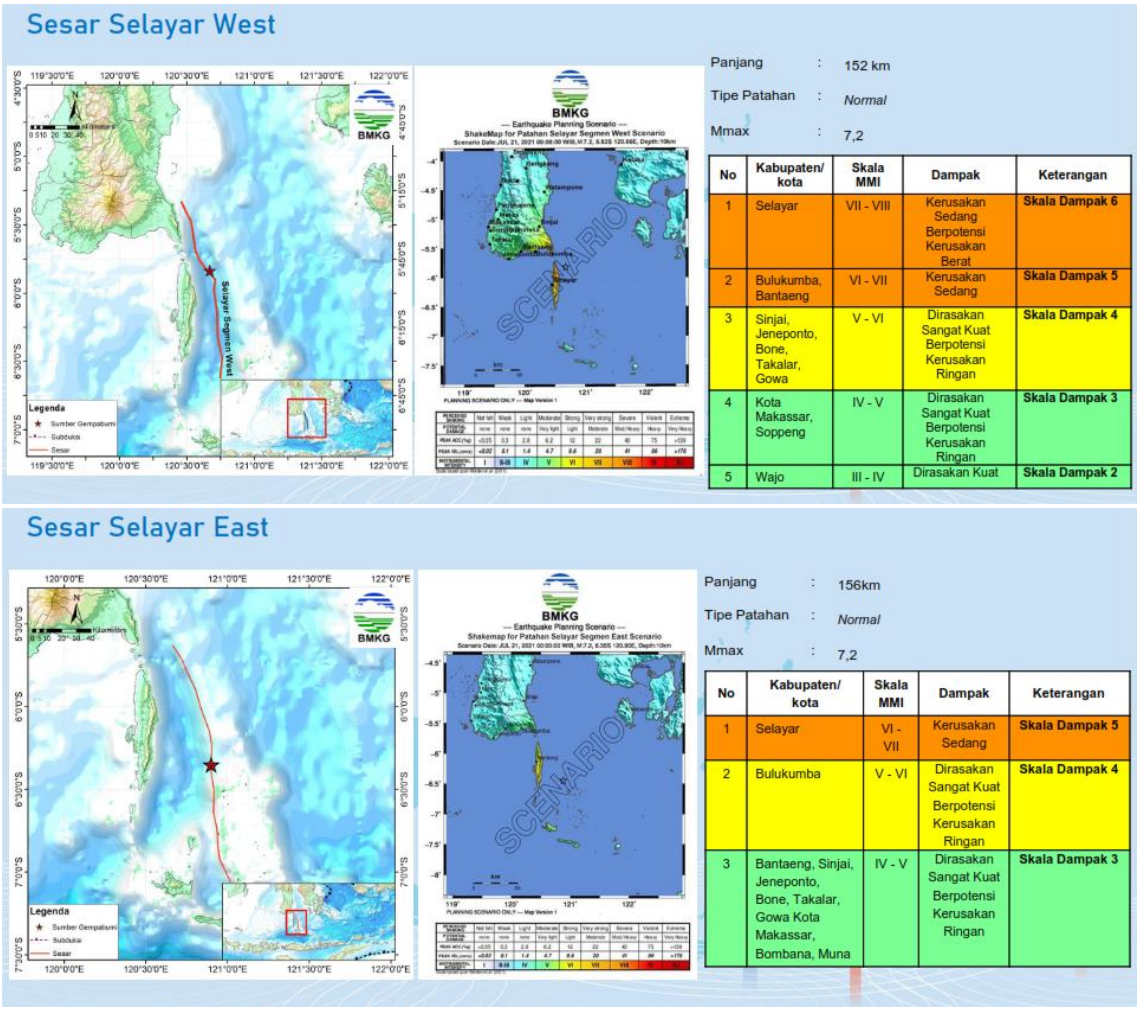

No	Kabupaten/ kota	Skala MMI	Dampak	Keterangan
1	Selayar	VII - VIII	Kerusakan Sedang Berpotensi Kerusakan Berat	Skala Dampak 6
2	Bulukumba, Bantaeng	VI - VII	Kerusakan Sedang	Skala Dampak 5
3	Sinjai, Jeneponto, Bone, Takalar, Gowa	V - VI	Dirasakan Sangat Kuat Berpotensi Kerusakan Ringan	Skala Dampak 4
4	Kota Makassar, Soppeng	IV - V	Dirasakan Sangat Kuat Berpotensi Kerusakan Ringan	Skala Dampak 3
5	Wajo	III - IV	Dirasakan Kuat	Skala Dampak 2

No	Kabupaten/ kota	Skala MMI	Dampak	Keterangan
1	Selayar	VI - VII	Kerusakan Sedang	Skala Dampak 5
2	Bulukumba	V - VI	Dirasakan Sangat Kuat Berpotensi Kerusakan Ringan	Skala Dampak 4
3	Bantaeng, Sinjai, Jeneponto, Bone, Takalar, Gowa Kota Makassar, Bombana, Muna	IV - V	Dirasakan Sangat Kuat Berpotensi Kerusakan Ringan	Skala Dampak 3

Gambar 8. Sesar Selayar east dan Sesar Selayar West yang berpotensi memicu gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar

9. Aspek Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang penanggulangan bencana menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan mengimplementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait

dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Badan perencanaan, pembangunan dan Inovasi daerah (BAPPERIDA).

Penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir di daerah, baik kegiatan yang melekat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun kegiatan yang terkait dengan kebencanaan di OPD lainnya. Kabupaten Kepulauan Selayar melalui BPBD telah melaksanakan penilaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD) pada Desember tahun 2024. Hasil penilaian IKD menunjukkan kapasitas daerah kabupaten Kepulauan Selayar meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini merubah tingkat kapasitas Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebelumnya ***"Rendah"*** menjadi ***"Sedang".*** Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) selanjutnya menjadi data masukan yang digunakan untuk menghitung indeks risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks risiko bencana (IRB) kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No	Indikator kinerja PB	Capaian Tahunan					*Kelas*
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	IRB	155.20	155.20	151.12	142.83	133.58	*Sedang*
2	IKD	-	-	-	0.45	0.45	*Sedang*

Sumber: BPBD & BNPB, 2025

Capaian peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana turut memberikan nilai signifikan pada penurunan indeks risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan IRBI tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Selayar telah berada pada indeks risiko bencana Sedang dan berada pada urutan nomor 15 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai indeks risiko bencana pada tahun 2024 sebesar **133.58** lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 142.83.

B. Risiko Bencana Daerah

1. Indeks Bahaya

Berdasarkan analisis kajian risiko bencana, hasil rekapitulasi seluruh bahaya yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Selayar ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Potensi Bahaya di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Bahaya	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Cuaca Ekstrim	0.86	72045.10	8749.54	80795.49	Tinggi
2	Gelombang Ekstrim & Abrasi Pantai	0	7404.93	5099.31	12504.24	Tinggi
3	Gempa Bumi	105,161.76	8210.16	2455.92	115,827.84	Rendah
4	Tsunami	9.99	56.52	13,517.01	13,583.50	Tinggi
5	Tanah Longsor	35636.85	1332.36	6833.43	43802.64	Rendah
6	Kebakaran Hutan & Lahan	5059.71	109721.79	764.82	115,546	Sedang
7	Banjir	25,125.93	834.21	3,180.33	29,140.47	Rendah
8	Kekeringan	0	53179.74	63200.9	116.380.62	Tinggi

Sumber: KRB Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028

Tabel di atas memperlihatkan nilai indeks masing-masing bencana. Nilai indeks tersebut menentukan tingkat bahaya melalui pengelompokan rendah, sedang, dan tinggi. Bencana yang termasuk tingkat bahaya Rendah adalah Gempa Bumi dan Tanah Longsor. Bencana dengan tingkat bahaya Sedang adalah Kebakaran Hutan dan Lahan. Sementara itu bencana dengan tingkat bahaya Tinggi adalah Banjir, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, serta Tsunami.

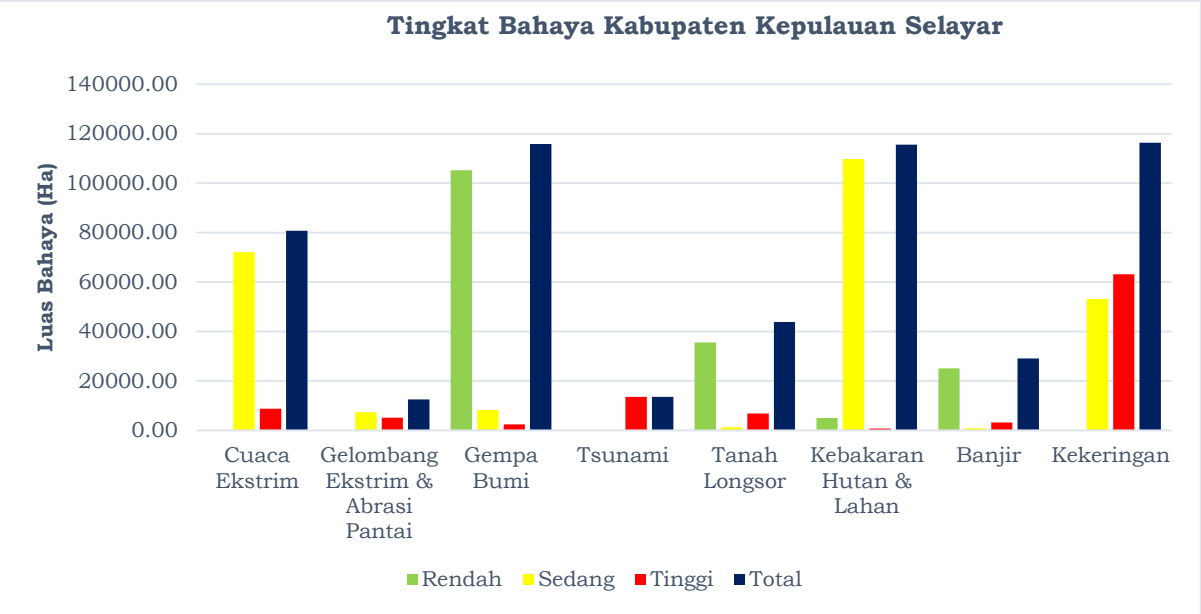

Gambar 9. Grafik tingkat bahaya di Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber: KRB Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028

2. Indeks Kerentanan

Hasil rekapitulasi seluruh potensi kerentanan per jenis bahaya di Kabupaten Kepulauan Selayar ditunjukkan dengan tingkat/kelas kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks komponen kerentanan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Potensi penduduk terpapar bahaya di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Bencana	Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan (Jiwa)			Kelas
			Umur Rentan	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	
1	Cuaca Ekstrim	32954	2791	279	2379	Tinggi
2	Gelombang Ekstrim & Abrasi Pantai	31453	8789	284	2565	Tinggi
3	Gempa Bumi	139145	39058	1159	11159	Tinggi
4	Tsunami	58485	15279	458	4144	Tinggi
5	Tanah Longsor	24690	7488	240	2108	Tinggi
6	Kebakaran Hutan & Lahan	0	0	0	0	0
7	Banjir	27286	7619	221	2202	Rendah
8	Kekeringan	135652	38504	1129	10974	Tinggi

Sumber: KRB Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya berada pada kelas Rendah dan Tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh Gempa bumi dan Kekeringan. Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga.

Tabel 7. Potensi kerugian dan kerusakan lingkungan akibat bahaya di Kabupaten Kep. Selayar

No	Bencana	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1	Cuaca Ekstrim	98711.04	91241.38	189952.41	Tinggi	-	-
2	Gelombang Ekstrim & Abrasi Pantai	203833.86	56368.14	260202.00	Tinggi	64.46085	Tinggi
3	Gempa Bumi	934349.57	90610.18	1024959.75	Tinggi	-	-
4	Tsunami	683684.61	233763.31	917447.92	Tinggi	30.4626	Tinggi
5	Tanah Longsor	105161.97	18794.85	123956.82	Tinggi	42.0817	Sedang
6	Kebakaran Hutan & Lahan	0.00	140327.65	140327.65	Tinggi	3419.224	Tinggi
7	Banjir	119781.60	55787.00	175568.60	Tinggi	1.8418	Tinggi
8	Kekeringan		736724543	736724543	Tinggi	13036.4	Tinggi

Sumber: KRB Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh bencana memiliki kelas kerugian Tinggi dan kelas kerusakan lingkungan Sedang dan Tinggi.

Untuk mengetahui kelas kerentanan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dapat ditelaah melalui kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Kerentanan berbagai jenis bahaya di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Bahaya	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	x	Sedang
2	Gelombang Ekstrim & Abrasi Pantai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	x	Sedang
4	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

No	Bahaya	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
6	Kebakaran Hutan & Lahan	x	Sedang	Sedang	Tinggi
7	Banjir	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: KRB Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa kelas kerentanan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kelas kerentanan sedang dan tinggi. Dari seluruh potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebanyak 6 jenis bencana memiliki kelas kerentanan Tinggi. Bencana yang dimaksud adalah Bencana Banjir, Kekeringan, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Tanah Longsor dan Tsunami. Terdapat 2 (dua) potensi bencana yang termasuk dalam kelas kerentanan Sedang yaitu Bencana Gempa Bumi dan Cuaca Ekstrim.

3. Indeks Risiko Bencana

Tingkat risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar dianalisis berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana, meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kajian Risiko Bencana (KRB) dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. Tingkat Risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Cuaca Ekstrim	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
2.	Gelombang Ekstrim & Abrasi Pantai	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3.	Gempa Bumi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
4.	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
5.	Tanah Longsor	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang

No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Tingkat Risiko
6.	Kebakaran Hutan & Lahan	Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi
7.	Banjir	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi
8.	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
	Kabupaten Selayar	**Tinggi**	**Tinggi**	**Rendah**	**Tinggi**

Sumber: KRB Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028

Tingkat risiko setiap bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat risiko Sedang dan Tinggi. Tingkat risiko sedang untuk jenis bencana Cuaca Ekstrim dan Tanah Longsor. Sementara itu, bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir, dan Kekeringan memiliki tingkat risiko tinggi.

4. Peta Risiko Bencana

Peta risiko bencana merupakan salah satu hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang memberikan gambaran tingkatan risiko yang ditimbulkan oleh bencana di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemetaan risiko tersebut memuat seluruh bencana berpotensi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Peta risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan sebagai berikut:

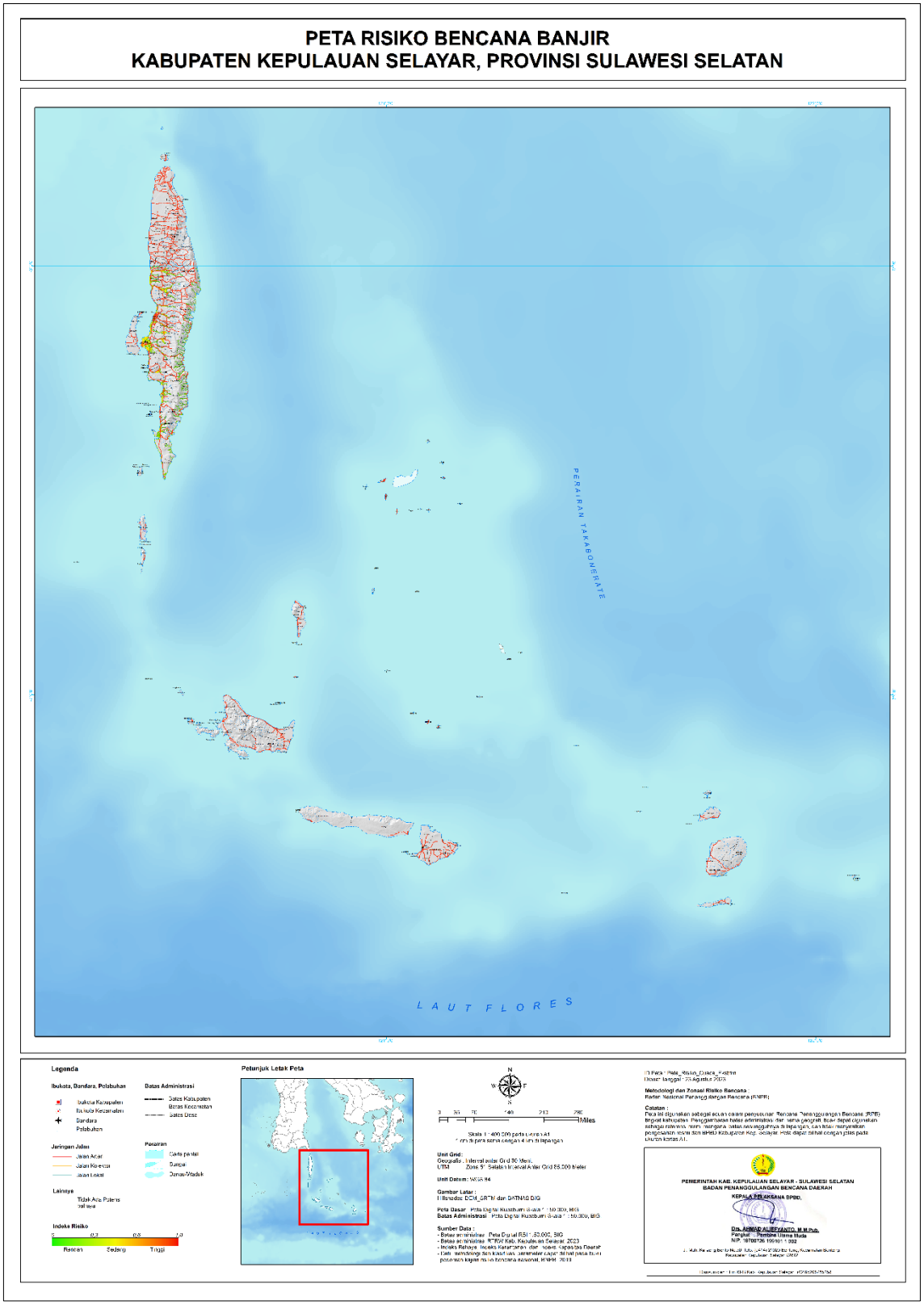

Gambar 10. Peta risiko banjir Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber: KRB Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028

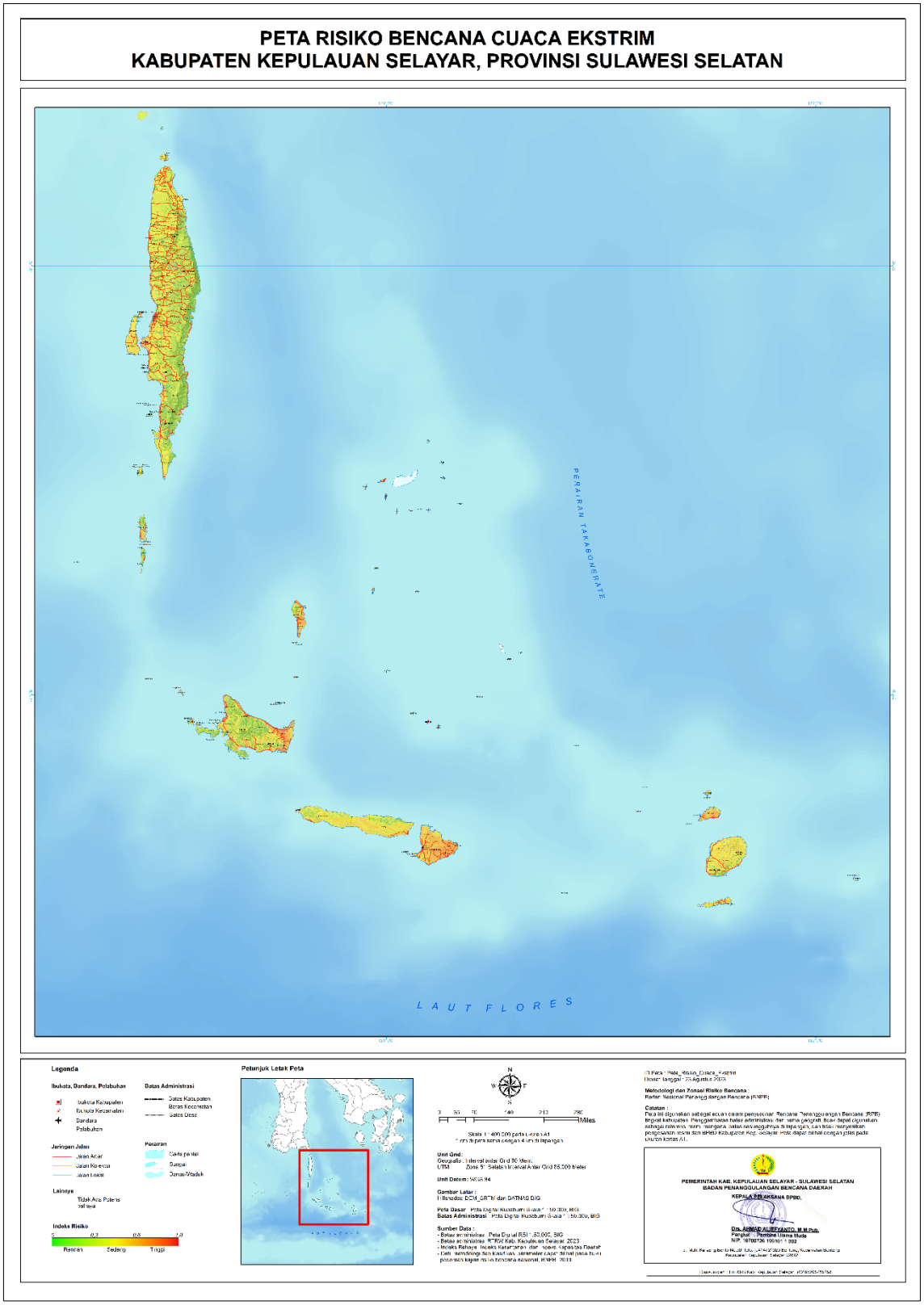

Gambar 11. Peta risiko cuaca ekstrim Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber: KRB Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028

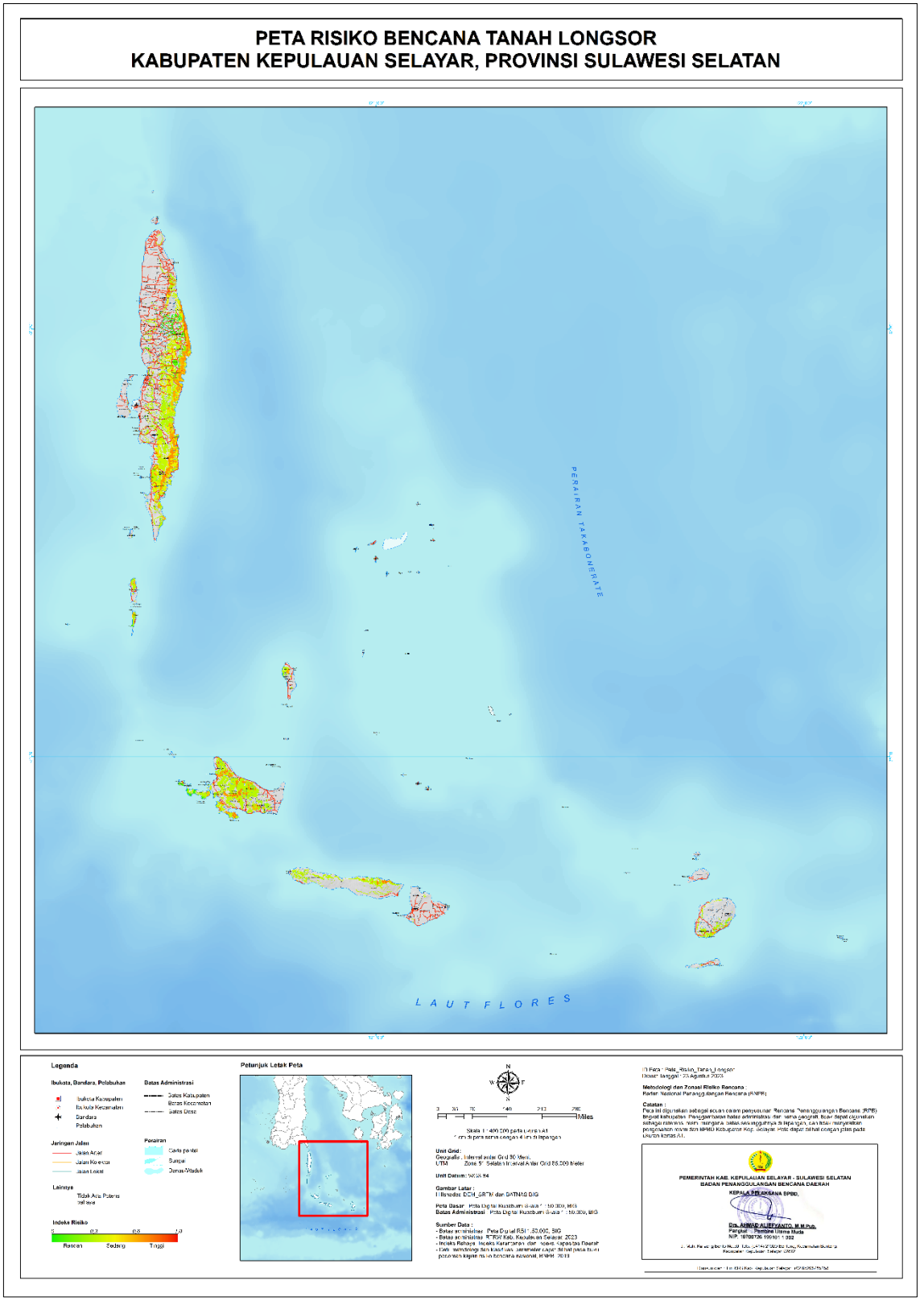

Gambar 12. Peta risiko tanah longsor Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber: KRB Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028

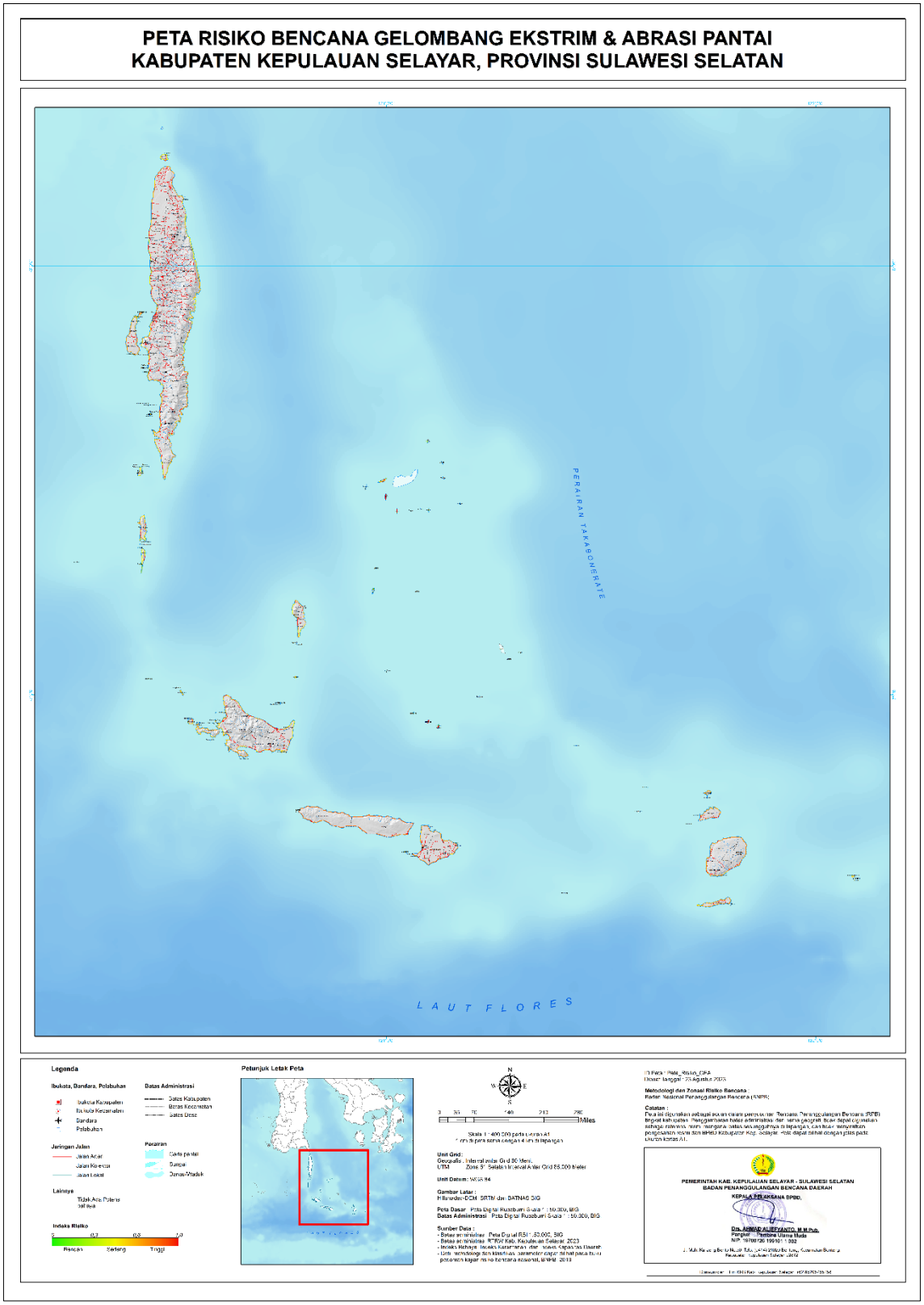

Gambar 13. Peta risiko gelombang ekstrim & abrasi pantai Kab. Kep. Selayar

Sumber: KRB Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028

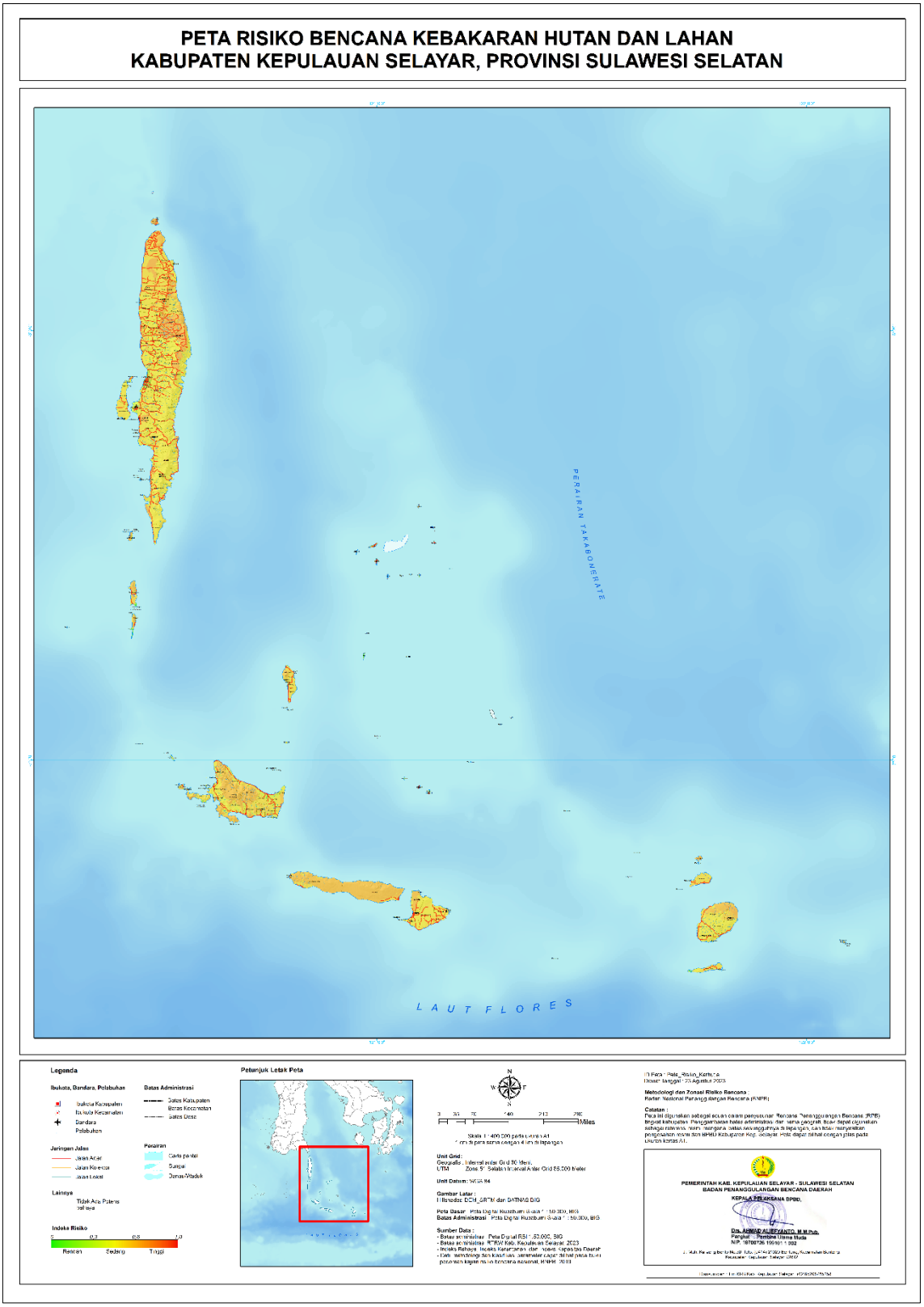

Gambar 14. Peta risiko kebakaran hutan dan lahan Kab. Kepulauan Selayar

Sumber: KRB Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028

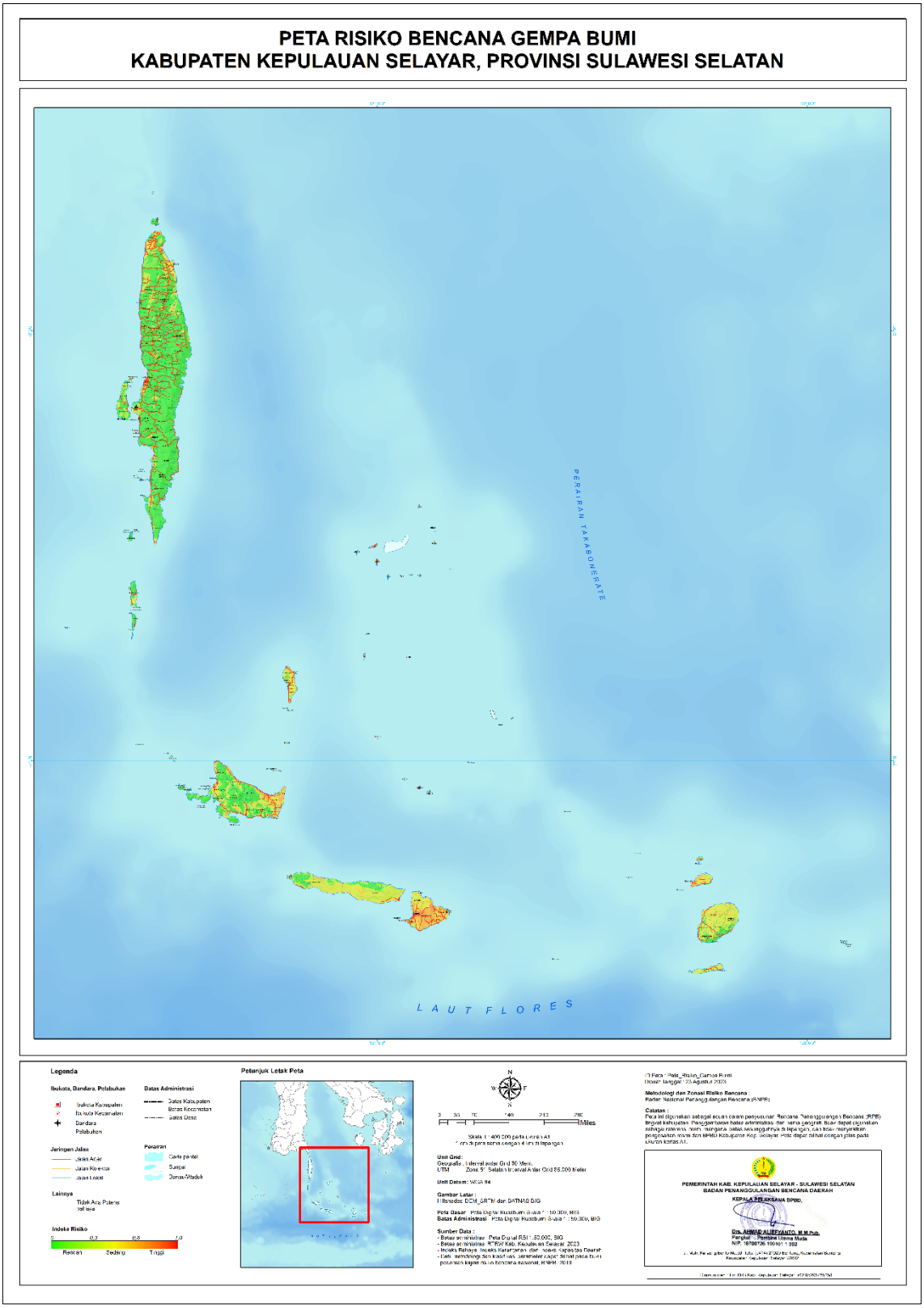

Gambar 15. Peta risiko gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber: KRB Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028

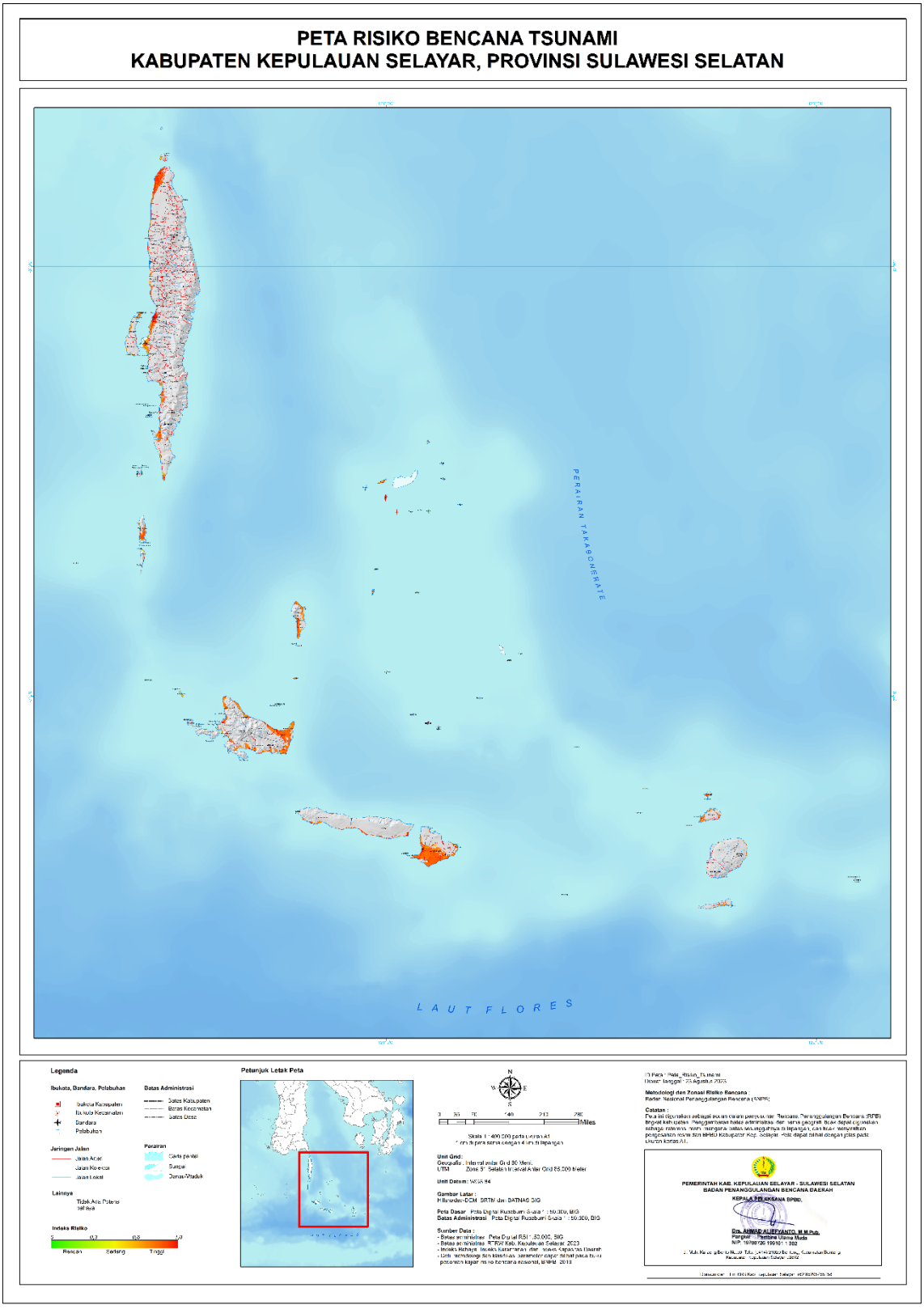

Gambar 16. Peta Risiko tsunami Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber: KRB Kepulauan Selayar Tahun 2023-2028

C. Prioritas Bencana Yang ditangani

Prioritas bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah dan upaya kesiapsiagaan. Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/kegiatan dan mekanisme generik. Proses perumusan prioritas risiko bencana:

a) Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)
b) Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data dalam DIBI BNPB

Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana. Analisa kecenderungan dilakukan dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik. Sebisa mungkin, data kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian, agar bisa diketahui kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut dapat diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD.

Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisa kecenderungan bisa dilakukan berdasarkan data kejadian dalam waktu minimal 100 tahun terakhir. Data kejadian bencana geologis, seperti gempa bumi, gerakan tanah, gunungapi, diambil dari DIBI yang dikelola BNPB atau data dari instansi yang berwenang atau data pemerintah daerah. Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Pengetahuan masyarakat lokal terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir, maka dapat dianalisis prioritas penanganan risiko bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Matriks analisis prioritas risiko bencana yang ditangani di Kabupaten Kepulauan Selayar

RISIKO BENCANA PRIORITAS		TINGKAT RISIKO BENCANA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENINGKAT		*Cuaca Ekstrim*	*Gelombang Ekstrim & Abrasi pantai, Banjir, Kebakaran Hutan & Lahan*
	TETAP		*Tanah longsor, Gempa Bumi*	*Kekeringan, Tsunami*
	MENURUN			

Keterangan:

Bencana Prioritas

Bencana Non-prioritas

Bencana Non-prioritas

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa bencana Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai, Banjir, Tsunami, Kekeringan, dan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah bencana prioritas yang akan ditangani melalui upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat. Sedangkan bencana Tanah longsor dan gempa bumi adalah bencana non-prioritas akan diarahkan pada upaya pencegahan dan mitigasi. Bencana prioritas dan non prioritas dalam perencanaan penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Bencana prioritas yang akan ditangani dalam penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Jenis Bencana	Skala Prioritas	Arah Penanganan
1	Cuaca Ekstrim	Bencana Prioritas	• Pencegahan • Mitigasi • Kesiapsiagaan • Penanganan darurat Bencana
2	Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai	Bencana Prioritas	
3	Banjir	Bencana Prioritas	
4	Kekeringan	Bencana Prioritas	
5	Kebakaran hutan & Lahan	Bencana Prioritas	

6	Tsunami	Bencana Prioritas	
7	Gempa Bumi	Non Prioritas	Pencegahan dan mitigasi
8	Tanah Longsor	Non Prioritas	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

D. Masalah Pokok

Masalah pokok kebencanaan merupakan temuan kesenjangan yang terjadi dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar. Analisis masalah pokok dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen yaitu, (1) Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang mengakibatkan risiko suatu bencana menjadi prioritas, (2) Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan; dan (3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah.

Berdasarkan hasil telaah Dokumen Kajian risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024-2028, Kajian kapasitas Daerah, dan juga RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yang merupakan acuan dalam kegiatan pembangunan daerah maka di dalam dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. **Komponen pertama**; berdasarkan faktor keterpaparan (bahaya) dan kerentanan yang membangun risiko bencana; dari risiko bencana yang menjadi prioritas bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar. Identifikasi untuk komponen pertama untuk masalah keterpaparan bencana prioritas (cuaca ekstrim, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan) di Kabupaten Kepulauan Selayar, tersaji pada tabel sebagai berikut:

   Tabel 12. Identifikasi masalah keterpaparan kajian risiko bencana

Jenis Bencana	Identifikasi Masalah Keterpaparan
Cuaca Ekstrim	1. Perubahan iklim mempengaruhi fenomena anomali atmosfer periodik seperti El Nino dan La Nina yang berdampak pada kemunculan cuaca ekstrim 2. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS) yang dikelilingi lautan dan wilayah pulau-pulau kecil yang dataran 3. Pulau-pulau kecil memiliki vegetasi yang terbatas 4. Pemukiman penduduk pada Kawasan pesisir dengan bentuk rumah semi permanen memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana cuaca ekstrim

	5. Curah hujan tinggi yang disertai angin kencang
Banjir	6. Perubahan iklim memicu peningkatan bencana Hidrometeorologi; 7. Curah hujan yang tinggi dan lamanya hujan; 8. Air laut pasang yang mengakibatkan pembendungan di muara sungai atau naiknya paras muka laut di pantai; 9. Pembendungan aliran sungai akibat longsor dan sedimentasi; 10. Buruknya saluran air/drainase; 11. Penebangan pohon secara liar; 12. Sungai yang tidak terawat; 13. Kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan semakin hari kian menurun; 14. Tingginya Pemukiman penduduk pada daerah aliran sungai (DAS); 15. Pembudidayaan daerah dataran banjir; 16. Peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai; 17. Belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir 18. Sistem drainase yang tidak memadai 19. Terbatasnya tindakan mitigasi banjir baik oleh pemerintah maupun masyarakat 20. Kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai 21. Penggundulan hutan di daerah hulu 22. Terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir dan elevasi bangunan tidak memperhatikan ketinggian banjir.
Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai	23. Perubahan iklim mempengaruhi fenomena anomali atmosfer periodik seperti El Nino dan La Nina yang berdampak pada kemunculan cuaca ekstrim; 24. Kerusakan terumbu karang atau tidak adanya ekosistem terumbu karang mengakibatkan kecepatan gelombang yang menghantam pantai; 25. Morfologi pantai kepulauan selayar yang di dominasi oleh pasir dan lumpur 26. Penebangan mangrove dan vegetasi pantai lainnya 27. Pemukiman atau infrastruktur di sekitar sempadan pantai 28. Letak geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikelilingi oleh lautan 29. Kondisi demografi banyaknya Jumlah penduduk dan kelompok rentan Gelombang ekstrim dan abrasi pantai 30. Sebaran fasilitas umum dan fasilitas kritis berada di daerah rawan bencana Gelombang ekstrim dan abrasi pantai

Kekeringan	31. Perubahan iklim mempengaruhi fenomena anomali atmosfer periodik seperti El Nino dan La Nina yang berdampak pada kemarau panjang dan kekeringan; 32. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS) yang dikelilingi lautan dan wilayah pulau-pulau kecil yang minim vegetasi tidak memiliki sumber air bersih; 33. Kondisi demografi banyaknya Jumlah penduduk dan kelompok rentan kekeringan; 34. Tidak adanya sumber air tanah.
Tsunami	35. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS) yang dikelilingi lautan dan wilayah pulau-pulau kecil yang dataran rendah; 36. Adanya patahan (sesar) pada bagian timur kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Sesar Selayar East dan Selayar West; 37. Tingginya pemukiman penduduk di wilayah pesisir rawan tsunami; 38. Kondisi demografi banyaknya Jumlah penduduk dan kelompok rentan Tsunami; 39. Sebaran fasilitas umum dan fasilitas kritis berada di daerah rawan bencana Tsunami; 40. Rendahnya vegetasi pantai (mangrove) pada pulau-pulau kecil sebagai peredam gelombang tinggi.
Kebakaran Hutan dan Lahan	41. Curah Hujan yang sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi; 42. Pembukaan penyiapan lahan perkebunan dengan pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan dengan baik; 43. Sebaran lahan produktif yang berada di daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Kepulauan Selayar 2024-2028

2. **Komponen Kedua**, berdasarkan kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar; berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana atau Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Adapun identifikasi untuk komponen kedua terkait IKD Kabupaten Kepulauan Selayar, tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Identifikasi masalah Indeks Ketahanan Daerah

Prioritas	Indeks Prioritas	Identifikasi Masalah IKD
Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.47	1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya perlu ditingkatkan;

		2. Belum adanya regulasi dan kelembagaan Forum PRB Kabupaten; 3. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan belum optimal; 4. Pembuatan dan penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana belum optimal; 5. Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah perlu ditingkatkan.
Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.40	6. Pembuatan regulasi untuk kajian risiko bencana belum dilakukan 7. Sosialisasi dan Desiminasi hasil kajian risiko bencana kepada organisasi perangkat daerah, masyarakat dan lembaga terkait termasuk pada sektor pendidikan, kesehatan perlu ditingkatkan; 8. Keterlibatan organisasi non pemerintah perlu ditingkatkan
Pengembangan sistem informasi, Diklat dan Logistik	0.37	9. Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah perlu diperkuat; 10. Perlu Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat; 11. Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga perlu ditingkatkan; 12. Sistem Pendataan Bencana Daerah perlu ditingkatkan; 13. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut perlu ditingkatkan; 14. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah perlu ditingkatkan khususnya untuk wilayah pulau-pulau kecil.
Penanganan tematik Kawasan rawan Bencana	0.48	15. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana perlu ditingkatkan; 16. Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah perlu diperkuat; 17. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah

		dan Madrasah Aman Bencana perlu dicanangkan; 18. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana perlu dicanangkan; 19. Pembangunan Desa Tangguh Bencana perlu ditingkatkan.
Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.36	20. Perlu dilakukan Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air; 21. Perlu dilakukan Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung dan taman kota di daerah berisiko banjir; 22. Perlu dilakukan pembangunan bangunan pemecah ombak untuk perlindungan daerah sempadan pantai
Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan darurat bencana	0.48	23. Perencanaan kontingensi dan sistem peringatan dini untuk bencana prioritas belum disusun; 24. Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana dengan melibatkan berbagai pihak terkait belum disusun; 25. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis perlu ditingkatkan; 26. Kebijakan dan Mekanisme serta koordinasi Perbaikan Darurat Bencana perlu diperkuat; 27. Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana khususnya di pulau-pulau kecil terpencil perlu diperkuat dan ditingkatkan
Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.69	28. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana perlu ditingkatkan 29. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana perlu ditingkatkan 30. Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana perlu diperkuat sesuai dengan kemampuan daerah

Sumber: IKD Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

3. Komponen Ketiga, berdasarkan kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana; isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau kesenjangan pada pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 14. Kesenjangan RPJMD terhadap Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar

Isu Strategis RPJMD	Identifikasi Masalah/Gap terhadap Pembangunan daerah
Lingkungan	1. Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal yang dapat diukur dari pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2022, IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 64,99 yang masih kategori sedang 2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 belum optimal karena masih berada pada kategori kurang dan berada pada peringkat 15 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Belum terkelolanya sampah secara terintegrasi, Kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai tahun 2022 belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 masih berada pada angka 31,83 persen. 4. Belum optimalnya perlindungan keanekaragaman hayati
Penataan Ruang dan Infrastruktur	5. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan teknologi mendukung ketahanan energi, air dan pangan. 6. Belum meratanya akses dan kualitas infrastruktur wilayah antara daratan selayar dan wilayah kepulauan; 7. Belum meratanya cakupan sarana dan prasarana pelayanan publik di pedesaan dan perkotaan
Kebencanaan	8. Indeks Risiko bencana masih berada pada kelas sedang yang sewaktu-waktu dapat meningkat apabila pembangunan tidak mempertimbangkan parameter risiko bencana. 9. Nilai indeks Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana berada pada kelas sedang, masih perlu ditingkatkan

	10. Belum optimalnya diversifikasi pangan untuk menjamin ketersedian dan pemenuhan konsumsi pangan 11. Belum optimalnya kemandirian pangan dan ketahanan air. 12. Belum optimalnya manajemen kebencanaan
Sosial	13. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 14. Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama di pedesaan dan daerah terpencil.

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029

Berdasarkan hasil identifikasi ketiga komponen maka dapat diketahui beberapa akar permasalahan kebencanaan ataupun kesenjangan yang terjadi dalam Upaya penanggulangan bencana di kabupaten Kepulauan Selayar. Permasalahan pokok kebencanaan tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil identifikasi masalah pokok Kebencanaan Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Aspek	Masalah Pokok
1.	Masalah Pokok berdasarkan faktor keterpaparan (bahaya) dan Kerentanan yang membangun risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS)	1. Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan masih rendah 2. Perubahan iklim memicu peningkatan bencana hidrometeorologi 3. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam 4. Tingginya jumlah penduduk yang bermukim pada kawasan rawan bencana
2.	Masalah pokok berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana atau indeks ketahanan daerah (IKD) Kabupaten Kepulauan Selayar	5. Belum optimalnya perkuatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana; 6. Belum optimalnya penanganan tematik kawasan rawan bencana; 7. Belum optimalnya Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 8. Belum optimalnya upaya pemulihan bencana

3.	Masalah pokok berdasarkan kesenjangan/Gap RPJMD terhadap Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar	9. Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan rendahnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim; 10. Meningkatnya ancaman penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan; 11. Belum optimalnya pemerataan pembangunan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Sumber: Analisis tim penyusun, 2025

Dari identifikasi 10 (sepuluh) masalah pokok dengan 3 komponen diatas, apabila terdapat isu yang berdekatan dapat dikelompokkan menjadi satu masalah pokok. Selanjutnya masalah pokok ini akan dirumuskan menjadi isu strategis dalam rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

E. Rumusan Isu Strategis

Pemilihan isu strategis dilakukan berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok. Proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Langkah-langkah perumusan isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Metode Isu Strategis Daerah

Pembobotan terhadap masalah pokok penilaian dengan metode pembobotan atau pemberian skor pada setiap masalah pokok. Penilaian dilakukan berdasarkan bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, dimana nilai bobot 1 menunjukkan **"Sangat Tidak Relevan"** dan nilai bobot 5 menunjukkan **"Sangat Relevan"**. ***1=Sangat Tidak Relevan, 2=Tidak Relevan, 3=Cukup Relevan, 4=Relevan, 5=Sangat Relevan***. 5 (lima) kriteria tersebut adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan.
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen

masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan.

5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

2. Skoring Isu Strategis Penanggulangan Bencana Daerah

Penentuan 5 (lima) masalah pokok sebagai isu strategis berdasarkan peringkat nilai atau akumulasi bobot tertinggi sehingga akan menghasilkan kegiatan/aksi yang optimal dan efektif ditangani dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Skoring isu strategis penanggulangan bencana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 16. Tabel pembobotan isu strategis penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS)

No	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan masih rendah	5	4	4	4	5	22
2	Perubahan iklim meningkatkan ancaman bencana Hidrometeorologi	5	5	4	5	4	23
3	Tingginya jumlah penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana	5	5	4	5	4	23
4	Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya	5	5	4	4	5	23
5	Belum optimalnya perkuatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana	4	4	3	4	4	19
6	Belum optimalnya penanganan tematik kawasan rawan bencana	5	5	4	4	5	23
7	Belum optimalnya Perkuatan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan bencana	5	5	5	5	5	25
8	Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan Rendahnya ketahanan (*resiliensi*) terhadap bencana dan perubahan iklim	5	5	4	5	5	24

9	Meningkatnya ancaman penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	4	4	3	4	5	20
10	Belum optimalnya pemerataan pembangunan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	5	4	3	4	4	20

Sumber: FGD RPB Kabupaten Kepulauan Selayar,2025

Berdasarkan skoring masalah pokok, ditemukan masalah pokok dengan skor tertinggi. Masalah pokok yang memiliki kemiripan akan digabungkan menjadi satu isu strategis. Isu strategis kebencanaan yang akan menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) periode 2025-2029 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. **Isu Strategis 1: Penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam mempengaruhi optimalisasi penanggulangan bencana;**
2. **Isu Strategis 2: Perubahan iklim (*climate* change) memicu peningkatan kerentanan penduduk di kawasan rawan bencana;**
3. **Isu Strategis 3: Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang belum optimal.**

BAB III. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

a) Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 telah menetapkan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana tahun 2020-2044 serta kebijakan dan strategi yang diturunkan ke dalam peta jalan yang memuat fokus capaian dalam periode 5 (lima) tahun. Visi Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 adalah:

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan"

Pencapaian visi Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dijabarkan dalam 3 (tiga) misi penanggulangan bencana yaitu:

a) Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
b) Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
c) Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Tujuan RIPB Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang. Tujuan ini diturunkan ke dalam 5 (lima) sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pasca bencana yang lebih baik dan lebih aman

Kebijakan RIPB Tahun 2020-2024 adalah meliputi:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
6. Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Adapun fokus capaian rencana induk penanggulangan bencana pada periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.

12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.

b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 ditetapkan melalui Undang-Undang nomor 59 tahun 2024, memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Misi ke 5 rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) yaitu:

"Ketahanan Budaya dan Ekologi"

Ketahanan sosial budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan.

Adapun arah (tujuan) pembangunan terkait penanggulangan bencana dan perubahan iklim termuat dalam arah (tujuan) pembangunan ke tujuh belas (IE17). Arah (tujuan) pembangunan ketujuh belas rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) adalah:

"Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim"

Arah (tujuan) pembangunan penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Arah kebijakannya meliputi:

1. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana;
2. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah di setiap tingkatan;
3. Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif

klaster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta (public-private partnerships);

4. pembangunan grey infrastructure (*Sea wall, breakwater, spilway, dll*) dan *Nature-based Solution* (Pembangunan *Green Belt*) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut
5. Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi;
6. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas
7. Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level pendidikan dasar dan menengah
8. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana
9. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (Penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap bencana)
10. Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada Tahapan pertama (2025-2029) berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Pada tahapan pertama ini, ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Adapun Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (RPJMN 2025-2029) adalah:

"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"

untuk mewujudkan visi rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) periode 2025-2029, maka dirancang delapan prioritas nasional

pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan misi presiden atau ASTACITA:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Program penanggulangan bencana dan perubahan iklim masuk dalam ASTACITA 8 yaitu:

”memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”,

Implementasi ASTACITA 8 dijabarkan dalam 2 sasaran sebagai berikut yaitu:

a. Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju
b. Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

d) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Periode 2025-2029

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-PB) Tahun 2025-2029, merumuskan tujuan utama dari upaya penanggulangan bencana di Indonesia yaitu *"Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola Risiko Bencana Untuk Mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan"*. Tujuan RENAS PB Tahun 2025 ini diturunkan ke dalam 4 (empat) sasaran penanggulangan bencana yaitu:

1. Sasaran 1: Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
2. Sasaran 2: Mengurangi dampak kerusakan dan kerugian bencana melalui peningkatan efektivitas upaya pencegahan, mitigasi bencana dan ketahanan iklim.
3. Sasaran 3: Meningkatkan daya lenting di daerah terdampak melalui peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Sasaran 4: Meningkatkan pelayanan dan kapasitas penanggulangan bencana melalui transformasi tata kelola dan kolaborasi multi-pihak.

Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam RENAS PB Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan arah kebijakan RIPB Tahun 2020-2044, fokus capaian RIPB di tahun 2025-2029 serta kebijakan dan pentahapan pertama arah (tujuan) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode 2025-2029 yang didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Arah Kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah pulau Sulawesi tahun 2025-2029 secara umum diarahkan pada:

a. Pengembangan pendidikan aman bencana;
b. Pemberdayaan masyarakat/ peningkatan ketangguhan berbasis komunitas;
c. Peningkatan layanan pemerintah dalam mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
d. Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik berketahanan bencana;
e. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim;
f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang kebencanaan; dan
g. Pembangunan gudang logistik regional dan pengembangan klaster logistik.

Secara khusus, penanggulangan bencana di Wilayah Sulawesi diarahkan pada:

a) Pembangunan infrastruktur tahan bencana;

b) Pemanfaatan dan penguatan teknologi kebencanaan; dan
c) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan diseminasi peringatan dini serta evakuasi bencana gempa bumi, tsunami, likuifaksi, tanah longsor.

B. Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan

1. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan

Upaya penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Pada Bab II Asas dan Tujuan pada pasal 3 tentang tujuan penanggulangan bencana, menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
c) Menghargai budaya lokal;
d) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
e) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
f) Menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya pada Bab III terkait Tanggung Jawab dan Kewenangan pada pasal 4 poin (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota masing-masing menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya Visi dan Misi kepala daerah. Muatan RPD tahun 2024-2026 adalah bagian upaya untuk mewujudkan Visi RPJPD Sulawesi selatan yaitu ***"Sulawesi Selatan menjadi provinsi terkemuka di Indonesia dengan pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan"***.

4 (empat) tujuan yang menjadi acuan prioritas pembangunan pada tahun 2024-2026 yaitu:

1. Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Tujuan ini dijabarkan kedalam dua sasaran strategis sebagai berikut:
   a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
   b. Optimalnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Tujuan ini dijabarkan dalam sasaran strategis yaitu: meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah. Pencapaian sasaran strategis tersebut melalui peningkatan kinerja kemantapan jalan, cakupan irigasi kondisi baik, ketersediaan pelabuhan penumpang, akses air minum layak, akses sanitasi layak, dan rasio elektrifikasi desa.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tujuan ini dijabarkan kedalam sasaran strategis sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja
   b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas
   c. Menurunkan angka kemiskinan
   d. Meningkatnya kualitas SDM yang kompetitif dan inklusif
   e. Meningkatnya kualitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tujuan ini dijabarkan pada sasaran strategis terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

C. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penanggulangan Bencana

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berkomitmen untuk memenuhi standar pelayanan dalam bidang penanggulangan bencana. Pelayanan penanggulangan bencana telah tertuang ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dimana pada Bab III Asas, Prinsip, dan Tujuan pada Pasal 5 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan/atau dampak bencana;
b. menyelaraskan peraturan perundang–undangan yang sudah ada;

c. menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana;
d. menghargai budaya lokal dan kearifan lokal;
e. membangun kemitraan;
f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana termuat dalam pasal 8 meliputi:

a. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan;
b. penanggulangan Bencana;
c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan Bencana dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana di Daerah;
e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah; dan
f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan Bencana yang berbentuk uang dan/atau barang.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2045

Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2045 ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 05 Tahun 2024. Pembangunan 20 tahun kabupaten kepulauan selayar difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.hal ini didasarkan pada kunci pokok pembangunan kedepan adalah membangun manusia yang berdaya saing, peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas hidup dan kualitas lingkungan hidup menuju kepulauan Selayar yang mapan, mandiri Maju dan berkelanjutan serta mewujudkan indonesia emas di tahun 2045. Visi RPJPD kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2045 adalah:

”Kepulauan Selayar Mapan, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”

Adapun Sasaran Visi RPJPD kabupaten Kepulauan Selayar:

1. Peningkatan pendapatan per kapita
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
3. Peningkatan daya saing daerah
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
5. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)

Terkait Penanggulangan bencana merupakan rencana yang termuat dalam misi ke 7 RPJP kabupaten Kepulauan Selayar. Misi ke 7 RPJPD Kabupaten Kepulauan selayar adalah:

”Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan,”

untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pemukiman yang mengurangi laju pemanasan global dan meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim serta peningkatan komitmen pembangunan rendah karbon.

Arah kebijakan daerah periode 2025-2029 yaitu:

Penataan dan penguatan landasan transformasi , diarahkan untuk menata kembali dan membangun kabupaten kepulauan Selayar beberapa indikator sasaran diantaranya terkait dengan penanggulangan bencana dan perubahan iklim yaitu terwujudnya sasaran penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dilihat dari capaian persentase penurunan intensitas GRK Tahunan sebesar 41,27 persen dan indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 72,32 (Baik).

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2025-2029

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah merupakan salah satu kabupaten yang rentan terhadap berbagai bencana alam. Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah disusun dengan mempertimbangkan aspek penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sesuai dengan hal tersebut, isu penanggulangan bencana termasuk dalam komponen visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 adalah: “**Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera**”

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan adaptif,
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Meningkatkan pengelolaan perekonomian daerah
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya pedesaan
5. Meningkatkan proporsi pembangunan infrastruktur wilayah
6. Meningkatkan pembinaan sosial, budaya, dan agama
7. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan

Kebijakan penanggulangan bencana di kabupaten Kepulauan Selayar masuk dalam misi nomor 7 tentang ”***Pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan”***.

D. Kerangka Kerja Pra bencana

Kerangka kerja penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada tahap pra bencana, kerangka kerja dapat dilakukan dengan peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana pada daerah prioritas. Pencegahan dan mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalang partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana perlu dilakukan dengan melibatkan institusi pendidikan formal maupun non formal, pemaduan kerja sama sektor dalam penanggulangan bencana dan penyusunan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara partisipatif dan terbuka serta mudah diperbaharui berdasarkan kondisi lokal yang ada.

Kerangka pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Kerangka kerja pra bencana lebih

merupakan upaya pengurangan risiko bencana. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana adalah partisipasi multi pihak, keadilan, kesetaraan, profesionalisme, kemandirian, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, tepat sasaran/efektif, dan berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Pilihan tindakan dalam pra bencana, yaitu:

a) Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
b) Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
c) Pengalihan risiko merupakan serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu.
d) Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Dalam tahapan penanggulangan bencana diperlukan identifikasi mandat dan peran BPBD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam urusan penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Mandat dan urusan BPBD dan OPD urusan penanggulangan bencana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Mandat BPBD dalam Urusan Penanggulangan Bencana

Peran	Mandat BPBD		
	Pra Bencana	**Saat Bencana**	**Pasca Bencana**
Komando		1. Mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasimenjadi Pos Komando. 2. Memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi: a. Penyelamatan; b. Pengerahan sumber dayamanusia; c. Pengerahan peralatan; dan d. Pengerahan logistik. 3. Mengendalikan para pejabat yang berwenang mewakili instansi/lembaga.	
Koordinasi	1. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana 2. Penyusunan perencanaan Penanggulangan bencana 3. Pengurangan risiko bencana; 4. Pembuatan peta rawan bencana; 5. Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasipenanggulangan bencana. 6. Penyusunan Rencanapenanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi denganpenyusunan rencana kontingensi	1. Penentuan standar kebutuhan minimum; 2. Penyusunan anggaranpenanggulangan bencana; 3. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana; 4. Penyediaan sumberdaya/logistik penanggulanganbencana; 5. mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat menyelamatkan dan melindungi masyarakat	Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi),meliputi: Pemulihan pemukiman, pemulihan fisik dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan budaya, dan pemulihan lintas sektor.
Implementasi	1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi,yaitu:	1. Penyelenggaraan penanggulangan	1. Penyusunan Kajian

(pelaksanaan)	perencanaan danpelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; 2. Pengaturan pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; 3. Penyelenggaraan pendidikan,pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern. 4. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu: • Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangankedaruratan bencana; • Pengorganisasian, pemasangan,dan pengujian sistem peringatan dini; • Penyediaan dan penyiapanbarang pasokan pemenuhankebutuhan dasar; • Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat; • Penyiapan lokasi evakuasi; • Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan • penyediaan dan penyiapan bahan,barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihanprasarana dan sarana 5. Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu: • Mengamati gejala bencana; • Menganalisis data hasilpengamatan; • Mengambil keputusanberdasarkan hasil analisa; • Menyebarluaskan hasilkeputusan; dan • Mengambil tindakan oleh masyarakat.	bencana padasaat tanggap darurat, meliputi: a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dansumber daya; b. Penentuan status keadaandarurat bencana; c. Penyelamatan dan evakuasimasyarakat terkena bencana; d. Pemenuhan kebutuhan dasar; e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital	kebutuhan pasca bencana 2. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; 3. Pengurangan risiko bencana; 4. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana; 5. Penyediaan sumber daya/logistik penanggulanganbencana; 6. Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana. 7. Pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada pemulihanlintas sektor.

Tabel 18. Mandat BPBD/OPD dalam Urusan Penanggulangan Bencana

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah **(BAPPERIDA)**	1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan 2. Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana 3. *Updating* data kependudukan, fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta infrastruktur 4. Perencanaan kebijakan tata ruang kawasan rawan bencana 5. Akselerasi program dan kegiatan OPD 6. Penelitian bidang penanggulangan bencana 7. Memfasilitasi kajian risiko bencana dan pemetaan wilayah rawan dalam perencanaan sektoral 8. Mengembangkan sistem informasi spasial berbasis risiko untuk pengambilan keputusan pembangunan 9. Menyusun kebijakan alokasi anggaran yang berpihak pada pengurangan risiko bencana	1. Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Operasi tanggap darurat	1. Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Review perencanaan pembangunan Pemantauan pelaksanaanrehabilitasi dan rekonstruksi 3. Perencanaan Kegiatan dan Penganggaran Penanggulangan Bencana

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **(KESBANGPOL)**	1. Melakukan deteksi dini potensi konflik sosial di daerah rawan bencana 2. Mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan sosial dalam pembinaan masyarakat rentan bencana 3. Menjalin koordinasi dengan ormas, tokoh masyarakat, dan keagamaan dalam edukasi kebencanaan 4. Mendorong pemahaman terhadap keragaman sosial budaya dalam PRB untuk mencegah konflik saat penanganan bencana	1. Monitoring potensi konflik sosial di lokasi pengungsian atau daerah terdampak. 2. Menjadi penghubung dengan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban umum.	1. Memfasilitasi resolusi konflik dan rekonsiliasi sosial pasca peristiwa bencana. 2. Mendorong keterlibatan tokoh masyarakat dalam pemulihan sosial dan kepercayaan publik
3. Badan Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	1. Melakukan kajian-kajian kebencanaan 2. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi mitigasi bencana dan sistem peringatan dini	1. Melakukan analisis dampak sektoral untuk mendukung pengambilan keputusan tanggap darurat	1. Mendukung upaya penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 2. Penelitian dan pengembangan ekonomi masyarakat terdampak bencana
4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah **(BPKPD)**	1. Pemeliharaan aset daerah 2. Tata laksana asuransi aset daerah 3. Dukungan pendanaan terhadap penanggulangan bencana dan tanggap darurat bencana	1. Dukungan pendanaan penanganan darurat bencana 2. Dukungan pendanaan penanganan darurat bencana 3. Dukungan pendanaan penanganan darurat bencana	1. Pendanaan kegiatan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 2. Pelaporan kegiatan

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	1. Memfasilitasi Penyusunan KRB dan RPB Desa-Kecamatan 2. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Forum PRB 3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan bencana (RPKB) 4. Penyusunan Rencana Kontingensi per jenis ancaman bencana (Renkon) 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB 6. Melakukan penelitian/riset kebencanaan 7. Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang berisiko tinggi 8. Pembangunan sistem informasi penanggulangan bencana 9. Penyusunan dan sosialisasi peraturan daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana 10. Pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) 11. Pembuatan jalur evakuasi, pemasangan rambu evakuasi, dan barak pengungsian 12. Pendidikan dan pelatihan PB bagi aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha 13. Penyusunan prosedur tetap	1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana 2. Pemantauan informasi kebencanaan 3. Penyebarluasan peringatan dini 4. Penyiapan peralatan dan logistik 5. Penyiapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian 6. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat 7. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan 8. Analisis lingkup bencana, jumlah korban, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan 9. Penetapan status darurat bencana 10. Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat 11. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 12. Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman	1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 2. Pemulihan sosial dan ekonomi 3. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi 4. Peningkatan sosial dan ekonomi 5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur tentang pengelolaan risiko bencana

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	penanggulangan bencana 14. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat (TRC) 15. Pengorganisasian relawan pencegahan bencana 16. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana 17. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat 18. Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 19. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana 20. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana 21. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) PB 22. Uji coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB); 23. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini 24. Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan 25. Penyusunan mekanisme dan	13. Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar penyintas 14. Penilaian kebutuhan pasca bencana 15. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	SOP peringatan dini 26. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini 27. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana (EWS)		
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **(DUKCAPIL)**	1. Penyiapan data kependudukan dan kelompok rentan 2. Peningkatan kapasitas personil untuk pelayanan dalam situasi bencana 3. Peningkatan kapasitas pegawai untuk kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	1. Pengurusan administrasi kependudukan korban bencana 2. Update data kependudukan korban bencana termasuk pengungsi	1. Melakukan pelayanan rekam ulang dan pencetakan dokumen kependudukan di lokasi terdampak. 2. Memfasilitasi pengembalian identitas sipil bagi masyarakat yang direlokasi
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan **(DISPUSIP)**	1. Penyiapan bahan bacaan bagi korban bencana 2. Penyediaan perpustakaan keliling dan pendidikan kebencanaan pada masyarakat 3. Mengedukasi masyarakat melalui literasi kebencanaan di perpustakaan umum dan sekolah. 4. Menyediakan dan mendistribusikan materi bacaan tentang PRB dan kesiapsiagaan.	1. Melaksanakan psikososial bagi anak-anak korban bencana 2. Pembagian dukungan pemulihan korban bencana khususnya anak-anak	1. Pendampingan korban bencana trauma

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	5. Melakukan digitalisasi arsip penting OPD dan pemerintah desa sebagai langkah mitigasi.		
8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan **(SATPOL PP DAMKAR)**	1. Pelatihan siaga bencana bagi personil Satpol PP 2. Penegakan regulasi yang berkaitan dengan mitigasi bencana pada kawasan pemukiman 3. Sosialisasi bencana kepada masyarakat 4. Penegakan perda RTRW 5. Pelatihan pengembangan skill Masyarakat dalam pemadaman mandiri 6. Penyediaan alat pemadam kebakaran pada kawasan rawan kebakaran 7. Pemasangan rambu-rambu bahaya kebakaran hutan dan lahan	1. Evakuasi dan penyelamatan korban bencana 2. Pengawasan dan penjagaan keamanan kawasan bencana 3. Penanganan kebakaran hutan dan lahan serta pemukiman	1. Pemulihan dan identifikasi kebakaran hutan lahan serta pemukiman 2. Pendampingan masyarakat korban bencana
9. Dinas Kesehatan **(DINKES)**	1. Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan 2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana 3. Pencegahan dan pengendalian wabahpenyakit	1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa/KLB 3. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar 4. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk	1. Perbaikan pusat layanan kesehatan 2. Pembangunan pusat layanan kesehatan 3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 5. Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana 6. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana. 7. Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 8. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 9. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana. 10. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12. Fasilitasi pencanangan rumah sakit/Puskesmas Aman Bencana	terdampak kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana 5. Pemulihan psikososial dasar	
10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian **(DISKOMINFO SP)**	1. Memasang dan memelihara peralatankomunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana 2. Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya 3. Sosialisasi kegiatan penanggulangan bencana pada	1. Penyiapan peralatan komunikasi 2. Perbaikan jaringan telekomunikasi	1. Mempublikasikan informasi pemulihan dan bantuan secara transparan kepada publik. 2. Mengelola sistem pelaporan publik berbasis

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	sistem informasi daerah 4. Penyebarluasan informasi peringatan dini (EWS) bencana kepada masyarakat		digital terkait kondisi pasca-bencana.
11. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah **(DISDAGKOP UKM)**	1. Penyusunan pedoman rencana keberlanjutan usaha (*business continuity plan*) pada industri dan UKM	1. Pemulihan fungsi fasilitas ekonomi, pasar dan perdagangan 2. Bantuan permodalan dan pendampingan terhadap UKM terdampak bencana	1. Pendampingan pemulihan usaha kecil menengah yang terdampak bencana
12. Dinas Lingkungan Hidup **(DLH)**	1. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair, dan limbah rumah tangga 2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL,DPL, SPPL) 3. Pengkajian dampak air dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan 4. Pengendalian tata ruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 5. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan	1. Kesiapan personil dan peralatan 2. Dukungan pemadaman karhutla 3. Pengelolaan sampah, limbah saat terjadi bencana 4. Pendistribusian air bersih pada Kawasan pengungsian	1. Melakukan pemulihan kualitas lingkungan dan rehabilitasi ekosistem terdampak 2. Mendorong pembangunan kembali dengan pendekatan *eco-resilience* (ketahanan berbasis lingkungan).

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	represif dan preventif 6. Pengendalian Pencemaran udara 7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketangguhan iklim 8. Implementasi kebijakan yang adaptif dan mitigatif dalam pengelolaan hutan dan lahan 9. pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 10. Rehabilitasi di kawasan/lahan kritis 11. Konservasi keanekaragaman hayati, hutan, dan wilayah pesisir 12. Pengembangan dan pengelolaan rehabilitasi konservasi danau, sungaidan Sumber daya air lainnya 13. Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan 14. Pemulihan fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan 15. Penyuluhan, monitoring dan pelaporan aksi mitigasi dan adaptasi GRK		
13. Dinas Pariwisata dan	1. Menginventarisasi objek dan tujuan wisata di daerah rawan	1. Pelibatan organisasi kepemudaan dalam kegiatan	1. Perbaikan infrastruktur pariwisata

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
Kebudayaan **(DISBUDPAR)**	bencana 2. Menerapkan pariwisata tangguh bencana 3. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata 4. Memasang denah dan rambu evakuasi	tanggap darurat bencana 2. Pendataan dampak kerusakan dan kerugian bencana pada tempat wisata	2. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3. Perbaikan layanan destinasi wisata
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang **(DPUTR)**	1. Pembangunan instalasi penyediaan air bersih 2. Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya banjir, longsor dan abrasi 3. Pemasangan/pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir 4. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana 5. Pengendalian dan pembangunan infrastruktur mitigasi banjir, longsor, gelombang ekstrim dan abrasi. 6. Menyiapkan lokasi dan jalur evakuasi 7. Menyiapkan alat berat	1. Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat bencana 2. Penyiapan tempat pengungsian sementara 3. Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana 4. Penyediaan tempat pengungsian 5. Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya	1. Perbaikan lingkungan daerah bencana 2. Perbaikan sarana dan prasarana umum 3. Pembangunan hunian sementara 4. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi 5. Pembangunan sarana pelayanan publik yang terdampak bencana
15. Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman **(TARKIM)**	1. Pendataan, pemantauan pemukiman pada kawasan rawan bencana 2. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunanaman	1. Pembangunan hunian sementara 2. Penyediaan tempat pengungsian 3. Penanganan korban bencana	1. Rehabilitasi rumah warga terdampak bencana 2. Pembangunan hunian tetap 3. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	3. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana 4. Pemasangan rambu-rambu bencana lokasi jalur evakuasi pada kawasan pemukiman		dan tahan bencana 4. Relokasi rumah masyarakat terdampak bencana
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana **(DP3APPKB)**	1. Pendataan penduduk pada kawasan rawan bencana 2. Pendataan kelompok rentan (anak, ibu hamil, lansia, dll) pada kawasan rawan bencana 3. Sosialisasi kebencanaan kepada penduduk pada program keluarga berencana	1. Mengelola ruang ramah perempuan dan anak di pengungsian. 2. Menyediakan dukungan psikososial awal bagi korban bencana dari kelompok rentan. 3. Melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak perempuan dan anak, mencegah eksploitasi dan kekerasan. 4. Memastikan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan layanan KB darurat.	1. Menyelenggarakan program pemulihan psikososial berbasis keluarga dan komunitas. 2. Mendorong pemulihan peran sosial ekonomi perempuan terdampak. 3. Mengawal pemenuhan hak-hak anak dan perempuan dalam program rekonstruksi dan relokasi.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa **(DPMD)**	1. Pengelolaan risiko bencana berbasiskeluarga/keluarga tangguh bencana. 2. Penguatan kegiatan mitigasi bencana pada desa-desa yang berada pada kawasan rawan bencana	1. Perlindungan bagi kelompok rentan padasaat evakuasi 2. Pemenuhan kebutuhan bagi kelompok rentan di tempat pengungsian 3. Perlindungan bagi kelompok	1. Pemulihan sosial,ekonomi, 2. Peningkatan kondisisosial, ekonomi, dan budaya

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	3. Pendampingan desa dalam program penanggulangan bencana dari alokasi dana desa 4. Pendataan desa-desa pada daerah rawan bencana	rentan dari kekerasan fisik, kekerasanberbasis gender. 4. Perlindungan bagikelompok rentan	
18. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu **(DPMPTSP)**	1. Memasukkan kajian risiko bencana sebagai persyaratan dalam proses perizinan pembangunan 2. Mendorong investasi pada usaha yang berwawasan kebencanaan (*resilient investment*) 3. Menyusun kebijakan insentif bagi usaha yang menerapkan mitigasi bencana	1. Pelayanan dasar pemerintahan pada situasi darurat bencana	1. Mendukung pemulihan iklim investasi pasca bencana. 2. Menyederhanakan layanan perizinan ulang bagi pelaku usaha yang ingin membangun kembali usahanya di lokasi baru
19. Dinas Pendidikan **(DISDIK)**	1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana 2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana 3. Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dalam kurikulum pendidikan 4. Sosialisasi Sadar Bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan 5. Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 6. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah 7. Mengidentifikasi dan	1. Penyiapan pendidikan darurat 2. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana 3. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana 4. Memberikan bantuan alat tulis siswa, seragam 5. Penyelenggaraan layanan psikososial anak 6. Penyelenggaraan Pendidikan di masa darurat 7. Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat	1. Pelayanan pendidikan darurat 2. Perbaikan sekolah 3. Pembangunan fasilitas layanan pendidikan 4. Perbaikan tata kelola pendidikan 5. Pendataan dampak kerusakan dan kerugian pada fasilitas pendidikan

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung 8. Pemasangan rambu-rambu lokasi dan Jalur Evakuasi bencana 9. Penyebaran KIE Kebencanaan di sekolah		
20. Dinas Perhubungan (DISHUB)	1. Sosialisasi daerah rawan bencana pada jalan dan jalur perhubungan darat dan Laut 2. Pemasangan rambu-rambu bahaya pada alur transportasi darat dan laut	1. Penyiapan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik 2. Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu 3. Menyediakan sarana kendaraan	1. Pemulihan pelayanan transportasi umum 2. Perbaikan pelayanan transportasi umum
21. Dinas Perikanan (DISPER)	1. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan pesisir 2. Menyusun renstra mitigasi kawasan pesisir 3. Menyusun zonasi kawasan pesisir 4. Menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan pesisir 5. Rehabilitasi kawasan pesisir/ penanaman tanaman pantai (mangrove) 6. Pembangunan pusat informasi kebencanaan wilayah pesisir 7. Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir	1. Kaji cepat dampak kerusakan dan kerugian bencana pada sektor perikanan	1. Pemulihan infrastruktur, Sosial, ekonomi, 2. Pembangunan kembali sarana dan prasarana

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	8. Penyebaran informasi potensi bahaya/bencana		
22. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan **(DPKP)**	1. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana 2. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana 3. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan 4. Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggung jawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan 5. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan 6. Menyiapkan Cadangan pangan daerah	1. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk terdampak pada lokasi pengungsian 2. Pendataan lahan pertanian, perkebunan terdampak bencana 3. Distribusi bahan pangan pada penduduk terdampak	1. Pemulihan mata pencaharian penduduk khususnya petani 2. Dukungan bibit pertanian 3. Pendataan dampak bencana pada sektor pertanian dan perkebunan
23. Dinas Sosial **(DINSOS)**	1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar meliputi: a. Logistik: Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, family kit, kidware, dll b. Peralatan Evakuasi/Shelter Kit:Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda	1. Menyiapkan barak pengungsian (shelter) 2. Menyiapkan logistik dan dapur umum 3. Mengelola barak penampungan (shelter) 4. Mengelola logistik dan dapur umum	1. Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak 2. Pemberian bantuan sosial 3. Layanan jaminan sosial 4. Pembangunan sarana sosial masyarakat 5. Peningkatan kegiatan sosial

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	pengungsi, tenda pleton, Veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tendakomando, genset. 2. Penyusunan Pedoman SOP standar *buffer stock*/cadangan logistik kebutuhan dasar. 3. Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial. 4. Pembinaan dan penyegaran TAGANA (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga). 5. Pendataan keluarga penerima jaminan sosial dan bantuan sosial 6. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum 7. Fasilitasi kebutuhan evakuasi. 8. Peningkatan kapasitas masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana (program kampung siaga bencana)	5. Pemulihan awal psikososial penyintas 6. Mengelola bantuan 7. Pemenuhan kebutuhan penyintas 8. Pemulihan psikososial penyintas 9. Menyediakan distribusi air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan	masyarakat 6. Pemberdayaan kelompok rentan
24. Dinas Perindustrian	1. Melakukan pelatihan K3 dan tanggap darurat bencana di	1. Melakukan koordinasi perlindungan pekerja	1. Menyediakan program pelatihan kerja dan padat

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
dan Ketenagakerjaan	sektor industri. 2. Mempromosikan penerapan standar keselamatan kerja berbasis risiko bencana. 3. Melakukan pemetaan industri penting di zona rawan bencana	terdampak dan penghentian sementara operasional industri. 2. Mendorong pelibatan tenaga kerja dalam upaya tanggap darurat, jika memungkinkan	karya untuk pemulihan ekonomi lokal. 2. Mendorong industri kecil dan menengah untuk bangkit kembali melalui pendampingan dan fasilitasi teknis.
25. Inspektorat Daerah	1. Sosialisasi teknis pengawasan pelaporan kebencanaan 2. Pengawasan dan pendampingan kegiatan penanggulangan bencana	1. Pendampingan instansi terkait mengenai pemanfaatan anggaran untuk penanggulangan bencana	1. Pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
26. Pemerintah Kecamatan	1. Koordinasi desa terkait kegiatan pengurangan risiko bencana yang kolaboratif 2. Pendampingan desa dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana	1. Pendampingan desa dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana 2. Koordinasi dan pendataan korban bencana, kerusakan dan kerugian akibat bencana	1. Pemulihan situasi bencana di wilayah kecamatan 2. Dukungan terhadap pemerintah daerah untuk pendataan kerusakan dan kerugian bencana
27. Pemerintah Desa dan Kelurahan	1. Penyiapan anggaran kesiapsiagaan bencana di level desa/kelurahan 2. Pembentukan forum PRB desa/kelurahan 3. Kajian risiko bencana desa/kelurahan dan rencana penanggulangan bencana desa/kelurahan 4. Pendataan kelompok rentan dan mekanisme pertolongan korban di desa/kelurahan 5. Pembentukan relawan bencana	1. Pendataan dan pelaporan situasi bencana di desa 2. Evakuasi dan pertolongan korban bencana di desa 3. Penyiapan dapur umum 4. Penganggaran tanggap Darurat bencana	1. Pemulihan situasi bencana di desa 2. Dukungan terhadap pemerintah daerah untuk pendataan kerusakan dan kerugian bencana di desa 3. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan kewenangan desa dan kelurahan

Nama Organisasi	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	desa/kelurahan 6. Simulasi bencana desa/kelurahan		
28. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Hayyung	1. Menyusun HOPE (*Hospital Plan Emergency*/ HDP/*Hospital Disaster Plan*) 2. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana 3. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya 4. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit	1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat 2. Pelayanan kesehatan 3. Penanganan korban luka-luka, meninggal dan mekanisme rujukan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut	1. Memberikan layanan rehabilitasi medis dan psikologis jangka menengah dan panjang. 2. Mendukung pelaporan dan dokumentasi medis untuk keperluan data korban dan klaim asuransi/JKN. 3. Berpartisipasi dalam evaluasi respons sistem kesehatan terhadap bencana

Sumber: FGD & analisis tim penyusun 2025

E. Kerangka Kerja Saat Bencana

Penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ada pada tahap perencanaan dengan melibatkan sektor terkait untuk terlibat secara mandiri dan proaktif. Upaya yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah pemulihan secepat mungkin dampak bencana dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan infrastruktur vital. Secara umum, pada fase tanggap darurat bencana dapat membangun koordinasi lintas sektor dan multi pihak untuk mendukung percepatan penanganan bencana dan pengurangan korban susulan. Hal ini dipertegas dengan memaksimalkan pengelolaan Pusdalops PB sebagai pusat informasi penanganan tanggap darurat bencana. Pusdalops PB dapat menjadi wadah sekaligus ruang bagi sektor yang terlibat dalam tanggap darurat bencana untuk meningkatkan koordinasi dan bertukar informasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.

Tindakan-tindakan dalam tanggap darurat bencana terbagi ke dalam 3 fase yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan, adapun pemaparan masing-masing fase sebagai berikut:

a) Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
b) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak burukyang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan.
c) Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

Dalam tahapan saat terjadi bencana, peran BPBD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam urusan penanggulangan bencana, khususnya pada fase tanggap darurat bencana menjadi penting untuk memulihkan dengan segera korban jiwa dan dampak lainnya.

F. Kerangka Kerja Pasca bencana

Kerangka kerja pada fase pasca bencana dapat dilakukan dengan melibatkan semua sektor terkait untuk melaksanakan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dapat meliputi perbaikan sarana dan prasarana fisik, perbaikan bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan perbaikan kondisi lingkungan. Pemulihan dampak bencana dapat pula dilakukan dengan membentuk budaya mandiri pada masyarakat agar secara mandiri memiliki kesadaran untuk membangun kembali wilayahnya.

Serangkaian upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja pasca bencana atau kerangka kerja pemulihan bencana. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca bencana, diantaranya:

1. Membangun partisipasi
2. Mengedepankan koordinasi
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Menjaga kesinambungan
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis penguranganrisiko bencana
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian
8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana meliputi serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana diwujudkan dalam tindakan-tindakan dalam kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi.

G. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sumber pendanaan penanggulangan bencana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan/atau (3) Masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adalah

orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan, baik melalui APBN di tingkat pusat maupun APBD di tingkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontingensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat 4.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemperintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

1. Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana

a. Pendanaan Penanggulangan Bencana berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2008

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari:

1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
3) Dunia Usaha, dan atau
4) Masyarakat

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN di tingkat pusat maupun APBD di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakaidan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalampenyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

a) Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana,
b) Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan
c) Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaandana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

b. Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Kepulauan Selayar

Kebijakan umum anggaran (KUA) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 yang disepakati antara pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 28/NK/PEM/VIII/2024 dan Nomor: 176/278/DPRD/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 telah memuat dukungan pendanaan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar. Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

c. Dana Bersama Penanggulangan Bencana

Dana Bersama adalah adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan. Dana Bersama dikelola oleh Menteri Keuangan dan dilaksanakan oleh unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana pada BAB I Ketentuan Umum pasal 2 menyatakan Dana Bersama bertujuan untuk mendukung dan melengkapi ketersediaan Dana Penanggulangan Bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada BAB V Penyaluran Dana Bersama pada Pasal 6 menyatakan bahwa:

1. Dana Bersama disalurkan untuk pendanaan kegiatan penanggulangan bencana
2. Penyaluran Dana Bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   - Penyaluran pada tahap pra bencana;
   - penyaluran pada tahap darurat bencana;
   - penyaluran pada tahap pasca bencana terutama kegiatan pemulihan; dan
   - penyaluran untuk pendanaan transfer risiko.

d. Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDG's Desa. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 pada BAB II tentang fokus penggunaan dana desa adalah untuk mendukung:

a. Penanganan Kemiskinan Ekstrem Dengan Penggunaan Dana Desa Paling Tinggi 15% (Lima Belas Persen) Untuk Bantuan Langsung Tunai Desa Dengan Target Keluarga Penerima Manfaat Dapat Menggunakan Data Pemerintah Sebagai Acuan;
b. Penguatan Desa Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim;
c. Peningkatan Promosi Dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa Termasuk Stunting;
d. Dukungan Program Ketahanan Pangan
e. Pengembangan Potensi Dan Keunggulan Desa;
f. Pemanfaatan Teknologi Dan Informasi Untuk Percepatan Implementasi Desa Digital;
g. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal; Dan/Atau

h. Program Sektor Prioritas Lainnya Di Desa.

Dan penggunaan dana untuk kebutuhan penanggulangan bencana terkait dengan perubahan iklim termuat pada Pasal 5 yaitu Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
c. pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat dan/atau pasca bencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

3. Penggunaan Dana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.

1. Penggunaan Dana Pra bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap pra bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

a) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi kegiatan (1) fasilitasi penyusunan RPB, (2) pengurangan risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tata ruang, (6)

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan, (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

b) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi: (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan; pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini; penyediaan dan penyiapan barang pasokan; pengorganisasian penyuluhan, dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat; dan penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, (2) pembangunan sistem peringatan dini, antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern.

2. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

a) Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait.
b) Dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan dalam anggaran BNPB.
c) Dana siap pakai yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD. BNPB atau BPBD yang sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.
d) Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. BTT dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam APBD.
e) Bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD kepada kabupaten/kota yang terdampak bencana besar dan menetapkan status tanggap darurat bencana. Pemberian bantuan keuangan ditetapkan oleh gubernur.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

a) Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
b) Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana.
c) Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
d) Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan.
e) Kegiatan pemulihan darurat sarana dan prasarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b. Pertolongan darurat;
c. Evakuasi korban bencana;
d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e. Kebutuhan pangan dan sandang;
f. Pelayanan kesehatan;
g. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal Pemerintah Daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku *mutatis mutandis* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

3. Penggunaan Dana Pasca bencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi:

a) Kegiatan rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana, (2) perbaikan sarana dan prasarana umum, (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, (4) pemulihan sosial psikologis, (5) Pelayanan kesehatan, (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik, (7) pemulihan sosial ekonomi budaya, (8) pemulihan keamanan dan ketertiban, (9) pemulihan fungsi pemerintahan, dan/atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

b) Kegiatan rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali sarana dan prasarana, (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, (3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat, (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, (6) peningkatan fungsi pelayanan publik, dan/atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada Pemerintah Daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, Pemerintah Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) disusun berdasarkan nilai budaya moral dan kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang baik dalam masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Perumusan tujuan dan sasaran tetap memperhatikan nilai yang bersifat universal merupakan dasar yang diambil untuk membangun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana. Prinsip ini terbentuk dari nilai komunitas yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai dasar karakter daerah.

Tujuan penanggulangan bencana ditentukan berdasarkan isu strategis bencana yang dijadikan prioritas dalam program penanggulangan bencana yang diselaraskan dengan isu yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. RPB diharapkan dapat menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di wilayah kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan dan sasaran diharapkan dapat menjadi pendukung pencapaian indikator ketahanan daerah dan mendukung upaya penanggulangan dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) periode kedua tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran penanggulangan bencana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 lima tahun kedepan dirancang berdasarkan 3 isu strategis utama dalam penanggulangan bencana daerah. Adapun tujuan dan sasaran penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)
1. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam mempengaruhi optimalisasi penanggulangan bencana	1.1 Mewujudkan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan sebesar 1,18 per tahun atau 72,32 (baik) pada tahun 2029	1.1.1 Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Terwujudnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup
			1.1.2 Meningkatkan persentase/luasan tutupan lahan hijau dan vegetasi alami di kawasan rawan bencana	Terwujudnya tutupan lahan hijau (vegetasi) di daerah aliran sungai, pesisir, dan lereng secara berkelanjutan
			1.1.3 Meningkatkan pengelolaan kawasan hijau dan daerah tangkapan air secara berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan kawasan hijau dan tangkapan air secara berkelanjutan berbasis pengurangan risiko bencana
2. Perubahan iklim (*climate change*) meningkatkan kerentanan masyarakat di daerah rawan bencana	2.1 Mewujudkan ketahanan (*resiliensi*) masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya Indeks Ketahanan daerah (IKD) terhadap bencana Sebesar 0,3-0,4 per tahun atau 0,64 (sedang) pada tahun 2029	2.1.1 Meningkatkan ketahanan energi bersih, air dan kemandirian pangan	Terwujudnya ketahanan energi bersih, air dan kemandirian pangan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim
			2.1.2 Meningkatkan integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam	Terwujudnya kebijakan adaptasi perubahan iklim dan Pengurangan risiko bencana terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)
			dokumen perencanaan daerah	
			2.1.3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal dan infrastruktur dalam menghadapi dampak perubahan iklim	Terwujudnya kapasitas lembaga lokal dan infrastruktur, yang mampu menghadapi dampak perubahan iklim
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang belum Optimal	3.1 Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusi dan Kolaboratif	Meningkatnya Indeks Ketahanan daerah (IKD) terhadap bencana Sebesar 0,3-0,4 per tahun atau 0,64 (sedang) pada tahun 2029	3.1.1 Meningkatkan upaya penanganan tematik kawasan rawan bencana	Terwujudnya upaya penanganan tematik kawasan rawan bencana daerah
			3.1.2 Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah	Terwujudnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana
			3.1.3 Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah	Terwujudnya penanganan darurat yang responsif, kolaboratif dan inklusif
			3.1.1 Meningkatkan upaya pemulihan pasca bencana daerah	Terwujudnya upaya pemulihan pasca bencana daerah

Sumber: Analisis tim penyusun, 2025

Berdasarkan tujuan, indikator tujuan dan sasaran maka rencana penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, diharapkan mampu meningkatkan nilai indeks ketahanan daerah (IKD) dan Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun proyeksi tahunan peningkatan nilai IKD dan IKLH dalam rencana penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 20. Proyeksi Capaian IKD dan IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Uraian	Nilai Indeks				
	2025	2026	2027	2028	2029
IKD	0,50 (sedang)	0,53 (sedang)	0,56 (sedang)	0,60 (sedang)	0,64 (sedang)
IKLH	67,61 (baik)	68,79 (baik)	69,97 (baik)	72,32 (baik)	73,5 (baik)

Sumber: RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2025-2029

B. Strategi dan arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana digunakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Isu strategis dijabarkan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan dalam rangka meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB). Strategi dan arah kebijakan penanganan bencana disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 21. Strategi dan arah kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.1.1 Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Penguatan kelembagaan masyarakat untuk pengelolaan lingkungan	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar pengelolaan lingkungan hidup
	Peningkatan kapasitas masyarakat atas pengelolaan sumber daya	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	alam dan lingkungan hidup berkelanjutan	
1.1.2 Meningkatkan luasan tutupan lahan hijau (vegetasi) alami di kawasan rawan bencana	Peningkatan persentase tutupan lahan dan vegetasi alami pada lahan kritis dan wilayah pesisir	Penghijauan dan rehabilitasi pada lahan kritis dan wilayah pesisir
1.1.3 Meningkatkan pengelolaan kawasan hijau dan daerah tangkapan air secara berkelanjutan	Pengelolaan kawasan hijau dan daerah tangkapan air berbasis pengurangan risiko bencana	Perlindungan daerah tangkapan air untuk pengurangan risiko bencana
	Penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan desa untuk perlindungan kawasan hijau berkelanjutan	Perlindungan daerah hijau untuk pengurangan risiko bencana
2.1.1 Meningkatkan ketahanan energi bersih, air dan kemandirian pangan	Peningkatan kolaborasi multi-pihak dan kelembagaan untuk ketahanan energi bersih, air dan kemandirian pangan	Penguatan kapasitas desa dan stakeholder untuk ketahanan energi bersih, air dan ketahanan pangan
2.1.2 Meningkatkan integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam dokumen perencanaan daerah	Peningkatan dokumen dan kebijakan terkait dampak perubahan iklim di daerah	Kajian kerentanan iklim dan kapasitas adaptasi daerah dalam menghadapi perubahan iklim
2.1.3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal dan infrastruktur dalam menghadapi dampak perubahan iklim	Penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan desa dalam menghadapi dampak perubahan iklim	# Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dampak perubahan iklim # Pembentukan lembaga desa tangguh iklim
	Peningkatan infrastruktur untuk menghadapi dampak perubahan iklim	Penguatan infrastruktur untuk ketahanan air dan pangan
3.1.1 Meningkatkan upaya penanganan tematik kawasan rawan bencana	Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat desa berbasis ketangguhan desa menghadapi bencana	Pembentukan dan pelatihan masyarakat desa tangguh bencana
	Peningkatan kapasitas sekolah dan madrasah di daerah rawan bencana berbasis pengurangan risiko bencana	Pembentukan sekolah dan madrasah aman bencana pada kawasan rawan bencana di setiap wilayah kepulauan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan kapasitas rumah sakit dan puskesmas di daerah rawan bencana berbasis pengurangan risiko bencana	# Penguatan kapasitas layanan dan peralatan rumah sakit dan puskesmas berbasis pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana # Penyusunan perencanaan penanganan kedaruratan pada fasilitas kesehatan daerah
	Peningkatan integrasi informasi risiko bencana dan dokumen kebencanaan dalam perencanaan tata ruang dan lingkungan daerah	Internalisasi hasil kajian risiko bencana ke dalam dokumen tata ruang, dokumen lingkungan dan dokumen perencanaan daerah lainnya
3.1.2 Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah	Penguatan kapasitas, SDM, kelembagaan dan kesiapsiagaan bencana daerah	# Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar manajemen bencana # Penguatan kelembagaan pengurangan risiko bencana multi-stakeholder # Penyusunan perencanaan kesiapsiagaan berbagai jenis ancaman bencana
3.1.3 Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah	Penguatan sistem penanganan darurat bencana pada wilayah kepulauan	Penyusunan regulasi dasar kedaruratan bencana
	Penguatan kapasitas peralatan dan personil penanganan darurat bencana pada wilayah kepulauan	Pengadaan peralatan dan personil penanggulangan bencana pada wilayah terpencil dan kepulauan
3.1.1 Meningkatkan upaya pemulihan pasca bencana daerah	Penguatan implementasi dan pelaporan pemulihan pasca bencana	Pelatihan JITUPASNA bagi stakeholder kebencanaan

Sumber: Analisis Tim penyusun, 2025

C. Program Penanggulangan Bencana

Program penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan sasaran dan arah kebijakan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Program penanggulangan bencana secara teknis disusun berdasarkan kewenangan dan tupoksi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan pelayanan dasar dan pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, baik saat pra bencana, saat bencana, maupun setelah terjadi bencana. Program penanggulangan bencana diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam program teknis OPD sesuai dengan tujuan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan program penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 22. Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
1.1 Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Terwujudnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah melakukan gerakan peduli lingkungan hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase area pelayanan pengelolaan sampah
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga terkait dampak perubahan iklim
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik terkait risiko bencana kabupaten
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
1.2 Meningkatkan luasan tutupan lahan hijau (vegetasi) alami di kawasan rawan bencana	Bertambahnya Persentase/luasan tutupan lahan hijau (vegetasi) di daerah	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertangani dengan baik

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
	aliran sungai, pesisir, dan lereng		
1.3 Meningkatkan pengelolaan kawasan hijau dan daerah tangkapan air secara berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan kawasan hijau dan daerah tangkapan air secara berkelanjutan	Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Permukiman di Daerah Rawan Bencana	Persentase pengendalian dan pengawasan penataan permukiman di daerah rawan bencana
2.1 Meningkatkan ketahanan energi bersih, air, dan kemandirian pangan	Tercapainya ketahanan energi bersih, air dan kemandirian pangan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan utama
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Persentase pengelolaan desa/kelurahan tangguh bencana
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas menjadi Usaha Kecil dan/atau Usaha Menengah
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan sumber daya alam yang diimplementasikan
2.2 Meningkatkan integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim	Terlaksananya integrasi kebijakan adaptasi perubahan	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam dokumen perencanaan daerah	iklim dan PRB ke dalam dokumen perencanaan daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD
2.3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal dan infrastruktur dalam menghadapi dampak perubahan iklim	Terwujudnya kapasitas kelembagaan lokal dan infrastruktur yang mampu menghadapi dampak perubahan iklim	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam menghadapi dampak perubahan iklim
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera terkait dampak perubahan iklim
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian
3.1 Meningkatkan upaya penanganan tematik kawasan rawan bencana	Terwujudnya upaya penanganan tematik kawasan rawan bencana daerah	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 3. Persentase sistem dasar penanggulangan bencana
		Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Cakupan pengelolaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana (KRB)	Persentase kesesuaian penataan ruang berbasis risiko bencana

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
		Program Peningkatan Sistem Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Cakupan peningkatan sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah
		Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Persentase pengelolaan desa/kelurahan tangguh bencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Persentase daya tarik wisata dan destinasi pariwisata yang dikembangkan berbasis PRB
		Program Perlindungan Cagar Budaya dari Risiko Bencana	Persentase cagar budaya yang dilindungi dari risiko bencana
		Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Cakupan desa/kelurahan Tangguh bencana yang terbentuk dan dikembangkan
		Program Penanganan Bencana	Persentase desa yang mendapat program Kampung Siaga bencana kabupaten/kota
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik
		Program Peningkatan Perizinan Bangunan (PBG)	Rasio kepatuhan IMB kabupaten
		Program Pembangunan Infrastruktur Perumahan	Persentase pembangunan infrastruktur perumahan berbasis PRB

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
		Berbasis Pengurangan Risiko Bencana)PRB)	
		Program Tata Kelola Kawasan Permukiman Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Rasio rumah/pemukiman layak huni pada kawasan rawan bencana
		Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Permukiman di Daerah Rawan Bencana	Cakupan pengendalian dan pengawasan penataan permukiman di daerah rawan bencana
a. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah	Tercapainya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 2. Persentase sistem dasar penanggulangan bencana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
		Program Rumah Sakit Aman Bencana	Cakupan rumah sakit aman bencana di daerah
		Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana)Destana)	Persentase pengelolaan desa/kelurahan tangguh bencana
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase pengendalian penduduk
3.3 Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah	Tercapainya penanganan darurat yang responsif, kolaboratif, dan inklusif	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
		Program Penanganan Bencana	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten
		Program Pengelolaan persampah	Persentase area pelayanan pengelolaan sampah
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian
3.4 Meningkatkan upaya pemulihan pasca bencana daerah	Terwujudnya upaya pemulihan pasca bencana daerah	Program Penanggulangan Bencana	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana
		Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Permukiman di Daerah Rawan Bencana	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai dan wilayah pantai kewenangan kabupaten/kota
		Program Pembangunan Infrastruktur Perumahan Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Persentase pembangunan infrastruktur perumahan berbasis PRB

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dan/atau usaha menengah
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan pencatatan sipil

Sumber: Analisis tim penyusun, 2025

BAB V. RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana Aksi Daerah, selanjutnya disebut RAD, merupakan penjabaran teknis Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) selama 5 tahun (2025-2029). Rencana aksi memuat kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimulai pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Strategi penyelarasan program dan kegiatan RAD dengan program dan kegiatan pada **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024** tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga setiap program dan kegiatan disandingkan dengan kodefikasi dan nomenklatur dalam perencanaan pembangunan daerah. Susunan RAD-PRB Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 23. Rencana Aksi daerah Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
Isu Strategis 1: Penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam mempengaruhi optimalisasi penanggulangan bencana																		
Tujuan: Mewujudkan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan																		
Sasaran 1.1: Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup																		
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga/kelompok/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	0	1	1	0	1	dokumen	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Kec.Benteng	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	50	50	50	50	50	keluarga	2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat		Kec.Benteng	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	20	20	20	20	20	lembaga	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat		Kec.Benteng	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase area pelayanan pengelolaan sampah	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	20	20	20	20	20	kelompok	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp3.196.005.931,00	Kec.Benteng	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga terkait dampak perubahan iklim	2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	1	1	1	1	laporan	2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50	50	50	50	50	keluarga	2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Sosialisasi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	50	50	50	50	50	orang	2.14.04.2.01.0021 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik terkait risiko bencana kabupaten	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Disemintasi Informasi	70	80	90	100	100	persentase	2.16.02.2.01.0020 Disemintasi Informasi		Semua Kecamatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian (Diskominfo SP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan perpustakaan tingkat darah (%)	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	1	1	1	1	1	dokumen	2.23.02.2.02.0015 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi		Kecamatan Benteng	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/ kota (%)	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	0	1	1	0	0	perpustakaan	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Semua Kecamatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30	30	30	30	30	orang	3.25.03.2,02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp864.674.858,00	Semua Kecamatan	Dinas Perikanan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular	3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	3	3	3	3	3	laporan	3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Rp109.499.379,00	Semua Kecamatan	Dinas Perikanan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
					Daerah Kabupaten/Kota													
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	30	30	30	30	30	orang	3.27.04.2.01.0005 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis		Semua Kecamatan	Dinas Perikanan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	0	1	0	0	0	dokumen	3.27.04.2.01.0007 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis		Semua Kecamatan	Dinas Perikanan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Cakupan penyimpanan sementara limbah B3	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	4	4	4	4	4	laporan	2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp1.692.840,00	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	4	4	4	4	4	unit	2.11.05.2.01.0003 Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	unit	2.11.05.2.01.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengumpulan limbah B3	2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4	4	4	4	4	dokumen	2.11.05.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	4	4	4	4	4	dokumen	2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan							Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan					
						Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	4	4	4	4	4	unit	2.11.05.2.02.0003 Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di kabupaten/kota	2	2	2	2	2	usaha	2.11.05.2.02.0004 Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Limbah B3 di kabupaten/kota	4	4	4	4	4	unit	2.11.05.2.02.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50	50	50	50	50	keluarga	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Sasaran 1.2: Meningkatkan luasan tutupan lahan hijau (vegetasi) di kawasan rawan bencana																		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertangani dengan baik	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	1	0	0	0	dokumen	2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp650.755.759,00	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100	100	100	100	100	Ha	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	10	10	10	10	10	unit	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	10	10	10	10	10	unit	2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan	20	20	20	20	20	unit	2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati (%)	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat kabupaten/kota	2	2	2	2	2	dokumen	2.11.04.2.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Sasaran 1.3: Meningkatkan pengelolaan kawasan hijau dan daerah tangkapan air secara berkelanjutan																		
Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Permukiman di Daerah Rawan Bencana	Persentase pengendalian dan pengawasan penataan permukiman di daerah rawan bencana	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1	1	1	1	1	dokumen	1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Rp6.244.561.921,00	Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1	1	1	1	1	Dokumen	1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1	1	1	1	1	dokumen	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
													Penampung Air Lainnya					
Isu Strategis 2: Perubahan iklim (climate change) meningkatkan kerentanan masyarakat di daerah rawan bencana																		
Tujuan: Mewujudkan ketahanan (resiliensi) masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim																		
Sasaran 2.1: Meningkatkan ketahanan energi bersih, air, dan kemandirian pangan																		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	5	5	5	5	5	unit	2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Rp5.426.320,00	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	2	2	2	2	2	laporan	2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	unit	2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan utama	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan penyediaan dan penyaluran pangan utama	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	4	4	4	4	laporan	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp50.282.800,00	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya	4	4	4	4	4	laporan	2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30	30	30	30	30	keluarga	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2	2	2	2	2	laporan	2.09.03.2.01.0009 Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	4	4	4	4	4	laporan	2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
													Pangan Pokok Strategis					
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan cadangan pangan	2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1	0	0	0	0	dokumen	2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5000	5000	5000	5000	5000	ton	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5000	5000	5000	5000	5000	ton	2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5000	5000	5000	5000	5000	ton	2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	4	4	4	4	laporan	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1	0	0	0	0	dokumen	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kerawanan pangan	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	dokumen	2.09.04.2.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan	4	4	4	4	4	laporan	2.09.04.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota							Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			Pangan (DPKP)		
						Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4	4	4	4	4	dokumen	2.09.04.2.01.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	dokumen	2.09.04.2.01.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	4	4	4	4	laporan	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30	30	30	30	30	keluarga	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Persentase pengelolaan desa/kelurahan Tangguh bencana	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa terkait perubahan iklim	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4	4	4	4	4	dokumen	2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD, BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas menjadi Usaha Kecil dan/atau	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Persentase pemberdayaan UMKM dalam menghadapi perubahan iklim	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	10	10	10	10	10	unit usaha	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
	Usaha Menengah	dan Usaha Mikro (UMKM)	Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan													
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan sumber daya perikanan dalam menghadapi perubahan iklim	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	10	10	10	pelaku usaha	3.25.05.2.01.0004 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perikanan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan sumber daya alam yang diimplementasikan	4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan kebijakan sumber daya alam terkait perubahan iklim	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4	4	4	4	4	dokumen	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp2.359.840.739,00	Semua Kecamatan	Setda	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4	4	4	4	4	dokumen	4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Semua Kecamatan	Setda	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	4	4	4	4	4	dokumen	4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Semua Kecamatan	Setda	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Sasaran 2.2: Meningkatkan integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam dokumen perencanaan daerah																		
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan perencanaan dan pendanaan terkait perubahan iklim	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1	1	1	1	1	dokumen	5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp50.000.000,00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	berita acara	5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp50.000.000,00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4	2	2	2	2	dokumen	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp50.000.000,00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah terkait perubahan iklim	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	laporan	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp50.000.000,00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	5	5	5	5	5	kerja sama	5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Rp50.000.000,00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	4	4	4	4	laporan	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp50.000.000,00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan koordinasi perencanaan bidang pemerintah dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4	2	2	2	2	dokumen	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Rp50.000.000,00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2	2	2	2	2	laporan	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Rp50.000.000,00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
													Daerah Bidang Pemerintahan					
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	2	2	2	2	dokumen	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp50.000.000,00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	2	2	2	2	laporan	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp50.000.000,00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam menghadapi dampak perubahan iklim	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dalam menghadapi perubahan iklim	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50	50	50	50	50	orang	2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera terkait dampak perubahan iklim	2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga terkait perubahan iklim	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4	4	4	4	4	laporan	2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	50	50	50	50	50	keluarga	2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Ketahanan	4	4	4	4	4	laporan/ dokumen	2.14.04.2.01.0016		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan		RIPB 2020-2044, Renas

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	PB 2025-2029
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi perubahan iklim	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4	4	4	4	4	laporan	2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan terkait perubahan iklim	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20	20	20	20	20	lembaga kemasyarakatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	20	20	20	20	20	lembaga kemasyarakatan	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	10	10	10	10	10	unit	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/ kota terkait perubahan iklim	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda tingkat Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Rp319.466.330,00	Semua Kecamatan	Dinas Pendidikan (Disdik)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terkait perubahan iklim	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	100	100	100	100	100	Ha	3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Isu Strategis 3: Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang belum optimal																		
Tujuan: Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusi dan kolaboratif																		
Sasaran 3.1: Meningkatkan upaya penanganan tematik kawasan rawan bencana																		
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per Jenis Ancaman Bencana)	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per Jenis Ancaman Bencana)	Rp2.534.927.799,00	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	0	1	0	0	dokumen	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	kegiatan	1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30	30	30	30	30	keluarga	1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	1	1	1	1	kawasan	1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	0	1	0	0	0	dokumen	1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD))	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	0rang	1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD))	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	1	0	1	1	dokumen	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	5	5	5	5	5	dokumen	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	4	4	4	4	4	dokumen	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	0	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	dokumen	1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Satuan	Cakupan pengelolaan	1.01.03	Penetapan Kurikulum	Persentase pembentukan	1.01.03.2.01	Pembentukan Satuan	100	100	100	100	100	orang	1.01.03.2.01.0002		Semua Sekolah			RIPB 2020-2044, Renas

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Program Pengembangan Kurikulum	Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pendidikan Aman Bencana (SPAB)							Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan (Disdik)	APBD, APBN, CSR	PB 2025-2029
						Pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	100	100	100	100	100	orang	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan (Disdik)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	1.01.03.3.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sesuai Karakteristik dan Budaya Daerah bagi Pendidikan Dasar (Satuan Pendidikan Aman Bencana) di daerah rawan bencana	100	100	100	100	100	orang	1.01.03.3.01.0005 Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sesuai Karakteristik dan Budaya Daerah bagi Pendidikan Dasar		Semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan (Disdik)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30	30	30	30	30	Keluarga	7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30	30	30	30	30	keluarga	7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30	30	30	30	30	keluarga	7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Semua Kecamatan	Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana (KRB)	Persentase kesesuaian penataan ruang berbasis risiko bencana	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	Persentase penetapan rencana tata ruang daerah	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2	2	2	2	2	dokumen	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	dokumen	1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	dokumen	1.03.12.2.01.0011		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan		RIPB 2020-2044, Renas

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
													Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	PB 2025-2029
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/ kota	1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	dokumen	1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	dokumen	1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	50	50	50	50	50	kegiatan	1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/ kota	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	2	2	2	2	2	dokumen	1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	2	2	2	2	2	dokumen	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		Semua kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Peningkatan Sistem Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Cakupan peningkatan sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Cakupan pemetaan rawan bencana kebakaran	1.05.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4	4	4	4	4	dokumen	1.05.1.01.0024 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp186.461.219,00	Semua OPD dan Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Daerah Rawan Bencana	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1	1	1	1	dokumen	7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Semua OPD dan Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Fasilitasi Penyelenggaraan	1	1	1	1	1	dokumen	7.01.06.2.01.0011			Badan Penanggulangan		RIPB 2020-2044, Renas

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Ketentraman dan Ketertiban Umum							Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Semua OPD dan Kecamatan	Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	PB 2025-2029
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2	2	2	2	2	laporan	7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	2	2	2	2	2	laporan	7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD))	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Persentase pengelolaan desa/kelurahan Tangguh bencana	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa di kawasan rawan bencana	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat	5	5	5	5	5	lembaga	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat	3	3	3	3	3	unit	2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di kawasan rawan bencana	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	dokumen	2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	Rp1.453.590,00	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Kewenangan Kabupaten/Kota					
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	dokumen	2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1.453.590,00	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan e-government di kawasan rawan bencana	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	2	2	2	2	2	dokumen	2.16.03.2.02.0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Rp247.602.942,00	Semua OPD dan Kecamatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian (Diskominfo SP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	2	2	2	2	2	layanan	2.16.03.2.02.0025 Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi		Semua OPD dan Kecamatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian (Diskominfo SP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembudayaan gemar membaca di kawasan rawan bencana	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	5	5	5	5	5	lokus	2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		Semua OPD dan Kecamatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Persentase daya tarik wisata dan destinasi pariwisata yang dikembangkan berbasis PRB	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan daya tarik wisata di kawasan rawan bencana	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	3.26.02.2.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Rp87.356.714,00	Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota	3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	lokasi	3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis	50	50	50	50	50	orang	3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan		Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Pariwisata Kabupaten/Kota							Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	laporan	3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	laporan	3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Perlindungan Cagar Budaya Dari risiko Bencana	Persentase cagar budaya yang dilindungi dari risiko bencana	2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/ kota	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Perlindungan Cagar Budaya dari Risiko Bencana	5	5	5	5	5	lokasi	2.22.05.2.02.0001 Perlindungan Cagar Budaya		Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Cakupan desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dan dikembangkan	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	3	3	3	3	3	dokumen	2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Masyarakat	50	50	50	50	50	orang	2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	2	2	2	2	2	dokumen	2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Penanganan Bencana	Persentase desa yang mendapat program Kampung Siaga bencana kabupaten/ kota	1.06.06 Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	15	15	15	15	15	kampung /desa	1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp391.392.909,00	Semua Kecamatan	Dinas Sosial (Dinsos)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengelolaan	Persentase saluran	1.03.06		Cakupan pengelolaan	1.03.06.2.01	Operasi dan Pemeliharaan						meter	1.03.06.2.01.0019		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan		RIPB 2020-2044, Renas

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
dan Pengembangan Sistem Drainase	drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Sistem Drainase Lingkungan							Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan			dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	PB 2025-2029
						Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	5	5	5	5	5	unit	1.03.06.2.01.00022 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5	5	5	5	5	sistem drainase perkotaan	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Peningkatan Perizinan Bangunan (PBG)	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan ber-IMB (unit) dan jumlah bangunan gedung daerah	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	30	30	30	30	30	orang	1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	20	20	20	20	20	dokumen	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Semua kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pembangunan Infrastruktur Perumahan berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Persentase pembangunan infrastruktur perumahan berbasis PRB	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi di kawasan rawan bencana	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp165.925.260,00	Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
Program Tata Kelola Kawasan Permukiman Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Rasio rumah/pemukiman layak huni pada kawasan rawan bencana	1.04.03 Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman di kawasan rawan bencana	1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	4	4	4	4	4	laporan	1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Pengendalian dan Pengawasan Penataan Permukiman di Daerah Rawan Bencana	Cakupan pengendalian dan pengawasan penataan permukiman di daerah rawan bencana	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sungai						Km	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Rp6.244.561.921,00	Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						Km	1.03.02.2.01.0074 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai						Km	1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						Km	1.03.02.2.01.0087 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Breakwater						Km	1.03.02.2.01.0092 Peningkatan Breakwater		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Normalisasi/Restorasi Sungai						Km	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing						Km	1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembangunan Breakwater	1 5	1 1	1 1	1 1	1 1	Km Km	1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater		Kec. Buki Kec. Pasimarannu Kec. Bontomatene	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029 RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Peningkatan Tanggul Sungai						Km	1.03.02.2.01.0103 Peningkatan Tanggul Sungai		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1	1	1	1	1	Km	1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Kec. Bontomanai Kec. Bontomatene	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembangunan Tanggul Sungai	1	1	1	1	1	Km	1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai		Kec. Bontoharu Kec. Bontosikuyu Kec. Bontomatene Kec. Buki Kec. Pasilanmbena Kec. Pasimasunggu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	2.5	1	1	1	1	Km	1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Kec. Bontoharu Kec. Bontosikuyu Kec. Bontomatene Kec. Buki Kec. Takabonerate Kec. Pasimanggu Timur Kec. Bontomanai Kec. Pasilambena Kec. Pasimasunggu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							3	1	1	1	1	Km						
							9	1	1	1	1	Km						
							6	1	1	1	1	Km						
							4	1	1	1	1	Km						
Sasaran 3.2: Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah																		
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3	3	3	3	3	unit	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp2.534.927.799,00	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							50	50	50	50	50	keluarga	1.05.03.2.02.0019		Semua kecamatan	Badan Penanggulangan		

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Alat Deteksi Dini Bencana Tsunami	0	0	1	1	1	unit	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG	APBN, APBD, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Cakupan pemetaan rawan bencana kebakaran	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1	0	0	0	0	dokumen +Peta	1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran		Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran		Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.04.1.01.0006 Standarisasi Sarana dan Prasarana		Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Kebakaran dan Alat Perlindung Diri							Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindung Diri					
						Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.04.1.01.0007 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.04.1.01.0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.05.04.1.01.0021 Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Rumah Sakit Aman Bencana	Cakupan Rumah Sakit Aman Bencana di daerah	1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit di Daerah Rawan Bencana	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Aman Bencana	50	50	50	50	50	orang	1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan (Dinkes)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
					1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Aman Bencana di daerah rawan bencana	50	50	50	50	50	orang	1.02.03.2.03.0001 Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan (Dinkes)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Persentase pengelolaan desa/kelurahan tangguh bencana	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa di kawasan rawan bencana	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa	1	1	1	1	1	laporan	2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan	Rp406.725.099,00	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
		Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							Perlindungan Masyarakat Desa					
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	1	1	1	dokumen	2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50	50	50	50	50	keluarga	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengendalian Penduduk	Persentase pengendalian penduduk	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota yang berada di kawasan rawan bencana	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	1	1	1	1	1	dokumen	2.14.02.2.02.0005 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp2.534.927.799,00	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	BPBD, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota							Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota			Daerah (BPBD))		
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10	10	10	10	10	orang	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Respon Cepat Bencana Non-Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non-Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	1	1	1	1	laporan	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Penanganan Bencana	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1.06.06 Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	300	300	300	300	300	orang	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Rp391.392.909,00	Semua Kecamatan	Dinas Sosial (Dinsos)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Sandang	300	300	300	300	300	orang	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang		Semua Kecamatan	Dinas Sosial (Dinsos)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	50	50	50	50	50	unit	1.06.06.2.01.0004 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Semua kecamatan	Dinas Sosial (Dinsos), BPBD, DP3AP2KB	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	75	75	75	75	75	orang	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Semua Kecamatan	Dinas Sosial (Dinsos), DP3AP2KB	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelayanan Dukungan Psikososial	300	300	300	300	300	orang	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial		Semua Kecamatan	Dinas Sosial (Dinsos), DP3AP2KB	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya	2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan	Penyimpanan sementara Limbah B3	Penyimpanan sementara Limbah B3	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan	4	4	4	4	4	laporan	2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
dan Beracun (Limbah B3)	dan beracun (Limbah B3)	Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				Sementara Limbah B3							Penyimpanan Sementara Limbah B3					
						Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	10	10	10	10	10	unit	2.11.05.2.01.0003 Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	10	10	10	10	10	unit	2.11.05.2.01.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengumpulan limbah B3	2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10	10	10	10	10	dokumen	2.11.05.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	4	4	4	4	4	dokumen	2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	10	10	10	10	10	unit	2.11.05.2.02.0003 Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan	10	10	10	10	10	usaha	2.11.05.2.02.0004 Pembinaan Pengumpulan dan		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Sementara Limbah B3 di kabupaten/kota							Penyimpanan Sementara Limbah B3 di kabupaten/kota					
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Limbah B3 di kabupaten/kota	10	10	10	10	10	unit	2.11.05.2.02.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan terhadap korban bencana	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5	5	5	5	5	dokumen	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp29.047.722.010,00	Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan (Dinkes)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1	1	1	1	1	dokumen	1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp29.047.722.010,00	Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan (Dinkes)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	1	1	1	1	dokumen	1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp29.047.722.010,00	Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan (Dinkes)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan cadangan pangan	2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1	1	1	1	1	dokumen	2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rp50.282.800,00	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5000	5000	5000	5000	5000	ton	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5000	5000	5000	5000	5000	ton	2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3000	3000	3000	3000	3000	ton	2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang terdampak bencana	2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	layanan	2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota yang rawan/terdampak bencana	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30	30	30	30	30	unit	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perhubungan (Dishub)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	30	30	30	30	30	unit	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perhubungan (Dishub)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	30	30	30	30	30	unit	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Semua Kecamatan	Dinas Perhubungan (Dishub)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	30	30	30	30	30	unit	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Semua Kecamatan	Dinas Perhubungan (Dishub)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase area pelayanan pengelolaan sampah	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah akibat bencana yang dikelola	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	15000	15000	15000	15000	15000	ton	2.11.11.2.01.0012 Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Rp3.196.005.931,00	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terkait perubahan iklim	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan						Ha	3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penanggulangan Bencana Non-Alam yang bersifat Zoonosis	1	1	1	1	1	laporan	3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non-		Semua kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
													Alam yang bersifat Zoonosis			Pangan (DPKP)		
						Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	1	1	1	1	laporan	3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Sasaran 3.4: Meningkatkan upaya pemulihan pasca bencana daerah																		
Program Penanggulangan Bencana	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	kegiatan	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Rp2.534.927.799,00	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD))	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	5	5	5	5	5	lembaga	1.05.03.2.04.0011 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD))	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Permukiman di Daerah Rawan Bencana	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai dan wilayah pantai kewenangan kabupaten/kota	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						Km	1.03.02.2.01.0105 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Rp6.244.561.921,00	Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rehabilitasi Breakwater						Km	1.03.02.2.01.0106 Rehabilitasi Breakwater		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing						Km	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
						Rehabilitasi Tanggul Sungai						Km	1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pembangunan Infrastruktur Perumahan berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Persentase pembangunan infrastruktur perumahan berbasis PRB	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi di kawasan rawan bencana	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Cakupan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	0	50	0	50	0	orang	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suka		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
			Program Kabupaten/Kota		Relokasi Program Kabupaten/Kota								relawan Tanggap Bencana					
						Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	orang	1.04.02.2.02.0007 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.04.02.2.02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100	0	100	100	0	unit rumah	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	0	30	0	30	30	unit rumah	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	rumah tangga	1.04.02.2.030007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	20	20	0	0	unit rumah	1.04.02.2.030012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban	Cakupan pendistribusian dan serah terima rumah	1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
			Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	bagi korban bencana atau relokasi	Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Korban Bencana Kabupaten/Kota							Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			(Disperkim), BPBD		
						Pelaksanaan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	rumah tangga	1.04.02.2.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terkait perubahan iklim	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	0	1	1	1	1	laporan	3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dan/atau usaha menengah	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pemberdayaan UMKM dalam menghadapi perubahan iklim	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	10	10	10	10	10	unit usaha	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp216.895.110,00	Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	10	10	10	10	10	unit usaha	2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10	10	10	10	10	unit usaha	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50	50	50	50	50	orang	2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	10	10	10	10	10	unit usaha	2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil		Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemulihan Usaha Mikro	0	10	20	20	0	unit usaha	2.17.07.2.01.0009 Pemulihan Usaha Mikro		Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan, Koperasi,	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
																Usaha Kecil, dan Menengah		
Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	2.24.03 Program Pengelolaan Arsip	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Cakupan arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana yang berskala kabupaten/ kota	2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	100	100	100	100	100	arsip	2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Semua Kecamatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	100	100	100	100	100	arsip	2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		Semua Kecamatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pencatatan Sipil	Cakupan pencatatan sipil	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil bagi korban bencana	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1	1	1	1	1	dokumen	2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Semua Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil bagi korban bencana	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2	2	2	2	2	laporan	2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		Semua Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	2	2	2	2	2	laporan	2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		Semua Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	50	50	50	50	50	orang	2.12.03.2.02.0010 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil		Semua Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Sumber: analisis tim penyusun, 2025

BAB VI. PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

A. Pemaduan Para Pihak

Pemaduan para pihak bertujuan melibatkan pihak-pihak non pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Peran para pihak yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Partisipasi dan kontribusi pihak-pihak di luar/ non-pemerintah di Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi:

1) Inisiatif dan partisipasi kelompok ini diarahkan sebagai pendukung advokasi dan komunikasi lintas pihak dalam implementasi RPB;
2) Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB;
3) Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi penanggulangan bencana dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki;
4) Memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar dalammelaksanakan komunikasi dan advokasi penanggulangan bencana dalam forum PRB;
5) Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya pada seluruh pemangku kepentingan;
6) Memberikan dukungan pada pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi kesiapsiagaan penanggulangan Bencana pada kelompok rentan dan disabilitas sebagai perspektif pemberdayaan masyarakat.
7) Memberi dukungan pada pemerintah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

Tabel 24. Tugas para pihak dalam penanggulangan bencana di kabupaten Kepulauan Selayar

No	Unsur	Instansi/ Lembaga	Mandat	Tugas	Kepentingan
1	Perguruan Tinggi	UT	Tri Dharma Perguruan Tinggi	Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat terkait penanggulangan bencana	Peningkatan Softskill mahasiswa

				Membentuk, melatih dan membina relawan penanggulangan bencana dari organisasi kemahasiswaan	Peningkatan Softskill mahasiswa
2	Organisasi Masyarakat Sipil	PMI	Pelayanan Kebutuhan Korban Bencana	Memberikan bantuan kemanusiaan berupa layanan kesehatan, obat-obatan, Pertolongan pertama, Manajemen Pengungsian, dll	Pelaksanaan Tugas sesuai prinsip Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional
		BAZNAS	Pelayanan Kebutuhan korban bencana	Memberikan dukungan logistik tanggap darurat bencana	Penyaluran Zakat Umat
		Forum PRB	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Melakukan pelatihan dan upaya kesiapsiagaan bencana di level komunitas, mendukung BPBD melaksanakan penanggulangan bencana	Peningkatan koordinasi dan Evaluasi PB
3	Media Massa	Media cetak, Elektronik dan Media Online	Pemberitaan penanggulangan bencana	Menata dan menyiarkan berita bencana secara tepat, akurat dan objektif	Pemberitaan
				Memberitakan kejadian bencana, jumlah kerusakan, kerugian, dan korban jiwa dari sumber yang resmi	
				Memberitakan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh stakeholder	
4	Dunia Usaha	Perusahan	Bisnis Perikanan dan lainnya	Menyalurkan dana CSR untuk kegiatan penanggulangan bencana, penanganan bencana dan pemulihan	Penyaluran dana CSR
				Pengerahan peralatan dan sumber daya	

				manusia untuk mendukung upaya penanggulangan bencana	
		Supermarket	Bisnis Perdagangan	Penyaluran dana CSR untuk kegiatan penanggulangan bencana, peningkatan skill pegawai untuk kesiapsiagaan bencana	Penyaluran Dana CSR

Sumber: Analisis tim penyusun, 2025

B. Pemaduan Perencanaan Lainnya

Uraian tentang keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Untuk itu, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya. Rencana penanggulangan bencana dapat berkontribusi pada perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

Tabel 25. Pemaduan RPB 2025-2029 Ke Perencanaan Lainnya

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
1.1.1 Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Tangguh bencana 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tangguh bencana	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 16:** Penyusunan kerangka ketangguhan bencana dan perubahan iklim	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		RENAS PB 2025-2029	**Sasaran 2:** Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim **Program 2.4.3:** Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir	
		RPJMD	**Tujuan 8:** Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan dan mitigasi bencana **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim 02.17.08 KP: Penguatan instrumen Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup 02.17.08.04 PRO-P: Peningkatan Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup Usaha dan Kegiatan	
	4. Program Pengelolaan Persampahan 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	**RIPB**	**Kebijakan 6:** Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat berdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik. **Strategi 21:** Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup	1. Pengelolaan Sampah 2. Penyimpanan sementara Limbah B3 3. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		RENAS	**Sasaran 2:** Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
			Indikasi Program 19. Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.	
		RPJMD	**Tujuan 8:** Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan dan mitigasi bencana **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	02.18.01 KP: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan 02.18.01.01 PRO-P: Penguatan regulasi dan kebijakan pengelolaan Sampah 02.18.01.04 PRO-P: Pembinaan dan pengawasan Sistem pengelolaan Sampah 02.18.01.06 PRO-P: Perubahan perilaku untuk pemilahan Sampah 02.18.02.04 PRO-P: Pengelolaan Sampah laut di wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil 02.18.02.04 PRO-P: Penanganan Sampah dari Badan Air	
	6. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik berbasis PRB	**RIPB**	**Misi 5:** Mewujudkan dukungan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan PB yang profesional, transparan, dan akuntabel **Indikasi Program 62.** Penyediaan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan PB kepada masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		RENAS PB	**Sasaran 2:** Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim **Program 2.4.3:** Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir	
		RPJMD	**Tujuan 8:** Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan dan mitigasi bencana **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RPJMN		
	7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 16:** Penyusunan kerangka ketangguhan bencana dan perubahan iklim	1. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		RENAS PB	**Sasaran 2:** Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim **Program 2.4.3:** Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir	
		RPJMD	**Tujuan 8:** Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan dan mitigasi bencana **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN		
1.1.2 Meningkatkan luasan tutupan lahan hijau (vegetasi) alami di kawasan rawan bencana 1.3 Meningkatkan pengelolaan kawasan hijau dan daerah tangkapan air secara berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 16:** Penyusunan kerangka ketangguhan bencana dan perubahan iklim	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 3. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 4. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		RENAS PB	**Sasaran 2:** Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim **Program 2.4.1** Perlindungan Ekosistem Pesisir dengan Solusi Berbasis Alam (*Nature Based Solution*) **Program 2.4.2** Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai **Program 2.2.3** Pengembangan Investasi di Kawasan Strategis Ekonomi Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RPJMD	**Tujuan 8:** Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan dan mitigasi bencana **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim 08.03.02 KP: Pengelolaan Sumber daya air adaptif Iklim 08.03.02.05 PRO-P: Peningkatan Konservasi Sumber daya Air 02.19.03 KP: Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru 02.19.03.01 PRO-P: Rehabilitasi Mangrove 02.19.03.02 PRO-P: Rehabilitasi lamun 02.21.05 KP: Peningkatan Fungsi Sosial Kawasan Hutan 02.21.05.01 PRO-P: Pengembangan Hasil hutan berbasis masyarakat untuk ketahanan pangan, energi dan air 02.21.05.02 PRO-P: Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam pengelolaan Hutan 02.21.06 KP: Perlindungan dan Pengamanan Hutan 02.21.06.02 PRO-P: Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
2.1.1 Meningkatkan ketahanan energi bersih, air dan kemandirian pangan	4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat 6. Program Penanganan Kerawanan Pangan	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 6.** Penyusunan kerangka ketangguhan bencana dan perubahan iklim	1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 4. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 5. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 6. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 7. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		RENAS PB	**Sasaran 2:** Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim **Program 2**.2.3 Pengembangan Investasi di Kawasan Strategis Ekonomi Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	
		RPJMD	**Misi 4 :** Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Pedesaan **Sasaran 14:** Meningkatnya kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan	
		RPJMN	**Program Prioritas** **08.03** **PP: Pembangunan berketahanan Iklim** 08.03.05 KP: Penguatan tata kelola dan Kapasitas untuk Pembangunan Berketahanan Iklim 08.03.05.01 PRO-P: Penyediaan informasi pendukung peningkatan ketahanan iklim 08.03.05.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM untuk Ketahanan Iklim 08.03.05.03 PRO-P: Perlindungan Sosial untuk Ketahanan Iklim **Program Prioritas** **07.15** **Pengendalian Inflasi** 07.15.01 KP: Pengendalian Komponen Inflasi Harga bergejolak 07.15.01.07 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan 07.15.01.08 PRO-P: Sarana Logistik dan Distribusi pangan	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 16:** Penyusunan kerangka ketangguhan bencana dan perubahan iklim	8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan 10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota (Forum Pengurangan Risiko Bencana)
		RENAS PB	**Sasaran 2:** Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim **Program 2.4.3:** Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir	
		RPJMD	**Misi 4 :** Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Pedesaan **Tujuan 4:** Meningkatkan kemandirian pedesaan Sasaran 17: Meningkatnya sumber daya manusia yang mandiri, kreatif dan inovatif	
		RPJMN	08.03.05.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM untuk Ketahanan Iklim 08.03.05.03 PRO-P: Perlindungan Sosial untuk Ketahanan Iklim **Program Prioritas** 07.15 Pengendalian Inflasi	
	9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 10. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 11. Program Perekonomian dan Pembangunan	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 16:** Penyusunan kerangka ketangguhan bencana dan perubahan iklim	1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
		RENAS PB	**Sasaran 2:** Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim **Program 2.4.3:** Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RPJMD	**Misi 4 :** Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Pedesaan **Tujuan 4:** Meningkatkan kemandirian pedesaan Sasaran 17: Meningkatnya sumber daya manusia yang mandiri, kreatif dan inovatif	Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 3. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
		RPJMN	08.03.05.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM untuk Ketahanan Iklim 08.03.05.03 PRO-P: Perlindungan Sosial untuk Ketahanan Iklim **Program Prioritas** **07.15** **Pengendalian Inflasi**	
2.1.2 Meningkatkan integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan Pengurangan Risiko bencana (PRB) dalam dokumen perencanaan daerah	1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 11.** Melakukan pengarusutamaan PRB dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah **Indikasi Program 14**. Meningkatkan kerjasama dan sinkronisasi antar pemerintah daerah, kecamatan, desa/ kelurahan dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dan PRB.	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		RENAS PB	**Sasaran 4:** Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola dan Kolaborasi Multi pihak **Program 4.1.2** Pemaduan KRB dan RPB dalam Rencana Pembangunan	
		RPJMD	**Misi 1:** Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Adaptif **Sasaran 1:** Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif	
		RPJMN	Program Prioritas 08.03 PP: Pembangunan berketahanan Iklim	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
			08.03.05 KP: Penguatan tata kelola dan Kapasitas untuk Pembangunan Berketahanan Iklim	
2.1.3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal dan infrastruktur dalam menghadapi dampak perubahan iklim	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 16:** Penyusunan kerangka ketangguhan bencana dan perubahan iklim	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		RENAS PB	**Sasaran 2:** Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim **Program 2.4.1** Perlindungan Ekosistem Pesisir dengan Solusi Berbasis Alam (*Nature Based Solution*) **Program 2.4.2** Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai **Program 2.2.3** Pengembangan Investasi di Kawasan Strategis Ekonomi Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	
		RPJMD	**Tujuan 8:** Mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan dan mitigasi bencana **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim 08.03.02 KP: Pengelolaan Sumber daya air adaptif Iklim 08.03.02.05 PRO-P: Peningkatan Konservasi Sumber daya Air	
	2. Program Pengendalian dan	**RIPB**	**Misi 1:**	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
	Penanggulangan Bencana Pertanian		Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 16:** Penyusunan kerangka ketangguhan bencana dan perubahan iklim	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		RENAS PB	**Sasaran 4:** Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola dan Kolaborasi Multi pihak **Program 4.5.1** Peningkatan Ketangguhan Berbasis Komunitas	
		RPJMD	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	08.04.04.01 PRO-P: Peningkatan Kemampuan Adaptif Masyarakat dalam menghadapi bencana 08.04.04.02 PRO-P: Pemberdayaan Komunitas Masyarakat untuk Pengurangan Risiko Bencana	
3.1.1 Meningkatkan upaya penanganan tematik kawasan rawan bencana	1. Program Penanggulangan Bencana	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 13:** Pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana di kawasan risiko bencana tinggi dan sedang.	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		RENAS PB	**Sasaran 4:** Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola dan Kolaborasi Multi pihak **Program 4.5.1** Peningkatan Ketangguhan Berbasis Komunitas	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RPJMD	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan 6. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		RPJMN	Program Prioritas 08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang efisien dan Tepat Guna Kegiatan Prioritas: 08.04.04 KP: Peningkatan Resiliensi Masyarakat terhadap Bencana 08.04.04.01 PRO-P: Peningkatan Kemampuan Adaptif Masyarakat dalam menghadapi bencana 08.04.04.02 PRO-P: Pemberdayaan Komunitas Masyarakat untuk Pengurangan Risiko Bencana 08.04.05 KP: Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana 08.04.05.01 PRO-P: Peningkatan keandalan Bangunan berketahanan Bencana 08.04.05.02 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Pengendali daya Rusak Air	
	2.Program Penataan Ruang	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 3:** Menyusun peraturan pelaksanaan untuk perencanaan tata ruang berbasis PRB dan kawasan berisiko.	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
			Indikasi Program 4: Menyusun dan menelaah Rencana Tata Ruang (RTRW, RTRK, RDTRK) dengan mempertimbangkan API, PRB, dan kajian risiko bencana.	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		RENAS PB	**Sasaran 4:** Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola dan Kolaborasi Multi pihak **Program 4.1.2** Pemaduan KRB dan RPB dalam Rencana Pembangunan **Program 2.2.2** Pengembangan Kawasan Perkotaan Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	
		RPJMD	Misi 1:Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Adaptif	
		RPJMN	02.17.07 KP: Penguatan Kelembagaan, Pengendalian, Penertiban dan Penegakan Hukum LHK dan Penataan Ruang 02.17.07.06 PRO-P: Pengendalian Pemanfaatan Ruang 02.17.07.07 PRO-P: Penertiban pemanfaatan Ruang	
	3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 20.** Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan risiko bencana tinggi dan Sedang. **Indikasi Program 21.** Melibatkan pelaku PB dan masyarakat untuk merevitalisasi kearifan lokal dan membangun kerelawanan untuk kesiapsiagaan masyarakat dan PRB.	1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RENAS PB	**Sasaran 1.** Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana. **Program 1.2.1** Penguatan Kesiapsiagaan dan Kesiagaan Menghadapi Kedaruratan Bencana dan Krisis Kesehatan.	
		RPJMD	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	Program Prioritas 08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang efisien dan Tepat Guna Kegiatan Prioritas: 08.04.04 KP: Peningkatan Resiliensi Masyarakat terhadap Bencana 08.04.04.01 PRO-P: Peningkatan Kemampuan Adaptif Masyarakat dalam menghadapi bencana	
	4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		RENAS PB	**Sasaran 1.** Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana. **Program 1.2.1** Penguatan Kesiapsiagaan dan Kesiagaan Menghadapi Kedaruratan Bencana dan Krisis Kesehatan.	
		RPJMD	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RPJMN	08.04.05 KP: Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana 08.04.05.01 PRO-P: Peningkatan keandalan Bangunan berketahanan Bencana 08.04.05.02 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Pengendali daya Rusak Air	
	5. Program Penataan Bangunan Gedung 6. Program Pengembangan Perumahan 7. Program Kawasan Permukiman	**RIPB**	**Sasaran 4:** Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola dan Kolaborasi Multi pihak **Program 2.2.2** Pengembangan Kawasan Perkotaan Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
		RENAS PB	**Sasaran 2:** Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim **Program 2.1.2** Pembangunan Fasilitas Publik Tangguh Bencana	
		RPJMD	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	Program Prioritas 08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang efisien dan Tepat Guna Kegiatan Prioritas: 08.04.04 KP: Peningkatan Resiliensi Masyarakat terhadap Bencana 08.04.04.01 PRO-P: Peningkatan Kemampuan Adaptif Masyarakat dalam menghadapi bencana	
	8. Program Pengelolaan Sumber daya Air	**RIPB**	**Misi 1:**	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
			Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman	Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		RENAS PB	**Sasaran 1.** Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana. **Program 1.2.1** Penguatan Kesiapsiagaan dan Kesiagaan Menghadapi Kedaruratan Bencana dan Krisis Kesehatan.	
		RPJMD	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	08.04.05 KP: Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana 08.04.05.01 PRO-P: Peningkatan keandalan Bangunan berketahanan Bencana 08.04.05.02 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Pengendali daya Rusak Air	
3.1.2 Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 20.** Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan risiko bencana tinggi dan Sedang. **Indikasi Program 21.** Melibatkan pelaku PB dan masyarakat untuk merevitalisasi kearifan lokal dan membangun kerelawanan untuk kesiapsiagaan masyarakat dan PRB.	1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 3. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
		RENAS PB	**Sasaran 1.** Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana.	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
			Program 1.2.1 Penguatan Kesiapsiagaan dan Kesiagaan Menghadapi Kedaruratan Bencana dan Krisis Kesehatan.	
		RPJMD	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	**Program Prioritas** **08.04** **PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang efisien dan Tepat Guna** Kegiatan Prioritas: 08.04.01 KP: Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi 08.04.01.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Penanggulangan Bencana 08.04.01.02 PRO-P: Pengembangan Mitigasi bencana melalui Riset dan Inovasi 08.04.01.03 PRO-P: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana 08.04.01.04 PRO-P: Penyediaan Logistik dan Peralatan sesuai standar penanggulangan Bencana	
3.1.3 Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah	1. Program Penanggulangan Bencana	**RIPB**	**Misi 3:** Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat yang cepat dan andal **Indikasi Program 42.** Menyusun, menelaah dan memutakhirkan perangkat terkait Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) kepada semua pelaku PB **Indikasi Program 47.** Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam penanganan darurat bencana	1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RENAS PB	**Sasaran 1** Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana **Program 1.2.2** Penguatan Sumber Daya Untuk Operasi Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	
		RPJMD	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	**Program Prioritas** **08.04** **PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang efisien dan Tepat Guna** 08.04.02 KP: Peningkatan Layanan Peringatan dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana PRO-Prioritas: 08.04.02.01 PRO-P: Pendampingan Penanganan Kedaruratan Bencana Proyek Prioritas: 08.04.02.02 PRO-P: Pelayanan Peringatan dini Multiancaman Bencana	
	3. Program Penanganan Bencana	**RIPB**	**Misi 3:** Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat yang cepat dan andal **Indikasi Program 42.** Menyusun, menelaah dan memutakhirkan perangkat terkait Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) kepada semua pelaku PB **Indikasi Program 47.** Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam penanganan darurat bencana **Indikasi Program 48.** Meningkatkan kapasitas manajemen, Kerjasama dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
			wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.	
		RENAS PB	**Sasaran 1** Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana **Program 1.3.1** Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Kesiapsiagaan	
		RPJMD	**Misi 7:** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	**Program Prioritas** **08.04** **PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang efisien dan Tepat Guna** 08.04.02 KP: Peningkatan Layanan Peringatan dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana PRO-Prioritas: 08.04.02.01 PRO-P: Pendampingan Penanganan Kedaruratan Bencana Proyek Prioritas: 08.04.02.02 PRO-P: Pelayanan Peringatan dini Multiancaman Bencana	
	4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**RIPB**	**Indikasi Program 28.** Melakukan peningkatan Cakupan Program perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi warga yang tinggal di kawasan risiko bencana tinggi dan Sedang	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		RENAS PB	**Program 2.1.1** Pengembangan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Aman Bencana	
		RPJMD	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RPJMN	PRO-Prioritas: 08.04.02.01 PRO-P: Pendampingan Penanganan Kedaruratan Bencana Proyek Prioritas: 08.04.02.02 PRO-P: Pelayanan Peringatan dini Multiancaman Bencana	
	5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)	**RIPB**	**Misi 3:** Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat yang cepat dan andal **Indikasi Program 47.** Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam penanganan darurat bencana	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		RENAS PB	**Sasaran 1.** Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
		RPJMD	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	PRO-Prioritas: 08.04.02.01 PRO-P: Pendampingan Penanganan Kedaruratan Bencana Proyek Prioritas: 08.04.02.02 PRO-P: Pelayanan Peringatan dini Multiancaman Bencana	
3.1.1 Meningkatkan upaya pemulihan pasca bencana daerah	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Pengembangan Perumahan	**RIPB**	**Kebijakan 6:** Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	1. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
		RENAS PB 2025-2029	**Tujuan:** Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola risiko bencana untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan **Sasaran 3:** Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak Melalui Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi **Program:** 1.1.2 Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
		RPJMD Kabupaten	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
			Sasaran 23: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4. Relokasi Program Kabupaten/Kota 4. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 5. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		RPJMN	**Program Prioritas** **08.04** **PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang efisien dan Tepat Guna** Kegiatan Prioritas: 08.04.03 KP: Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 08.04.03.01 PRO-P: Pemulihan Kehidupan Masyarakat Pasca bencana 08.04.03.02 PRO-P: Pemulihan Ekonomi Terintegrasi Pasca Bencana	
	3. Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 27.** Melakukan peningkatan ketangguhan struktural pada sarana dan prasarana publik penting, terutama sekolah, rumah sakit, puskesmas, Dan bangunan pemerintahan serta bangunan publik lainnya.	Pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam satu daerah kabupaten/kota
		RENAS PB 2025-2029	**Sasaran 2:** Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim **Program 2.3.3** Peningkatan Kualitas Pengelolaan DAS dan Hutan	
		RPJMD Kabupaten	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	08.04.05 KP: Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana	

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
			08.04.05.01 PRO-P: Peningkatan keandalan Bangunan berketahanan Bencana 08.04.05.02 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Pengendali daya Rusak Air	
	4. Program Pengelolaan Arsip	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 38.** Penguatan sistem pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana dalam kesiapsiagaan dan PRB di tingkat pemerintah pusat dan daerah	1. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
		RENAS PB 2025-2029	**Sasaran 1.** Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana **Program 1.4.1** Pembangunan Satu Data Bencana Terintegrasi	
		RPJMD Kabupaten	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	Kegiatan Prioritas: 08.04.03 KP: Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 08.04.03.01 PRO-P: Pemulihan Kehidupan Masyarakat Pasca bencana 08.04.03.02 PRO-P: Pemulihan Ekonomi Terintegrasi Pasca Bencana	
	5. Program Pencatatan Sipil	**RIPB**	**Misi 1:** Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman **Indikasi Program 38.** Penguatan sistem pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana dalam kesiapsiagaan dan PRB di tingkat pemerintah pusat dan daerah	1. Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sasaran	Program	Kontribusi RPB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		RENAS PB 2025-2029	**Sasaran 1.** Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana **Program 1.4.1** Pembangunan Satu Data Bencana Terintegrasi	
		RPJMD Kabupaten	**Misi 7 :** Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan **Sasaran 23**: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		RPJMN	Kegiatan Prioritas: 08.04.03 KP: Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	

Sumber: analisis tim penyusun, 2025

C. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

RPB Tahun 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen yang membutuhkan proses penyusunan, penetapan, termasuk evaluasi dan pengendalian untuk membentuk siklus perencanaan yang utuh. Kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi RPB Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memastikan dan menjamin terlaksananya aksi-aksi yang direncanakan dan tercapainya target output, sasaran program, dan target sasaran yang ditetapkan. Hasil kegiatan tersebut dapat memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada berbagai pihak dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat pula digunakan sebagai masukan kebijakan dalam rangka perbaikan RPB Tahun 2025-2029 maupun penyusunan RPB berikutnya.

1. Pemantauan

Pasal 6 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar "RPB ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana". Pemantauan berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. Selain dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensinya, kinerja program pengurangan risiko bencana yang tercantum dalam RPB Kabupaten Kepulauan Selayar diukur juga berdasarkan kemanfaatan serta keberlanjutannya.

Pemantauan merupakan langkah awal dari evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPB Tahun 2025-2029. Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RPB Tahun 2025-2029 dan menjadi kunci utama dalam dalam pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan. Pemantauan pelaksanaan RPB Tahun 2025-2029 dilaksanakan setiap tahun dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebelum pelaksanaan kegiatan (tahun T-1) dan saat pelaksanaan kegiatan.

a. Pra Pelaksanaan Kegiatan

Pemantauan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan pada triwulan ke-empat (TW-IV) di tahun T-1 terhadap perencanaan kegiatan dalam rencana aksi RPB Tahun 2025-2029. Pemantauan dilakukan dengan meninjau Rencana Kerja (Renja) OPD/lembaga Penanggung Jawab untuk memetakan rencana pelaksanaan kegiatan dalam rencana aksi RPB Tahun 2025-2029. Luaran dari kegiatan pemantauan saat pra pelaksanaan kegiatan ialah peta

kegiatan RPB Tahun 2025-2029 dalam Rencana Kerja (Renja) OPD/Lembaga yang meliputi rencana bentuk pelaksanaan kegiatan, target output, alokasi anggaran, dan unit kerja pelaksana.

b. Saat Pelaksanaan

Pemantauan saat pelaksanaan kegiatan dilakukan sepanjang tahun berjalan. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan rencana aksi RPB Tahun 2025-2029 di OPD/Lembaga Penanggung Jawab berdasarkan pemetaan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Luaran kegiatan pemantauan ini meliputi: (a) penyempurnaan peta kegiatan RPB Tahun 2025-2029 dalam Rencana Kerja (Renja) OPD/Lembaga; (b) rekapitulasi kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan (c) rekomendasi pelaksanaan kegiatan. Untuk mendapatkan hasil luaran yang diharapkan, dilaksanakan forum koordinasi dengan OPD/Lembaga Penanggung Jawab paling lambat pada triwulan ke-dua (TW-II) di tahun berjalan (tahun-T).

Hasil dari pemantauan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Kerangka pemantauan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana (RPB) 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 26. Kerangka Pemantauan Pelaksanaan RPB 2025-2029

Waktu	Materi Pemantauan/ Evaluasi	Kriteria/Indikator/ Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi
Tahunan	- Pemaduan para pihak - Pemaduan perencanaan lainnya - Pencapaian hasil	Capaian Renaksi tahunan	- BPBD - FORKOPIMDA
Paruh Waktu	- Review RPB - Pencapaian sasaran	- Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi - Rencana Tindak Lanjut	- BPBD - FORKOPIMDA
Akhir Periode	- Pencapaian sasaran - Pencapaian tujuan	- Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi - Rencana Tindak Lanjut - Pembelajaran	- BPBD - FORKOPIMDA

Sumber: BNPB dan Hasil Analisis Tim Penyusun, 2025

2. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan perencanaan RAD-PRB dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Komponen dalam pengendalian adalah meliputi: bagaimana keterpaduan para pihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode tahunan, paruh waktu dan akhir periode. Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Pemantauan paruh waktu dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti di bawah ini. Tabel kerangka kerja pengendalian pelaksanaan RPB 2025-2029 tercantum dalam Tabel 26, sedangkan tabel kerangka kerja pengendalian tahunan tercantum dalam Tabel 27 berikut:

Tabel 27. Kerangka Kerja Pengendalian Pelaksanaan RPB 2025-2029

Waktu Pemantauan	Hal yang Dipantau	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana
Tahunan	- Penyusunan baseline - Legislasi (payung hukum) - Integrasi ke OPD lain - Realisasi kegiatan - Realisasi program/ kegiatan tahun berjalan - Peraturan/ pedoman/ kebijakan	- Ketersediaan baseline data - Kemudahan, percepatan, dukungan, dan pencapaian sasaran - Indikator kegiatan dan - input kegiatan - Indikator program/kegiatan - Relevansi peraturan/pedoman	- Dokumentasi dan/atau laporan - Dokumen legislasi (payung hukum) - Laporan pemantauan - Dokumentasi dan/atau laporan - Dokumen peraturan/	Penyusunan pokja - FGD Kajian Pustaka	- BPBD - FORKOPIMDA

Waktu Pemantauan	Hal yang Dipantau	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana
	daerah/OPD yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi	/kebijakan daerah/OPD untuk mendukung program/ pencapaian sasaran	pedoman/ kebijakan daerah yang relevan		
Paruh Waktu	Review Dokumen RPB	- Ada/tidaknya kejadian bencana besar -perlu dilakukan penyesuaian - Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah (perlu dilakukan penyelesaian)	- Laporan review RPB	- FGD - Kajian pustaka	- BPBD - FORKOPIMDA
Akhir Periode	Pencapaian tujuan RPB	- Ketersediaan endline data - Relevansi strategi/arah kebijakan dan program - Sinergi program/kegiatan urusan/bidang tata ruang, KLHS, dll. - Efektivitas, efisiensi, dan rencana aksi PRB	- Dokumentasi dan/atau laporan - Laporan evaluasi	- Focuss Group Discussion - Kajian Pustaka	- BPBD - FORKOPIMDA

Sumber: BNPB dan hasil analisis tim penyusun, 2025

Tabel 28. Format Pemantauan Tahunan Pelaksanaan RPB 2025-2029

No	Materi Pemantauan	Kriteria/ Indikator Keluaran	Target (5 Th)	Capaian Tahun Ke					Catatan
				I	II	III	IV	V	

Sumber: Panduan penulisan RPB, BNPB, 2021

3. Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang benar, relevan, dan peka. Evaluasi RPB adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan mekanisme peninjauan RPB. Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi RPB dapat dilakukan melalui:

a. Penilaian mandiri (*self-assessment*); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baikinstitusi pemerintah maupun non pemerintah
b. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dilakukan sebagai masukan proses atau hasil pengendalian dan evaluasi secara tertulis dari berbagaidokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi dalam RPB
c. Penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dan aksi dalam RPB di berbagai lokasi penyelenggaraannya.

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB. Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk pelaksanaan evaluasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar berkoordinasi dengan FORKOPIMDA untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan RPB tahun 2025-2029. Lingkup evaluasi RPB Tahun 2025-2029 tersebut disesuaikan dengan periode waktu evaluasi RPB Tahun 2025-2029 yang terbagi menjadi 3 tahapan yaitu evaluasi tahunan, evaluasi paruh waktu, dan evaluasi akhir. Tahapan evaluasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Evaluasi Tahunan

Evaluasi tahunan dilakukan pasca-pelaksanaan Renja OPD/Lembaga untuk menilai ketercapaian target indikator kegiatan (output) di setiap

kegiatan dalam rencana aksi RPB Tahun 2025-2029. Evaluasi tahunan juga meliputi analisis permasalahan dan hambatan pelaksanaan dan pencapaian target indikator kegiatan. Evaluasi tahunan dilakukan maksimal hingga minggu terakhir di TW II tahun berikutnya (tahun T+1) dengan luaran berupa:

1) Peta kegiatan RPB dalam Renja OPD/Lembaga (target output kegiatan, alokasi anggaran, UKE pelaksana);
2) Gap analysis capaian indikator output kegiatan RPB; dan
3) Rekomendasi pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

b. Evaluasi Paruh Waktu

Evaluasi paruh waktu RPB Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menilai pencapaian target indikator kegiatan, sasaran program, dan target indikator sasaran RPB Tahun 2025-2029. Evaluasi paruh waktu juga dilakukan untuk menganalisis permasalahan dan hambatan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan serta pencapaian sasaran RPB Tahun 2025-2029. Evaluasi paruh waktu dilakukan di tahun ketiga RPB Tahun 2025-2029 dan digunakan untuk bahan masukan pelaksanaan kegiatan di tahun ke-4 dan ke-5, bahan pengendalian perbaikan RPB Tahun 2025-2029, dan bahan masukan penyusunan RPB periode berikutnya. Luaran kegiatan evaluasi paruh waktu, diantaranya:

1) Gap analysis capaian indikator sasaran dan indikator kegiatan RPB Tahun 2025-2029
2) Pencapaian sasaran program RPB Tahun 2025-2029
3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rencana aksi RPB Tahun 2025-2029
4) Rekomendasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya
5) Rekomendasi perbaikan RPB Tahun 2025-2029 (bila perlu)

c. Evaluasi Akhir

Evaluasi Akhir RPB Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menilai kinerja capaian kegiatan, sasaran program, dan sasaran RPB Tahun 2025-2029 di akhir tahun pelaksanaan RPB Tahun 2025-2029. Dalam evaluasi Akhir RPB Tahun 2025-2029 juga dilakukan analisis permasalahan dan hambatan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan serta pencapaian sasaran RPB Tahun 2025-2029. Evaluasi akhir dilakukan pasca pelaksanaan kegiatan di tahun ke-5 (lima) RPB Tahun 2025-2029. dan digunakan untuk bahan masukan dan/atau perbaikan perencanaan

penanggulangan bencana periode berikutnya. Luaran kegiatan Evaluasi Akhir RPB Tahun 2025-2029, diantaranya:

1) Gap analysis capaian indikator sasaran dan indikator kegiatan RPB
2) Pencapaian sasaran program RPB Tahun 2025-2029;
3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rencana aksi RPB Tahun 2025-2029;
4) Rekomendasi perencanaan RPB periode selanjutnya

Tabel evaluasi RPB Tahun 2025-2029 tercantum dalam tabel 28, sedangkan tabel hasil evaluasi program RPB Tahun 2025-2029 tercantum dalam tabel 29 sebagai berikut:

Tabel 29. Kerangka Kerja Evaluasi Pelaksanaan RPB 2025-2029

Waktu Evaluasi	Kriteria/Indikator Evaluasi	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana
Evaluasi Tahunan **(TW-II)**	• Pencapaian target indikator kegiatan, sasaran program, dan target indikator sasaran RPB • analisis permasalahan dan hambatan pelaksanaan dan pencapaian target indikator kegiatan	Laporan dan dokumentasi kegiatan	Kajian pustaka, *Focussed Group Discussion*	- BPBD - FORKOPIMDA
Evaluasi Paruh Waktu **(Tahun ke-3)**	• Pencapaian target indikator kegiatan, sasaran program, dan target indikator sasaran RPB Tahun 2025-2029. • Analisis permasalahan dan hambatan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan serta pencapaian sasaran RPB Tahun 2025-2029	Laporan dan dokumentasi kegiatan	Kajian pustaka, *Focussed Group Discussion*	- BPBD - FORKOPIMDA
Evaluasi Akhir **(Tahun ke-5)**	• Pencapaian target indikator kegiatan, sasaran program, dan target indikator sasaran RPB Tahun 2025-2029. • Analisis permasalahan dan hambatan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan serta pencapaian sasaran RPB Tahun 2025-2029	Laporan dan dokumentasi kegiatan	Kajian pustaka, *Focussed Group Discussion*	- BPBD - FORKOPIMDA

Sumber: RENAS PB 2025-2029 yang disesuaikan

Tabel 30. Format Penyajian Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPB 2025-2029

No.	Indikator Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran

Sumber: Panduan penulisan RPB, BNPB, 2021

BAB VII. PENUTUP

Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana. Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik, perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan upaya bersama atau melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama dalam seluruh siklus tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana, baik di provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. RPB menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. RPB sebagai bentuk pelayanan minimal yang berhak diterima oleh masyarakat.

Penyusunan RPB Kabupaten Kepulauan Selayar melibatkan stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan bencana, yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk peraturan bupati yang akan mengikat stakeholders kebencanaan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar. RPB Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan di sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar dan Rencana Strategis (renja) OPD.

DAFTAR PUSTAKA

1. _.2018. Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. _.2019. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 tahun 2019 tentang Penanggulangan bencana daerah
3. _.2020. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024
4. _.2021. Pedoman penyusunan dokumen rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. _. 2023. Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (71 Indikator). Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. _. 2023. Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar. Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2023
7. _. 2025. Kepulauan Selayar Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. _.2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
9. _.2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
10. -.2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). BAPPENAS.
11. _2025. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB). BNPB

LAMPIRAN

A. Gambaran Lokasi Aksi PRB terhadap Prioritas Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Gambaran Lokasi Aksi PRB terhadap bencana Cuaca Ekstrim

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD
1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai	■	■	■	■	■	Semua kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD
1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD
1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DP3AP2KB
2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan Perencanaan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DP3AP2KB
2.14.04.2.01.0021 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DP3AP2KB
3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05.2.02.0001 Perlindungan Cagar Budaya	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	■	■	■	■	■	Semua kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

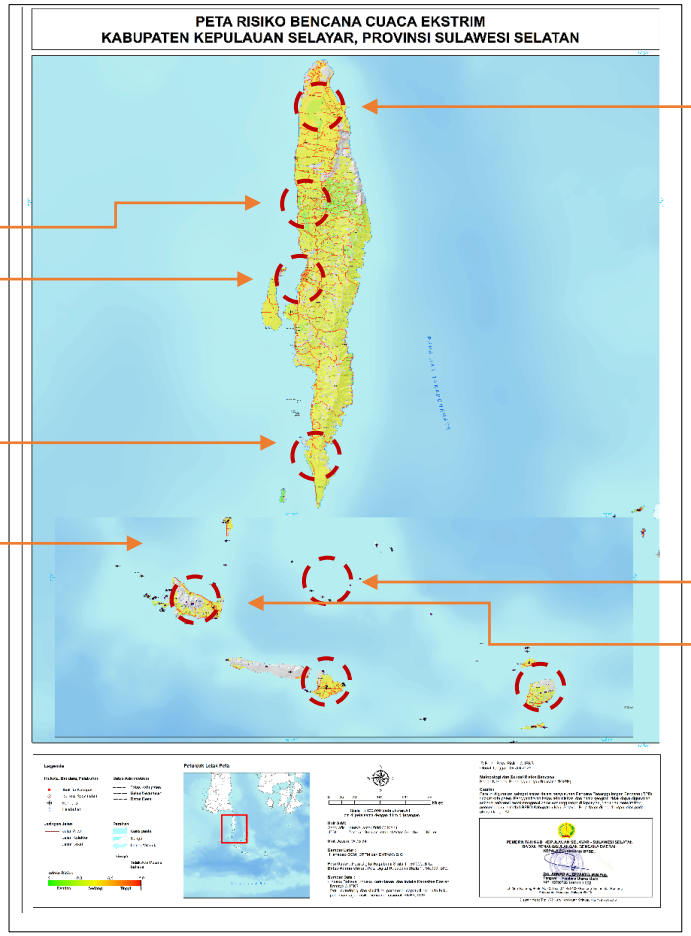

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota			■	■	■	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG
1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	■					Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar
1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar
1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan (Dinkes)
1.02.03.2.03.0001 Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan (Dinkes)
2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
2.14.02.2.02.0005 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DP3AP2KB
1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

2. Gambaran Lokasi Aksi PRB terhadap bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
3.25.03.2,02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Perikanan
1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	■					Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1.03.02.2.01.0074 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD
1.03.02.2.01.0087 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD
1.03.02.2.01.0092 Peningkatan Breakwater	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD
1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater Pembangunan Breakwater	■	■	■	■	■	Kec. Buki Kec. Pasimarannu Kec. Bontomatene	DPUTR, BPBD
1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	■	■	■	■	■	Kec. Bontoharu Kec. Bontosikuyu Kec. Bontomatene Kec. Buki Kec. Takabonerate Kec. Pasimanggu Timur Kec. Bontomanai Kec. Pasilambena Kec. Pasimasunggu	DPUTR, BPBD
1.03.02.2.01.0105 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD
1.03.02.2.01.0106 Rehabilitasi Breakwater	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD

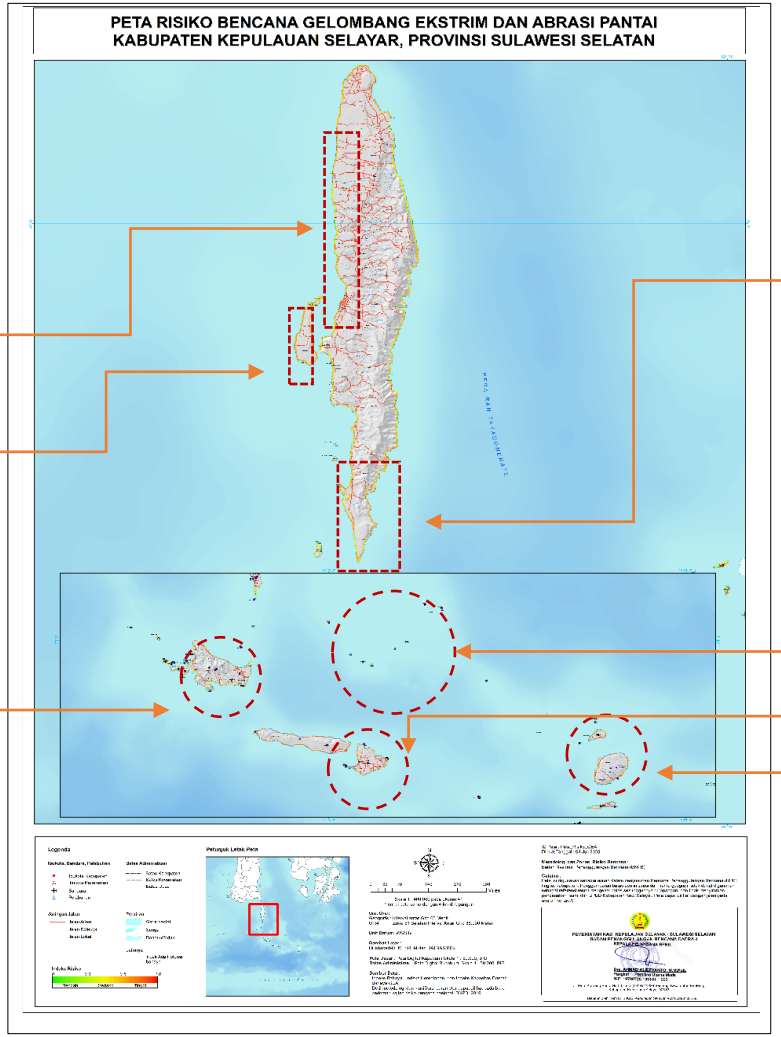

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05.2.02.0001 Perlindungan Cagar Budaya	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
2.12.03.2.02.0010 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD

3. Gambaran Lokasi Aksi PRB terhadap Bencana Banjir

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		■	■	■	■	Kec.Benteng	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	■	■	■	■	■	Kec.Benteng	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	■	■	■	■	■	Kec.Benteng	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	■	■	■	■	■	Kec.Benteng	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Perikanan
3.27.04.2.01.0005 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Perikanan
3.27.04.2.01.0007 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis		■				Semua Kecamatan	Dinas Perikanan
2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2.11.05.2.01.0003 Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2.11.05.2.01.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.03.06.2.01.00022 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD
1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai	■	■	■	■	■	Semua kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)

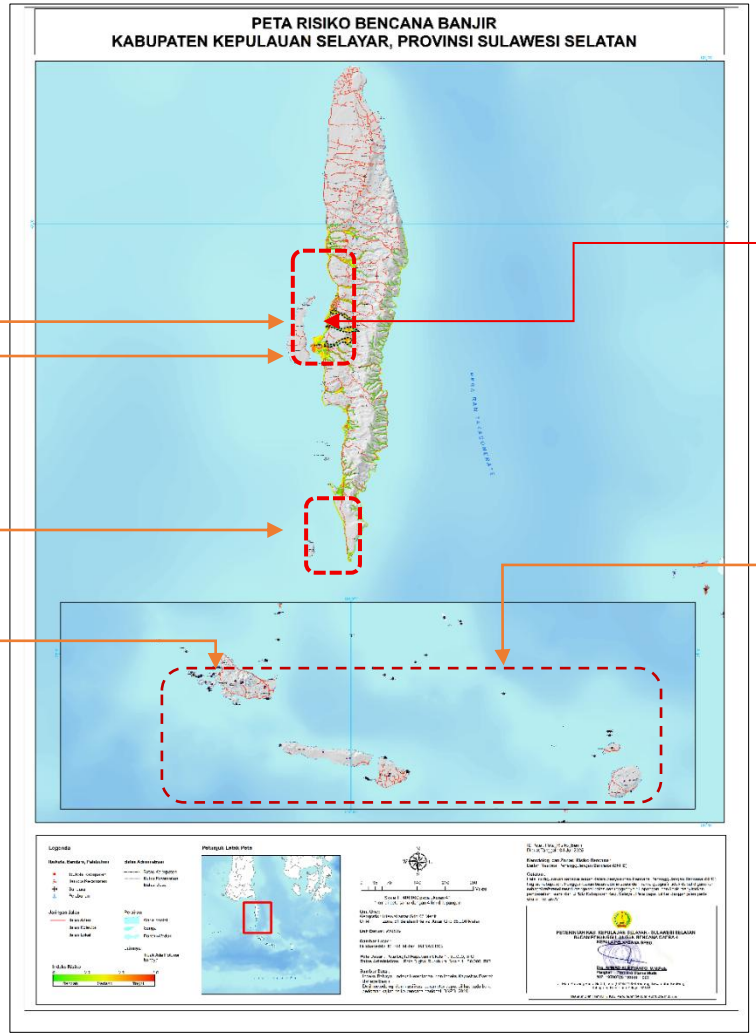

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai	■	■	■	■	■	Kec. Bontoharu Kec. Bontosikuyu Kec. Bontomatene Kec. Buki Kec. Pasilanmbena Kec. Pasimasunggu	DPUTR, BPBD
1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non-Alam Epidemi/Wabah Penyakit	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2.11.05.2.01.0003 Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2.11.05.2.01.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2.11.05.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2.11.05.2.02.0003 Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD
1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD
1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD
1.03.02.2.01.0103 Peningkatan Tanggul Sungai	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD

4. Gambaran Lokasi Aksi PRB terhadap Bencana Kekeringan

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	■	■	■	■		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.03.2.01.0009 Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	■					Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM
3.25.05.2.01.0004 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Perikanan
4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Setda
4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Setda
4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Setda
2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DP3AP2KB
2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Perhubungan (Dishub)

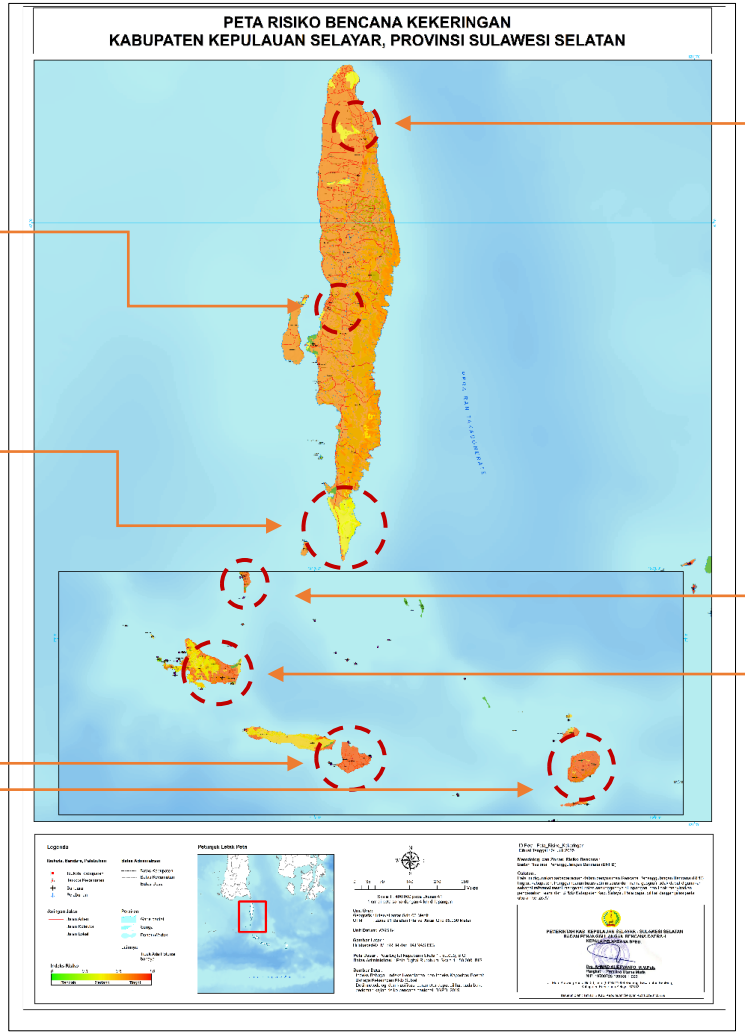

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	■					Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.04.2.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.04.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.04.2.01.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
2.09.04.2.01.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	■					Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD, BPBD
3.27.04.2.01.0005 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Perikanan
3.27.04.2.01.0007 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis		■				Semua Kecamatan	Dinas Perikanan

5. Gambaran Lokasi Aksi PRB terhadap Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

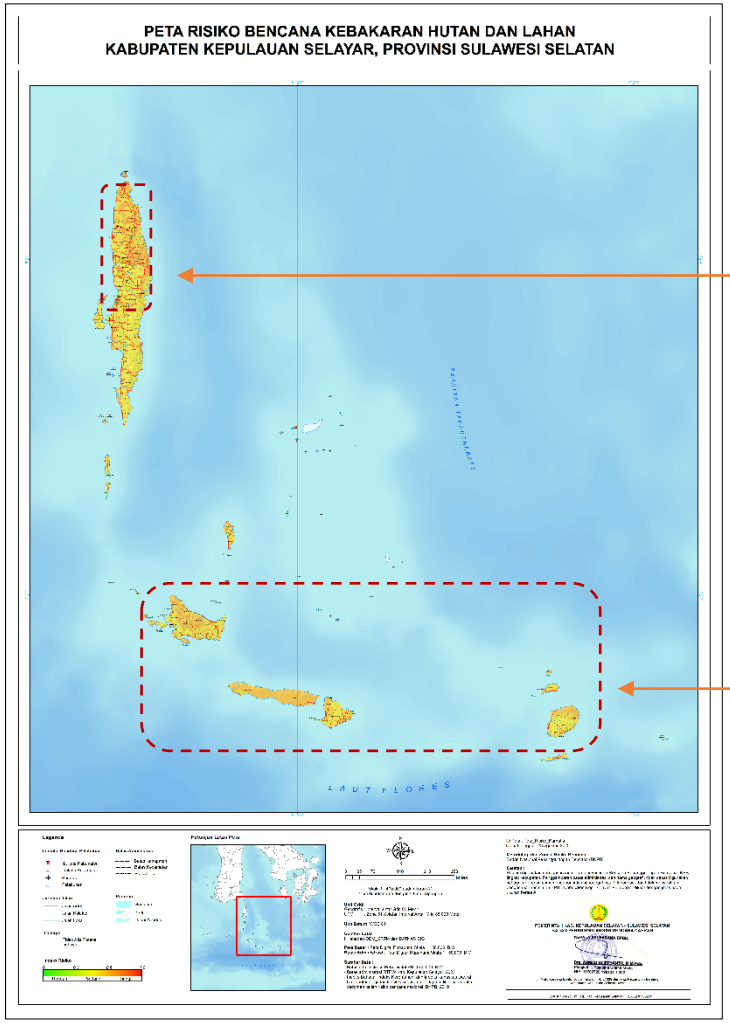

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
1.05.04.1.01.0006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar
1.05.04.1.01.0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar
1.05.04.1.01.0021 Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar

6. Gambaran Lokasi Aksi PRB terhadap Bencana Tsunami

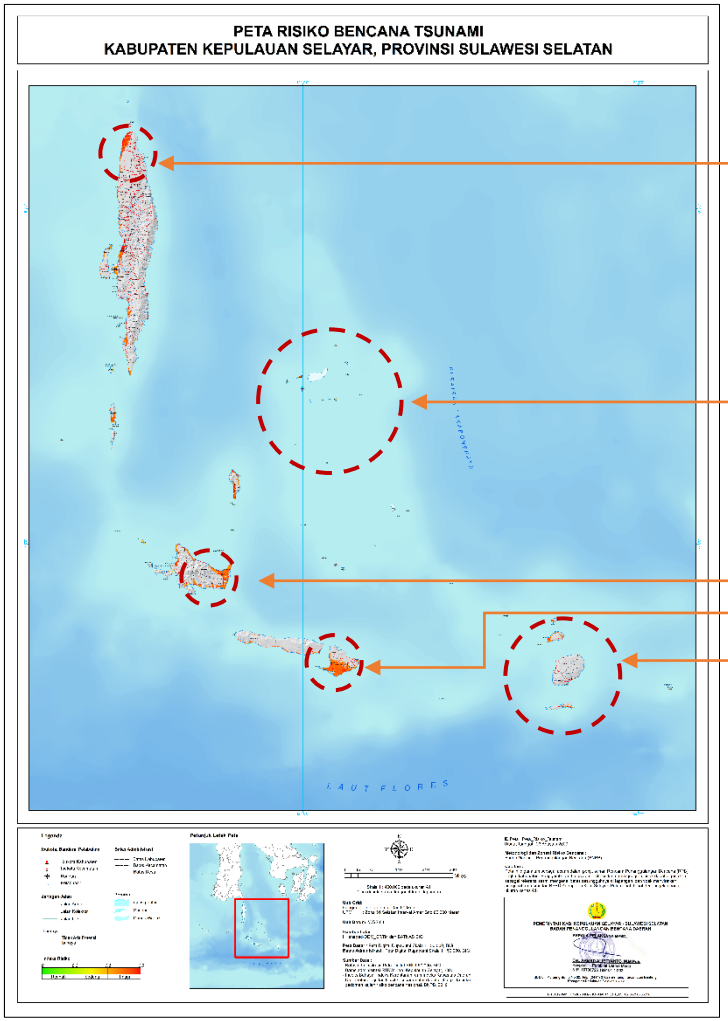

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban	■		■	■		Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		■		■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.030007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.030012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		■	■			Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD

7. Gambaran Lokasi Aksi PRB terhadap Bencana Tanah Longsor

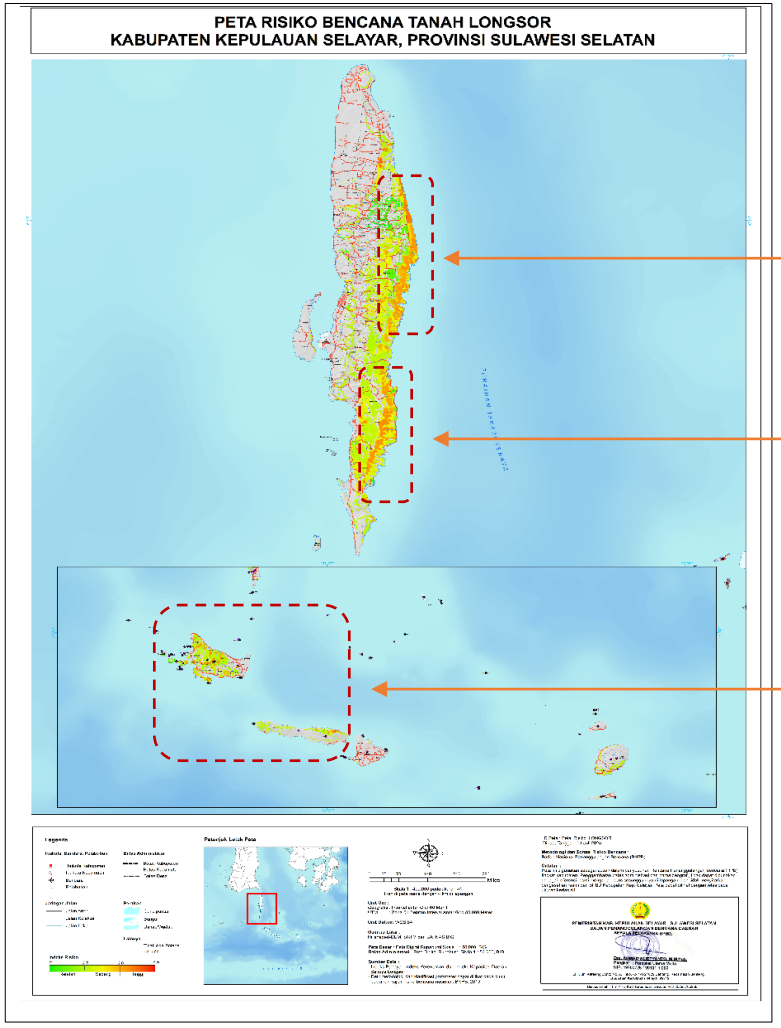

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD
1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	■	■	■	■	■	Kec. Bontomanai Kec. Bontomatene	DPUTR, BPBD
1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	DPUTR, BPBD

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban	■		■	■		Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		■		■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.030007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.030012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		■	■			Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	■					Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD

8. Gambaran Lokasi Aksi PRB terhadap Bencana Gempa Bumi

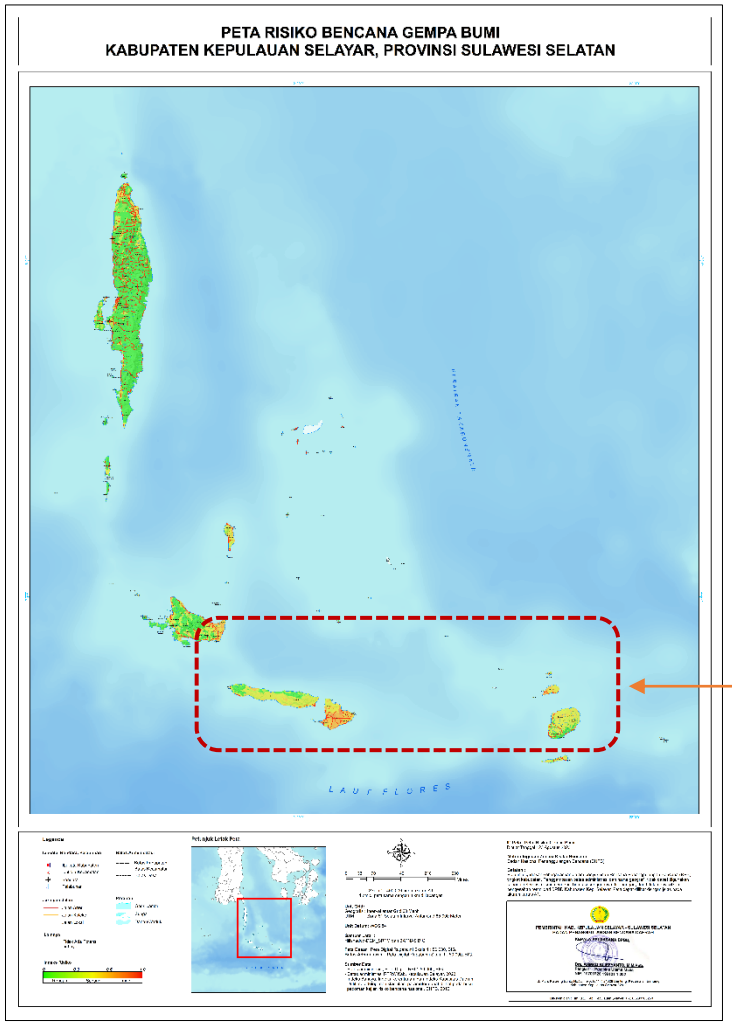

Nomenklatur Sub Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Lokasi	Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029		
2.11.05.2.01.0003 Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban	■		■	■		Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		■		■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.030007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.030012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		■	■			Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD
1.04.02.2.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	■	■	■	■	■	Semua Kecamatan	Disperkim, BPBD

B. Matriks Lengkap Rencana aksi PB

Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target					Satuan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu	Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							2025	2026	2027	2028	2029							
Isu Strategis 1: Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam																		
Tujuan: Mewujudkan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan																		
Sasaran 1.1: Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup																		
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat yang telah dibina dan telah melakukan gerakan peduli lingkungan hidup	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga/kelompok /lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	0	1	1	0	1	dokumen	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Kec.Benteng	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	50	50	50	50	50	keluarga	2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat		Kec.Benteng	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat	20	20	20	20	20	lembaga	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat		Kec.Benteng	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase area pelayanan pengelolaan sampah	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	20	20	20	20	20	kelompok	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp3,196,005,931.00	Kec.Benteng	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
		2.14.04			2.14.04.2.01		1	1	1	1	1	laporan	2.14.04.2.01.0008					

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kegiatan pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga terkait dampak perubahan iklim	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)							Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50	50	50	50	50	keluarga	2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	50	50	50	50	50	orang	2.14.04.2.01.0021 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik terkait risiko bencana kabupaten	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Disemintasi Informasi	70	80	90	100	100	persentase	2.16.02.2.01.0020 Disemintasi Informasi		Semua Kecamatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian (Diskominfo SP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan perpustakaan tingkat darah (%)	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	1	1	1	1	1	dokumen	2.23.02.2.02.0015 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi		Kecamatan Benteng	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

					Kabupaten/ Kota												
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota (%)	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	0	1	1	0	0	perpustakaan	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Semua Kecamatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30	30	30	30	30	orang	3.25.03.2,02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Rp864,674,858.00	Semua Kecamatan	Dinas Perikanan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular	3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	3	3	3	3	3	laporan	3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Rp109,499,379.00	Semua Kecamatan	Dinas Perikanan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	30	30	30	30	30	orang	3.27.04.2.01.0005 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis		Semua Kecamatan	Dinas Perikanan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	0	1	0	0	0	dokumen	3.27.04.2.01.0007 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis		Semua Kecamatan	Dinas Perikanan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Cakupan penyimpanan sementara limbah B3	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	4	4	4	4	4	laporan	2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp1,692,840.00	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							4	4	4	4	4	unit	2.11.05.2.01.0003					

						Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota							Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	unit	2.11.05.2.01.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengumpulan limbah B3	2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4	4	4	4	4	dokumen	2.11.05.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	4	4	4	4	4	dokumen	2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	4	4	4	4	4	unit	2.11.05.2.02.0003 Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di kabupaten/kota	2	2	2	2	2	usaha	2.11.05.2.02.0004 Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Limbah B3 di kabupaten/kota	4	4	4	4	4	unit	2.11.05.2.02.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50	50	50	50	50	keluarga	7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Sasaran 1.2: Meningkatkan luasan tutupan lahan hijau (vegetasi) di kawasan rawan bencana																		
		2.11.04			2.11.04.2.01		0	1	0	0	0	dokumen	2.11.04.2.01.0001					

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertangani dengan baik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp650,755,759.00	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100	100	100	100	100	Ha	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	10	10	10	10	10	unit	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	10	10	10	10	10	unit	2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan	20	20	20	20	20	unit	2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati (%)	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat kabupaten/kota	2	2	2	2	2	dokumen	2.11.04.2.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Sasaran 1.3: Meningkatkan pengelolaan kawasan hijau dan daerah tangkapan air secara berkelanjutan																	
Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Permukiman di Daerah Rawan Bencana	Persentase pengendalian dan pengawasan penataan permukiman di daerah rawan bencana	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1	1	1	1	1	dokumen	1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Rp6,244,561,921.00	Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1	1	1	1	1	Dokumen	1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1	1	1	1	1	dokumen	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Isu Strategis 2: Perubahan iklim (climate change) meningkatkan kerentanan masyarakat di daerah rawan bencana																	
Tujuan: Mewujudkan ketahanan (resiliensi) masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim																	
Sasaran 2.1: Meningkatkan ketahanan energi bersih, air, dan kemandirian pangan																	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	5	5	5	5	5	unit	2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	Rp5,426,320.00	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	2	2	2	2	2	laporan	2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	unit	2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan utama	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan penyediaan dan penyaluran pangan utama	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	4	4	4	4	laporan	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp50,282,800.00	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							4	4	4	4	4	laporan	2.09.03.2.01.0003					

						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30	30	30	30	30	keluarga	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2	2	2	2	2	laporan	2.09.03.2.01.0009 Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	4	4	4	4	4	laporan	2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan cadangan pangan	2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1	0	0	0	0	dokumen	2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5000	5000	5000	5000	5000	ton	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5000	5000	5000	5000	5000	ton	2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							5000	5000	5000	5000	5000	ton	2.09.03.2.02.0005					

						Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	4	4	4	4	laporan	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1	0	0	0	0	dokumen	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase kerawanan pangan	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	dokumen	2.09.04.2.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	laporan	2.09.04.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4	4	4	4	4	dokumen	2.09.04.2.01.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	dokumen	2.09.04.2.01.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	4	4	4	4	laporan	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30	30	30	30	30	keluarga	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Persentase pengelolaan desa/kelurahan tangguh bencana	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa terkait perubahan iklim	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4	4	4	4	4	dokumen	2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD, BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas menjadi Usaha Kecil dan/atau Usaha Menengah	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pemberdayaan UMKM dalam menghadapi perubahan iklim	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	10	10	10	10	10	unit usaha	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
		3.25.05			3.25.05.2.01		10	10	10	10	10		3.25.05.2.01.0004					

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan sumber daya perikanan dalam menghadapi perubahan iklim	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota						pelaku usaha	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perikanan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan sumber daya alam yang diimplementasikan	4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan kebijakan sumber daya alam terkait perubahan iklim	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4	4	4	4	4	dokumen	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp2,359,840,739.00	Semua Kecamatan	Setda	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4	4	4	4	4	dokumen	4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Semua Kecamatan	Setda	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	4	4	4	4	4	dokumen	4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Semua Kecamatan	Setda	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Sasaran 2.2: Meningkatkan integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam dokumen perencanaan daerah																	
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	5.01.02 Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan perencanaan dan pendanaan terkait perubahan iklim	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1	1	1	1	1	dokumen	5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp50,000,000.00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	berita acara	5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp50,000,000.00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							4	2	2	2	2	dokumen	5.01.02.2.01.0007					

						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp50,000,000.00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah terkait perubahan iklim	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	laporan	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp50,000,000.00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	5	5	5	5	5	kerja sama	5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Rp50,000,000.00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	4	4	4	4	laporan	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp50,000,000.00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan koordinasi perencanaan bidang pemerintah dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4	2	2	2	2	dokumen	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Rp50,000,000.00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2	2	2	2	2	laporan	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp50,000,000.00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							4	2	2	2	2	dokumen	5.01.03.2.01.0005					

						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp50,000,000.00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	2	2	2	2	laporan	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp50,000,000.00	Semua OPD dan Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Sasaran 2.3: Meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal dan infrastruktur dalam menghadapi dampak perubahan iklim																	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam menghadapi dampak perubahan iklim	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dalam menghadapi perubahan iklim	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50	50	50	50	50	orang	2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera terkait dampak perubahan iklim	2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga terkait perubahan iklim	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4	4	4	4	4	laporan	2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	50	50	50	50	50	keluarga	2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							4	4	4	4	4		2.14.04.2.01.0016					

						Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)						laporan/ dokumen	Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi perubahan iklim	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4	4	4	4	4	laporan	2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan terkait perubahan iklim	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20	20	20	20	20	lembaga kemasyarakatan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	20	20	20	20	20	lembaga kemasyarakatan	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	10	10	10	10	10	unit	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
		2.19.02			2.19.02.2.02		50	50	50	50	50	orang	2.19.02.2.02.0004					

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota terkait perubahan iklim	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda tingkat Kabupaten/Kota						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Rp319,466,330.00	Semua Kecamatan	Dinas Pendidikan (Disdik)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terkait perubahan iklim	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	100	100	100	100	100	Ha	3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Isu Strategis 3: Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang belum optimal																	
Tujuan: Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusi dan kolaboratif																	
Sasaran 3.1: Meningkatkan upaya penanganan tematik kawasan rawan bencana																	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Sosialisasi, Komunikasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per Jenis Ancaman Bencana)	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per Jenis Ancaman Bencana)	Rp2,534,927,799.00	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	0	1	0	0	dokumen	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	kegiatan	1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							30	30	30	30	30	keluarga	1.05.03.2.02.0019					

						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	1	1	1	1	kawasan	1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	0	1	0	0	0	dokumen	1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	0rang	1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	1	0	1	1	dokumen	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	5	5	5	5	5	dokumen	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							4	4	4	4	4	dokumen	1.05.03.2.04.0004					

						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan							Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	0	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	dokumen	1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Cakupan pengelolaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	100	100	100	100	100	orang	1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan (Disdik)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	100	100	100	100	100	orang	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan (Disdik)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	1.01.03.3.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sesuai Karakteristik dan Budaya Daerah bagi Pendidikan Dasar (Satuan Pendidikan Aman Bencana) di daerah rawan bencana	100	100	100	100	100	orang	1.01.03.3.01.0005 Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sesuai Karakteristik dan Budaya Daerah bagi Pendidikan Dasar		Semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan (Disdik)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
		7.01.03			7.01.03.2.06		30	30	30	30	30	Keluarga	7.01.03.2.06.0010					

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30	30	30	30	30	keluarga	7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30	30	30	30	30	keluarga	7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana (KRB)	Persentase kesesuaian penataan ruang berbasis risiko bencana	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	Persentase penetapan rencana tata ruang daerah	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2	2	2	2	2	dokumen	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	dokumen	1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	dokumen	1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	dokumen	1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							1	0	0	0	0	dokumen	1.03.12.2.02.0007					

						Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota							Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	50	50	50	50	50	kegiatan	1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	2	2	2	2	2	dokumen	1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	2	2	2	2	2	dokumen	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		Semua kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Peningkatan Sistem Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Cakupan peningkatan sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Cakupan pemetaan rawan bencana kebakaran	1.05.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4	4	4	4	4	dokumen	1.05.1.01.0024 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp186,461,219.00	Semua OPD dan Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1	1	1	1	dokumen	7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Semua OPD dan Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	1	1	1	dokumen	7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Semua OPD dan Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							2	2	2	2	2	laporan	7.01.06.2.01.0017					

						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	2	2	2	2	2	laporan	7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Persentase pengelolaan desa/kelurahan tangguh bencana	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa di kawasan rawan bencana	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat	5	5	5	5	5	lembaga	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat	3	3	3	3	3	unit	2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
		2.08.04			2.08.04.2.01		4	4	4	4	4	dokumen	2.08.04.2.01.0002	Rp1,453,590.00				

Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di kawasan rawan bencana	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	dokumen	2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1,453,590.00	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan e-government di kawasan rawan bencana	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	2	2	2	2	2	dokumen	2.16.03.2.02.0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Rp247,602,942.00	Semua OPD dan Kecamatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian (Diskominfo SP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	2	2	2	2	2	layanan	2.16.03.2.02.0025 Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi		Semua OPD dan Kecamatan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian (Diskominfo SP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pengunjung perpustakaan	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pembudayaan gemar membaca di kawasan rawan bencana	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	5	5	5	5	5	lokus	2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		Semua OPD dan Kecamatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
		3.26.02			3.26.02.2.01		50	50	50	50	50	orang	3.26.02.2.01.0008					

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Persentase daya tarik wisata dan destinasi pariwisata yang dikembangkan berbasis PRB	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan daya tarik wisata di kawasan rawan bencana	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota							Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Rp87,356,714.00	Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Cakupan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	lokasi	3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	laporan	3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	laporan	3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Perlindungan Cagar Budaya Dari risiko Bencana	Persentase cagar budaya yang dilindungi dari risiko bencana	2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Perlindungan Cagar Budaya dari Risiko Bencana	5	5	5	5	5	lokasi	2.22.05.2.02.0001 Perlindungan Cagar Budaya		Semua Kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Cakupan desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dan dikembangkan	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	3	3	3	3	3	dokumen	2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							50	50	50	50	50	orang	2.13.04.2.01.0005					

						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Masyarakat							Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	2	2	2	2	2	dokumen	2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Penanganan Bencana	Persentase desa yang mendapat program Kampung Siaga bencana kabupaten/kota	1.06.06 Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	15	15	15	15	15	kampung /desa	1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp391,392,909.00	Semua Kecamatan	Dinas Sosial (Dinsos)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan						meter	1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	5	5	5	5	5	unit	1.03.06.2.01.00022 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5	5	5	5	5	sistem drainase perkotaan	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Peningkatan Perizinan Bangunan (PBG)	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat	Jumlah bangunan ber-IMB (unit) dan jumlah bangunan gedung daerah	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	30	30	30	30	30	orang	1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

			Laik Fungsi Bangunan Gedung		(IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung													
						Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	20	20	20	20	20	dokumen	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Semua kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pembangunan Infrastruktur Perumahan berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Persentase pembangunan infrastruktur perumahan berbasis PRB	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	Cakupan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi di kawasan rawan bencana	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp165,925,260.00	Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Tata Kelola Kawasan Permukiman Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Rasio rumah/pemukiman layak huni pada kawasan rawan bencana	1.04.03 Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman di kawasan rawan bencana	1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	4	4	4	4	4	laporan	1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Pengendalian dan Pengawasan Penataan Permukiman di Daerah Rawan Bencana	Cakupan pengendalian dan pengawasan penataan permukiman di daerah rawan bencana	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sungai						Km	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Rp6,244,561,921.00	Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
												Km	1.03.02.2.01.0074					

						Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya							Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai						Km	1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						Km	1.03.02.2.01.0087 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Breakwater						Km	1.03.02.2.01.0092 Peningkatan Breakwater		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Normalisasi/Restorasi Sungai						Km	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing						Km	1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembangunan Breakwater	1	1	1	1	1	Km	1.03.02.2.01.0102		Kec. Buki	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							5	1	1	1	1	Km	Pembangunan Breakwater		Kec. Pasimarannu			
															Kec. Bontomatene			
												Km	1.03.02.2.01.0103					

						Peningkatan Tanggul Sungai							Peningkatan Tanggul Sungai		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1	1	1	1	1	Km	1.03.02.2.01.0109		Kec. Bontomanai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
													Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Kec. Bontomatene			
						Pembangunan Tanggul Sungai	1	1	1	1	1	Km	1.03.02.2.01.0115		Kec. Bontoharu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
													Pembangunan Tanggul Sungai		Kec. Bontosikuyu			
															Kec. Bontomatene			
							1	1	1	1	1	Km			Kec. Buki			
							2	1	1	1	1	Km			Kec. Pasilanmbena			
															Kec. Pasimasunggu			
						Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	2.5	1	1	1	1	Km	1.03.02.2.01.0117		Kec. Bontoharu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
													Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Kec. Bontosikuyu			
															Kec. Bontomatene			
							3	1	1	1	1	Km			Kec. Buki			
							9	1	1	1	1	Km			Kec. Takabonerate			
							6	1	1	1	1	Km			Kec. Pasimanggu Timur			
															Kec. Bontomanai			
							4	1	1	1	1	Km			Kec. Pasilambena			
															Kec. Pasimasunggu			
Sasaran 3.2: Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah																		
		1.05.03			1.05.03.2.02		3	3	3	3	3	unit	1.05.03.2.02.0015					

Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota							Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp2,534,927,799.00	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50	50	50	50	50	keluarga	1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Semua kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Alat Deteksi Dini Bencana Tsunami	0	0	1	1	1	unit	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG	APBN, APBD, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
		1.05.04			1.05.04.1.01		1	0	0	0	0		1.05.04.1.01.0002					

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Cakupan pemetaan rawan bencana kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencan Kebakaran	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran						dokumen +Peta	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran		Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran		Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindung Diri	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.04.1.01.0006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindung Diri		Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.04.1.01.0007 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.04.1.01.0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.05.04.1.01.0021 Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Satpol PP, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
		1.02.03			1.02.03.2.01		50	50	50	50	50	orang	1.02.03.2.01.0002					

Program Rumah Sakit Aman Bencana	Cakupan Rumah Sakit Aman Bencana di daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit di Daerah Rawan Bencana	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Aman Bencana							Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan (Dinkes)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
					1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Aman Bencana di daerah rawan bencana	50	50	50	50	50	orang	1.02.03.2.03.0001 Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan (Dinkes)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)	Persentase pengelolaan desa/ kelurahan tangguh bencana	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa di kawasan rawan bencana	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa	1	1	1	1	1	laporan	2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Desa	Rp406,725,099.00	Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	1	1	1	dokumen	2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50	50	50	50	50	keluarga	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa (DPMD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
		2.14.02			2.14.02.2.02		1	1	1	1	1	dokumen	2.14.02.2.02.0005					

Program Pengendalian Penduduk	Persentase pengendalian penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota yang berada di kawasan rawan bencana	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan							Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Sasaran 3.3: Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah																	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp2,534,927,799.00	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	BPBD, Damkar	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota		Semua OPD dan Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10	10	10	10	10	orang	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.03.0010					

						Respon Cepat Bencana Non-Alam Epidemi/Wabah Penyakit							Respon Cepat Bencana Non-Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	1	1	1	1	laporan	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Penanganan Bencana	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1.06.06 Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Cakupan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	300	300	300	300	300	orang	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Rp391,392,909.00	Semua Kecamatan	Dinas Sosial (Dinsos)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Sandang	300	300	300	300	300	orang	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang		Semua Kecamatan	Dinas Sosial (Dinsos)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	50	50	50	50	50	unit	1.06.06.2.01.0004 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Semua kecamatan	Dinas Sosial (Dinsos), BPBD, DP3AP2KB	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	75	75	75	75	75	orang	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Semua Kecamatan	Dinas Sosial (Dinsos), DP3AP2KB	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelayanan Dukungan Psikososial	300	300	300	300	300	orang	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial		Semua Kecamatan	Dinas Sosial (Dinsos), DP3AP2KB	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
		2.11.05			2.11.05.2.01		4	4	4	4	4	laporan	2.11.05.2.01.0002					

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Penyimpanan sementara Limbah B3	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3							Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	10	10	10	10	10	unit	2.11.05.2.01.0003 Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	10	10	10	10	10	unit	2.11.05.2.01.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengumpulan limbah B3	2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10	10	10	10	10	dokumen	2.11.05.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	4	4	4	4	4	dokumen	2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	10	10	10	10	10	unit	2.11.05.2.02.0003 Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di kabupaten/kota	10	10	10	10	10	usaha	2.11.05.2.02.0004 Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Limbah B3 di kabupaten/kota	10	10	10	10	10	unit	2.11.05.2.02.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengumpulan Limbah B3 di kabupaten/kota		Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan terhadap korban bencana	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5	5	5	5	5	dokumen	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp29,047,722,010.00	Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan (Dinkes)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1	1	1	1	1	dokumen	1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp29,047,722,010.00	Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan (Dinkes)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	1	1	1	1	dokumen	1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Rp29,047,722,010.00	Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan (Dinkes)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan cadangan pangan	2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1	1	1	1	1	dokumen	2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rp50,282,800.00	Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5000	5000	5000	5000	5000	ton	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5000	5000	5000	5000	5000	ton	2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							3000	3000	3000	3000	3000	ton	2.09.03.2.02.0005					

						Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang terdampak bencana	2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	layanan	2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Cakupan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang rawan/terdampak bencana	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30	30	30	30	30	unit	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perhubungan (Dishub)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	30	30	30	30	30	unit	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perhubungan (Dishub)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	30	30	30	30	30	unit	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Semua Kecamatan	Dinas Perhubungan (Dishub)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	30	30	30	30	30	unit	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Semua Kecamatan	Dinas Perhubungan (Dishub)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
		2.11.11			2.11.11.2.01		15000	15000	15000	15000	15000	ton	2.11.11.2.01.0012					

Program Pengelolaan Persampahan	Persentase area pelayanan pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah akibat bencana yang dikelola	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan							Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Rp3,196,005,931.00	Semua Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terkait perubahan iklim	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan						Ha	3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penanggulangan Bencana Non-Alam yang bersifat Zoonosis	1	1	1	1	1	laporan	3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non-Alam yang bersifat Zoonosis		Semua kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	1	1	1	1	laporan	3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Sasaran 3.4: Meningkatkan upaya pemulihan pasca bencana daerah																		
Program Penanggulangan Bencana	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	kegiatan	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Rp2,534,927,799.00	Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	5	5	5	5	5	lembaga	1.05.03.2.04.0011 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
		1.03.02			1.03.02.2.01							Km	1.03.02.2.01.0105					

Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Permukiman di Daerah Rawan Bencana	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai dan wilayah pantai kewenangan kabupaten/kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya							Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Rp6,244,561,921.00	Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rehabilitasi Breakwater						Km	1.03.02.2.01.0106 Rehabilitasi Breakwater		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing						Km	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rehabilitasi Tanggul Sungai						Km	1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai		Semua Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pembangunan Infrastruktur Perumahan berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Persentase pembangunan infrastruktur perumahan berbasis PRB	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	Cakupan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi di kawasan rawan bencana	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0004					

						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana							Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	Cakupan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	0	50	0	50	0	orang	1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	orang	1.04.02.2.02.0007 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

						Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50	50	50	50	50	orang	1.04.02.2.02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100	0	100	100	0	unit rumah	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	0	30	0	30	30	unit rumah	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	rumah tangga	1.04.02.2.030007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	20	20	0	0	unit rumah	1.04.02.2.030012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Cakupan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi	1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	dokumen	1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							100	100	100	100	100		1.04.02.2.04.0006					

						Pelaksanaan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						rumah tangga	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), BPBD	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	3.27.05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terkait perubahan iklim	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	0	1	1	1	1	laporan	3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan		Semua Kecamatan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dan/atau usaha menengah	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pemberdayaan UMKM dalam menghadapi perubahan iklim	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	10	10	10	10	10	unit usaha	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp216,895,110.00	Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	10	10	10	10	10	unit usaha	2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	10	10	10	10	10	unit usaha	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50	50	50	50	50	orang	2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							10	10	10	10	10		2.17.07.2.01.0007					

						Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil						unit usaha	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil		Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemulihan Usaha Mikro	0	10	20	20	0	unit usaha	2.17.07.2.01.0009 Pemulihan Usaha Mikro		Semua Kecamatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	2.24.03 Program Pengelolaan Arsip	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Cakupan arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana yang berskala kabupaten/kota	2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	100	100	100	100	100	arsip	2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Semua Kecamatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	100	100	100	100	100	arsip	2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		Semua Kecamatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
Program Pencatatan Sipil	Cakupan pencatatan sipil	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil bagi korban bencana	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1	1	1	1	1	dokumen	2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Semua Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil bagi korban bencana	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2	2	2	2	2	laporan	2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		Semua Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
						Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	2	2	2	2	2	laporan	2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		Semua Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029
							50	50	50	50	50	orang	2.12.03.2.02.0010					

						Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil						Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil		Semua Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	APBD, APBN, CSR	RIPB 2020-2044, Renas PB 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH